BY NC ND

13/40951.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi Kasus Pada PNPM-PISEW di Kecamatan Airgegas)

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik

UNIVERSITAS TERBUKA

Disusun Oleh :

FAUZIANA
NIM. 016093839

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2012

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

P E R N Y A T A A N

TAPM yang berjudul : **"MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada PNPM-PISEW di Kecamatan Airgegas"** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Desember 2012

yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 DJP

FAUZIANA
NIM. 016093839

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama	:	FAUZIANA
NIM	:	016093839
Program Studi	:	Administrasi Publik
Judul Tesis	:	MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada PNPM-PISEW di Kecamatan Argegas)

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal : Sabtu, 15 Desember 2012
Waktu : 13-00 – 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Drs. Syarif Fadillah, M.Si .....

Penguji Ahli : Prof. Dr. Ki Agus Sobri, M.Si .....

Pembimbing I : Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA .....

Pembimbing II : Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus Pada PNPM-PISEW di Kecamatan Airgegas)
Penyusun TAPM	:	FAUZIANA
NIM	:	016093839
Program Studi	:	Administrasi Publik
Hari/ Tanggal	:	Sabtu, 15 Desember 2012

Menyetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA	Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si
NIP. 19470401 196805 1 001	NIP. 19560127 198602 1 001

Mengetahui,

Ketua bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ Program Magister Administrasi Publik	Direktur Program Pascasarjana
Dra. Susanti, M.Si	Suciati, M.Sc.,Ph.D
NIP. 19671214 199303 2 001	NIP. 19520213 198503 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

ABSTRAK

MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus Pada PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas)

FAUZIANA

UNIVERSITAS TERBUKA

Fauzi.ags@gmail.com

Kata Kunci : manajemen, kemitraan, pemerintah daerah

Salah satu isu pokok dalam pembangunan adalah masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini, salah satunya program PNPM PISEW. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) secara nasional merupakan salah satu model pendekatan di dalam membangun suatu "gerakan bersama" dalam menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Upaya ini telah menghasilkan perkembangan yang posisif, terutama dalam membangun lembaga masyarakat di tingkat desa yang cukup mengakar, representatif, dan bersifat kolektif yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa, disingkat LKD. Keberadaan LKD inilah yang diharapkan mampu menjadi pondasi yang kokoh bagi terbangunnya tatanan masyarakat berdaya.

Meskipun demikian, harus diakui bahwa tatanan masyarakat berdaya tersebut perlu terus menerus difasilitasi sehingga mampu bertransformasi ke tatanan masyarakat mandiri. Pada tatanan masyarakat mandiri inilah nantinya diharapkan mampu mendorong tumbuhnya gerakan bersama (kemitraan) yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi "gerakan bersama" berlandaskan kemitraan dan kesetaraan dari pilar pembangunan tersebut.

Penulisan TAPM ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan program PNPM PISEW. Pengambilan data sekunder berupa dokumen program dan data primer berupa hasil wawancara mendalam kepada

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

informan dari peneliti yang penentuan informannya dengan *purposive sampling* agar data yang diperoleh dapat mendeskripsikan objek penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan melalui analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang terjadi antara LKD dengan Pemerintah Daerah adalah pada tahap penyusunan program model kemitraan yang dibangun adalah bersifat *Subordinatif Union Of Partnership.* Mempunyai otoritas yang tinggi, atau merasa dominan karena mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan pihak lain hal ini tampak pada proses pengambilan keputusan. Sedangkan tahap perencanaan (pengajuan proposal dan pencairan dana), pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan kegiatan lebih mencerminkan model yang mutualistik. Persekutuan kedua pihak tersebut telah memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat. Walaupun dari segi status berbeda tetapi masing-masing telah mewujudkan visi dan misinya secara bersama yaitu menanggulangi kemiskinan secara terpadu. Kerjasama yang dilakukan kedua pihak berbentuk kerjasama secara linear. Dalam konteks ini tidak membedakan besar kecilnya suatu organisasi, status/legalitas, atau kekuatan pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

ABSTRACT

MITERITY MANAGEMENT OF VILLAGE SOCIETY INSTITUTE (LKD) AND REGIONAL GOVERNMENT
(Case Study On PNPM PISEW Airgegas District)

FAUZIANA

OPEN UNIVERSITY

Fauzi.ags@gmail.com

Keywords : management, miterity, regional government

One of main issue of the development is poverty. Many efforts have done by the government to solve this poverty, one of it is PNPM PISEW programme. National Programme of society endeavoring in Social Infrastructure and region economic programme (PNPM PISEW) nationally is one of the aproach model in developing a "togetherness movement" in overcoming the poverty in a regional autonomously. This effort has produce positive development, especially on developing society institute in village level which is taking root, representative, dan colecctively that call lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). This existance of LKD expected could become strong pondation for awaken useful order society.

Even though, has to avowed that useful order society need to be facilitated contonously untill could transformed to be outonomous order society. In this outonomous society order expected will push the growth of togetherness movement (miterity) that is sinergic between community and regional government until the efforts in overcoming poverty will become togetherness movement base on miterity and equality of those development pillars.

This TAPM composed using kualitative research by describing PNPM PISEW programme. Secondary datas taking is programme documents, and primery datas is deep interview result to the informant of resercher, which informant determination by purposive sampling to make the data took could describe the research object dan achieve the research aim by kualitative analysis.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Reasearch outcome shows that miterity form happened between LKD and regional government is in programme arrangement level of miterity model developed characterize subordinative union of partnership. Having high autority, or feel dominant because of have more ability than the others, this shows in decision taking process. Meanwhile planning phase (poposal submission and fund liquefaction), actuating, liability and project controlling reflects mutualistic model. The alliance of the both side has given benefit and taken benefit. Although different in status but each of them had create vision and mission together which is overcoming poverty integratedly. Teamworked that's done by both side is linear work. In this context isnot discriminate whether big or small ot the organitation, status/legality, or the power of miterity side. The main stressed were vission and mission that is fullfilled to each other.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Kepala UPBJJ-UT Pangkalpinang selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
3. Pembimbing I Bapak Profesor Dr. Aries Djaenuri yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
4. Pembimbing II Bapak Dr. Ir. Bambang Deliyanto, M.Si yang telah memotivasi, memperkenalkan kepada saya tentang "Ilmu Penulisan TAPM yang benar" sehingga membuka dan merubah pola pikir saya terhadap ilmu tersebut. Selain itu beliau juga telah memberikan bimbingan berharga bagi saya tentang "nikmatnya menulis TAPM guna mendapatkan kepuasan dalam menulis". Dan pentingnya merangkai kata demi kata untuk membangun argument dalam penyusunan TAPM ini;
5. Kepala bidang Magister Administrasi Publik selaku penanggungjawab Program Administrasi Publik;
6. Orang tua H. Dulhamid (Alm) dan Hj. Sakya dan istriku tersayang Renti Heryani, SP serta anakku tercinta Refa Nurtantiawati dan Nafi Aditya Faizi yang telah memberikan bantuan dukungan materiil dan moral;

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

7. Para sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, ...Desember 2012

Penulis

Fauziana

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan Hasil Karya Sendiri ii
Lembar Pengesahan iii
Lembar Persetujuan .TAPM..... iv
Abstrak v
Abstract vi
Kata Pengantar vii
Daftar Isi viii
Daftar Tabel xv
Daftar Gambar xvi
Daftar Lampiran xvii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Perumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 11
D. Kegunaan Penelitian 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 13
A. Kajian Teori 24
1. Good Governance..... 24
2. Pemberdayaan Masyarakat 30
3. Kemitraan 35
4. Model Kemitraan Dalam Pemberdayaan Msyarakat 47
5. Manajemen 61

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

B. Kerangka Berpikir 63
C. Definisi Konsep Dan Operasional 65

BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 70
A. Desain Penelitian 70
B. Populasi dan Sampel 74
C. Instrumen Penelitian 75
D. Prosedur Pengumpulan Data 76
E. Metode Analisis Data 79

BAB IV DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PNPM PISEW..... 81
A. Deskripsi Wilayah Penelitian 81
1. Rumusan Visi dan Misi Kecamatan 81
2. Kondisi Fisik Wilayah 82
a. Letak Geografis dan Administrasi Kecamatan Airgegas 84
b. Kependudukan 85
1) Jumlah dan Kepadatan Penduduk 85
2) Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 85
3) Struktur Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga 85
3. Kondisi Perekonomian 86
4. Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Airgegas 87
a. Prasarana Jalan 87
b. Prasarana Jembatan 88
c. Prasarana Air Bersih 88
d. Drainase Air Limbah 89
e. Listrik 91
f. Telekomunikasi 91

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

g. Pengelolaan Sampah 92
5. Perkembangan Kegiatan Ekonomi di Kecamatan Airgegas 94
6. Kelembagaan Ekonomi Yang Ada Di Kecamatan Airgegas..... 94
7. Perkembangan Investasi 95
a. Sektor Pertanian 95
b. Sektor Perdagangan 95
8. Kelembagaan 96
9. Aspirasi Masyarakat..... 96
B. Deskripsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) 97
1. Pengertian PNPM PISEW 97
2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan PNPM PISEW..... 99
3. Keterlibatan Dua Unsur Dalam Pelaksanaan PNPM PISEW..... 100
4. Struktur Organisasi Pelaksanaan PNPM PISEW.....100

BAB V ANALISIS MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH 107
A. Perencanaan Kegiatan 125
1. Penyusunan Proposal Kegiatan 127
2. Pengajuan Proposal Kegiatan 131
3. Pencairan Dana 133
B. Tahap Pelaksanaan 137
1. Realisasi Pelaksanaan 139
a. Talud Penahan Tanah 140
b. Parit Pasangan Batako 140

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

c. Pembangunan Jalan Tanah 141
d. Pembangunan Jalan Paving Blok 141
e. Pembangunan Jembantan Beton 142
f. Pembangunan Posyandu Desa 142
g. Pembangunan Pasar Desa 142
h. Pembangunan Sarana Pemandian Umum 143
i. Pembangunan MCK 143
C. Tahap Pertanggungjawaban 144
D. Tahap Pengawasan 145
E . Kesamaan Visi 155
F. Saling Membutuhkan..... 159
G. Saling Menguntugkan 167

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... 175
A. Kesimpulan 175
B. Saran 177

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Pemerintah dan Swasta dalam Penanggulangan Kemiskinan 5
Tabel 3.1 Daftar Informan 74
Tabel 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Airgegas 80
Tabel 4.2 Luas Tiap-Tiap Desa di Kecamatan Airgegas 81
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 82
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Rumah Tangga..... 83
Tabel 4.5 Struktur Organisasi PNPM PISEW 98
Tabel 4.6 Nama- Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).....102
Tabel 5.1 Kegiatan dan Biaya PNPM PISEW Tahun Anggaran 2012..... 106
Tabel 5.2 Rekapitulasi Realisasi Program PNPM PISEW Tahun 2009, 2010, 2011, 2012 138
Tabel 6.1 Bentuk dan Nilai Swadaya Masyarakat 150
Tabel 6.2 Identifikasi Potensi Kemitraan Antara LKD dan Pemerintah Daerah.152

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

DAFTAR GAMBAR

Gb. 2.1 Keseimbangan Tiga Unsur 28
Gb. 2.2 Skema Kerangka Fikir Penelitian 62
Gb. 4.1 Jalan Desa 84
Gb. 4.2 Jembatan di Jalan Desa 85
Gb. 4.3 Tempat Mandi dan Cuci 86
Gb. 4.4 Drainase dan Permukiman 87
Gb. 4.5 Jaringan Listrik 88
Gb. 4.6 Jaringan Telepon 89
Gb. 4.7 Tempat Pembuangan Sampah 90
Gb. 5.1 Kemitraan LKD dengan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM PISEW 118
Gb. 5.2 Skema Tahap Perencanaan PNPM PISEW 120
Gb. 5.3 Skema Tahap Penyusunan Proposal PNPM PISEW 123
Gb. 5.4 Skema Tahap Pengajuan Proposal PNPM PISEW 124
Gb. 5.5 Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana PNPM PISEW 126
Gb. 5.6 Peta Lokasi Realiasasi PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas 131

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Rekomendasi Camat (Form LKD-5a) 181
Lampiran 2. SP3 (Form LKD-6) 182
Lampiran 3. Rencana Jadwal Pelaksanaan (Form LKD-8f) 188
Lampiran 4. Rencana Penggunaan Dana (form LKD-10.a) 189
Lampiran 5. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (Form LKD-10.a.1)..... 190
Lampiran 6. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2) 191
Lampiran 7. Kwitansi Pembayaran Angsuran Tanpa materai (Form LKD-10.b) 192
Lampiran 8. Berita Acara Prestasi pekerjaan (Form LKD-10.c) 193
Lampiran 9. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD 10.d) ... 194
Lampiran 10. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari LKD ke PPK (Form LKD-11.a) 195
Lampiran 11. Pakta Integritas (Form LKD-13) 196
Lampiran 12. Foto dokumentasi pelaksanaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau station (STA) yang sama 197
Lampiran 13. Rencana kegiatan Operasional dan Pemeliharaaan (OP) oleh Tim OP yang dibentuk berdasarkan rembug Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di tingkat desa. 199

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sesuatu yang kompleks, tetapi untuk memahaminya dapat disederhanakan bahwa masalah pokok dari kemiskinan adalah (1) Pendapatan yang rendah, (2) Adanya kesenjangan yang dalam antara yang kaya dengan yang miskin, dimana masyarakat miskin adalah mayoritas hidup di pedesaan (3) Partisipasi masyarakat yang minim dalam usaha-usaha pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dan hidup di perdesaan. Permasalahan utama kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat di perdesaan antara lain rendahnya kualitas SDM, terbatasnya akses sumberdaya produktif, lemahnya kelembagaan, dan terbatasnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana di perdesaan. Berbagai permasalahan tersebut diperberat dengan peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja yang semakin membebani lapangan kerja di perdesaan yaitu pertanian dan akan mengakibatkan tenaga kerja yang semakin tidak produktif.

Peningkatkan perekonomian diperlukan prioritas pembangunan yang diarahkan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut sehingga tahap demi tahap dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan terlepas dari ketertinggalan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Prioritas pembangunan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja berbasis sumber daya lokal. Itulah sebabnya, cara yang dipandang terbaik untuk memecahkan masalah kemiskinan adalah mengembalikannya kepada masyarakat karena yang lebih mengetahui permasalahan kemiskinan adalah masyarakat yang bersangkutan.

PNPM-PISEW adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaaan, memperbaiki pengelolaan pemerintah dan penguatan institusi di pedesaan. PNPM-PISEW sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi kemiskinan dengan membangun masyarakat mandiri yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat secara efektif dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan. Intervensi dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis dan bantuan stimulus infrastruktur sosial dan ekonomi dasar yang diharapkan dapat mendukung upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif dan sinkron dengan sistem perencanaan pembangunan yang ada.

Pendampingan pada masyarakat dilakukan dengan internalisasi akan kebutuhan masyarakat, penguatan lembaga masyarakat dan pengembangan wilayah untuk mendapatkan kelembagaan yang baik dan mampu membuat perubahan pola pembangunan yang representatif dari masyarakat. Pembelajaran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

penerapan konsep pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah dengan penyusunan program partisipatif oleh masyarakat melalui penguatan akuntabilitas masyarakat dengan mendorong segenap lapisan masyarakat melakukan kontrol sosial secara obyektif sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan yang berpihak pada masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan diakui keberadaanya oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa, yang dibentuk oleh masyarakat dan beranggotakan masyarakat itu sendiri, serta harus mempunyai struktur organisasi atau kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan anggota. Pengurus organisasi tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari 5 orang, dengan minimal 1 anggotanya adalah perempuan. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang dimaksud dalam pelaksanaan PNPM PISEW diantaranya seperti Karang Taruna, PKK, Koperasi, Kelompok Usaha Kegiatan Ekonomi (petani, nelayan dsb). Kelompok Pengelola Prasarana Desa (Seperti P3A, Lumbung Desa dan sebagainya), atau lembaga kemasyarakatan seperti Organisasi Pemuda Masjid, Kelompok Pemuda Gereja dan sebagainya yang tumbuh dan berkembang di desa tersebut.

Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD) ini merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sebelum diadakan Program Nasional pemberdayaan masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas, program-program penanggulangan kemiskinan masih dilaksanakan secara parsial dengan mengedepankan ego-ego sektoral. Dalam hal ini, program yang sama dilaksanakan oleh pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten serta lembaga swasta dan lembaga masyarakat. Akibatnya, program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan itu menjadi tumpang tindih atau *overlapping*. Kondisi ini diperparah lagi oleh kurangnya peran masyarakat dalam penangulangan kemiskinan.

Menurut Sulistiyani (2004:100-102), Masyarakat miskin dipandang memiliki kelemahan/ ketidakberdayaan pada banyak segi. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin tersebut maka Komite Penanggulangan Kemiskinan telah menyusun kegiatan dan sasaran kegiatan dengan memadukan dua faktor, yaitu pemerintah, swasta dalam sebuah kemitraan yang baik. Apabila diamati pada tabel 1.1 dibawah ini, tampaknya masih ada sesuatu yang belum me ndapatkan perhatian secara proporsional dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin. Jika pemerintah dan swasta telah mendapatkan porsi peran yang sedemikian jelas, seimbang dan bentuk kerjasama juga dirumuskan dengan baik, sebaliknya masyarakat belum diberikan porsi secara jelas mengenai apa dan dimana peran yang sebaiknya dilakukan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel. 1.1 Kontribusi Pemerintah dan Swasta dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Sasaran
Pemerintah : Perencanaan		
Panduan dan manual	Perencanaan dan penganggaran dan memberikan informasi program penanggulangan kemiskinan	Dokumen sebagai guideline untuk merencanakan dan menganggarkan penangulangan kemiskinan
Inisiatif Daerah	Perhatian terhadap kesuksesan dan kegagalan penanggulangan kemiskinan oleh daerah	Pengakuan dan penghargaan keberhasilan daerah dalam penanggulangan kemiskinan
Koordinasi dengan departemen/ Instansi	Bappenas, Departemen Keuangan, Depdagri untuk pembuatan peraturan agar desentralisasi memperhatikan masalah kemiskinan	Partisipasi departemen dan instansi dalam menjalankan kegiatan sektornya terfokus pada penanggulangan kemiskinan
Koordinasi dengan departemen/ Instansi	Bappenas, Departemen Keuangan, Depdagri untuk pembuatan peraturan agar desentralisasi memperhatikan masalah kemiskinan	Partisipasi departemen dan instansi dalam menjalankan kegiatan sektornya terfokus pada penanggulangan kemiskinan
Koordinasi dengan daerah dalam penyusunan strategi	Membangun kerjasama dengan daerah untuk mengidentifikasi isu-isu daerah	Terbangunnya strategi penanggulangan kemiskinan daerah
Implementasi Pemberdayaan		
Pengembangan Kapasitas	Program terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan reflikasi program serta koordinasinya	Pengembangan training, tumbuhnya perhatian, dan pengembangan program dan kegiatan
Pemberdayaaan lokal	Pengalaman keberhasilan di tingkat lokal dan reflikasinya	Adanya strategi menyeluruh yang mendorong berkembangnya kegiatan di mana masyarakat sebagai subjek
Parsisipasi Penganggaran	Informasi terhadap akses penganggaran dan partisipasi masyarakat	Berkembangnya strategi penganggaran yang melibatkan masyarakat/ publik, analisis dan monitoring

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lanjutan Tabel 1.1

Kegiatan	Bentuk Kegiatan	Sasaran
Reorientasi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat	Menjamin peningkatan fokus kemiskinan dan pengembangan rencana dan penganggaran kemiskinan	Manajemen lokal tentang penanggulangan kemiskinan, adanya standar pelayanan masyarakat.
Keterlibatan Sektor Swasta		
Koordinasi dalam strategi penanggulangan kemiskinan	Perusahaan swasta membantu penanggulangan kemiskinan pada prioritas dan fokus yang berdampak luas	Koordinasi dengan perusahaan swasta untuk mengupayakan agar swasta berperan besar dalam strategi dan inisiatif penanggulangan kemiskinan
Partisipasi dalam Penganggaran	Partisipasi pada beberapa strategi	Terciptanya kemitraaan antara swasta dan masyarakat

Sumber : Matrik Kegiatan KPK 7 Januari 2002

Masyarakat dalam model kegiatan yang dilakukan tidak lebih sekedar sebagai objek dari proses pemberdayaan. Sementara konsep dari kemitraan yang sesungguhnya memberikan peran seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan kondisi kebijakan tersebut diatas maka aspek kebijakan belum memberikan ruang baik bagi masyarakat untuk berekspresi dan beraksi di dalam memberdayakan diri sendiri.

Bentuk fasilitasi pemerintah daerah terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan kemitraan adalah menyediakan dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan program tersebut. Disamping itu, pemerintah juga menyediakan personil atau tenaga pendamping untuk mendampingi LKD. LKD

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

merencanakan program-program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di wilayahnya. Kemudian, tahap pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatannya dilakukan secara bersama antara pemerintah daerah dan LKD.

Pendanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat saja, tetapi juga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Karena penanggulangan kemiskinan tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, maka pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya seperti LKD. Pemerintah menjalin kerjasama dengan LKD karena LKD merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat yang mendapat legitimasi dari masyarakat untuk memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM – PISEW memerlukan suatu bentuk kerjasama yang dinamakan dengan kemitraan.

Lembaga di tingkat desa di Kecamatan Airgegas yang selama ini diberikan kepercayaan untuk menanggani urusan pemerintahan dan sosial (program penanggulangan kemiskinan) seperti LPM belum menempatkan masyarakat sebagai subjek program. Menurut Kuncoro (2004) menyatakan selama ini lembaga masyarakat di tingkat Desa/ kelurahan seperti LPM belum sepenuhnya mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, kenyataannnya lembaga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

tersebut belum mampu menyusun program-program penanggulangan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat belum ada dokumen-dokumen penyusunan perencanaan program yang sistematis (jangka pendek atau jangka menengah serta melibatkan masyarakat secara partisipasi). Ada angapan di masyarakat, karena lembaga tersebut dibentuk oleh Pemerintah sehingga peranannya tidak lain sebagai perpanjangan tangan pemerintah atau partai politik tertentu. Kuncoro (2004) menambahkan walaupun di tingkat masyarakat telah ada kelompok atau lembaga masyarakat yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama (seperti kelompok arisan ,dll), tetapi pemerintah belum memberikan kepercayaan kepada kelompok atau lembaga masyarakat tersebut karena keberadaan kelompok tersebut sifatnya masih eksklusif (kelompok masyarakat tertentu) belum mewadahi masyarakat secara keseluruhan terutama masyarakat miskin.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Perumusan Masalah

Pendekatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) dilandasi oleh kesadaran bahwa akar masalah kemiskinan dan kekurang berhasilan dalam pembangunan adalah akibat kondisi masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan tercermin dalam sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, mengandalkan bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya, tidak mandiri serta memudarnya kondisi orientasi moral dan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip kemasyarakatan serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Namun pendekatan yang hanya bertumpu pada masyarakat melalui proses pembelajaran saja ternyata tidak cukup, sehingga sekali lagi diperlukan prakarsa dan dukungan pelaku pembangunan lokal lainnya, seperti pemerintah daerah, swasta/ dunia usaha dan kelompok peduli lainnya. Prakarsa dan dukungan tersebut didorong melalui jalinan kemitraan antara masyarakat dengan para pelaku pembangunan, termasuk pemerintah daerah. Tujuannya untuk mengembangkan proses interaksi sebagai upaya menciptakan gerakan bersama dalam penanggulangan kemiskinan.

Kemitraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kemitraan Pemerintah Daerah dengan masyarakat melalui LKD. Diperlukannya kemitraan tersebut didasarkan pada alasan untuk menghindari ketidakefektifan kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah. Kuncoro (2004) menyatakan bahwa kelemahan kebijakan/ program pemerintah pada masa lalu menyangkut penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh beberapa hal seperti yang disebutkan berikut :

1. Perencanaan, yaitu penentuan sasaran dan kriteria miskin serta teknis pelaksanaan yang dilakukan pemerintah/instansi pusat (*top-down*) seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau daerah tertentu
2. Program-program yang dilaksanakan secara sektoral seringkali mengabaikan adanya semangat ego-sektoral dan saling tumpang tindih
3. Banyak program penanggulangan kemiskinan yang menempatkan masyarakat sebagai objek sehingga masyarakat kurang berpartisipasi secara aktif

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Sulitnya menjaga keberlanjutan program (program baru bukan keberlanjutan program lama) mengakibatkan banyak program penanggulangan kemiskinan tidak bersinambungan.
5. Pertanggungjawabannya hanya bersifat administratif kepada pemerintah, sehingga tidak terbangun keterbukaan dan akuntabilitas publik, akibat pendekatan proyek maka keberhasilan program hanya diukur dengan persentase bantuan yang berhasil disalurkan dan jumlah sasaran penerima.

Dalam memberikan optimalisasi upaya membangun gerakan bersama sebagaimana harapan besar yang ingin diwujudkan melalui pendekatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan upaya kongkrit guna lebih memberikan ruang dukungan terhadap gerakan tersebut. Tindak lanjut proses membangun ruang sadar di masyarakat yaitu dengan memberikan kesempatan proses lanjutan atau yang lebih diarahkan pada pengorganisasian semangat kebersamaan tersebut, yaitu melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW). Tindakan ini diharapkan mampu melandasi pengembangan upaya dan aktivitas penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama oleh dan dari masyarakat, pemerintah serta kelompok peduli setempat.

Sumber dana Program Nasional pemberdayaan masyarakat Pengembangan Infrastruktur sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) berasal dari pemerintah (rupiah murni APBN, Pinjaman luar negeri dan APBD) dan masyarakat (swasta dan swadaya masyarakat) dalam upaya mempercepat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kegiatan penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dasar.

Belajar dari kondisi diatas, maka diperlukan suatu lembaga, agar tercipta suatu bentuk penanggulangan kemiskinan yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan beberapa pihak melalui kemitraan sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat desa. Implementasi program ini di tingkat daerah diwujudkan dengan pelaksanaan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Program ini membutuhkan keseriusan oleh pemerintah daerah melalui APBD dan kesiapan LKD.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Manajemen Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Pemerintah Daerah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas
2. Model-model kemitraan apa dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas."

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Menjelaskan pelaksanaan kemitraan LKD dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas
2. Mengetahui model kemitraan LKD dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian kebijakan publik. Semakin kompleksnya persoalan penanggulangan kemiskinan maka dibutuhkan suatu model penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terpadu, melalui kemitraan yang dibangun antara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat lokal sangat memungkinkan munculnya kebijakan yang signifikan untuk lebih mendorong pemerintah daerah dan komponen-komponen lainnya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Airgegas
2. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah daerah, instansi terkait, LKD dan kelompok masyarakat lainnya, bahwa penanggulangan kemiskinan tidak saja menjadi tanggungjawab pemerintah pusat semata, tetapi juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, serta, masyarakat sehingga dapat mengoptimalkan potensi-potensi di daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Secara konseptual sebagaimana dalam buku panduan PNPM PISEW, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah merupakan organisasi non pemerintah yang dibentuk berdasarkan atas prakarsa masyarakat sendiri berkaitan dengan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) yang dipergunakan sebagai wadah bagi proses pengambilan keputusan tertinggi di masyarakat di tingkat desa untuk menangani berbagai persoalan kehidupan masyarakat khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan pada masyarakat desa yang bersangkutan.

Oleh karena merupakan organisasi non pemerintah, maka organisasi LKD tersebut diharapkan menjadi lembaga mandiri yang independen serta terbebas dari berbagai macam pengaruh intervensi pemerintah dan kelompok kepentingan tertentu, sehingga dalam tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) berkedudukan dan berperanan sejajar dengan pemerintah serta sektor swasta yang ada, yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri-sendiri dalam rangka pencapaian tugas pembangunan khususnya dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pengikutsertaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan PNPM-PISEW bertujuan :

1. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan terciptanya lapangan kerja
2. Memberdayakan masyarakat desa
3. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan
4. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut belajar dan meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan prasarana, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan sampai dengan pemeliharaan
5. Mengembangkan rasa memiliki pada masyarakat, yang pada akhirnya mengembangkan rasa tanggung jawab dalam memelihara dan mengembangkan prasarana selanjutnya
6. Menguatkan kapasitas kelembagaan LKD di desa dari pengalaman melaksanakan kegiatan PNPM-PISEW
7. Dalam rangka pembangunan wilayah pengikutsertaan masyarakat setempat, termasuk pemanfaatan sumber daya lokal akan merperkecil aliran dana keluar sehingga dapat memperbesar proses *multiplier* (percepatan pertumbuhan).

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagai institusi lokal yang terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya kaum miskin, yang memiliki peranan strategis dalam PNPM-PISEW yaitu mulai dari tahap

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan. Sementara itu tugas LKD dalam program tersebut secara terperinci meliputi hal-hal berikut :

1. Mengikuti :
   a. Rapat persiapan Pelaksanaan Konstruksi (RPPK)
   b. Pelatihan administrasi proyek dan teknis konstruksi yang diadakan di kecamatan oleh Pokja Kecamatan dibantu oleh FK, Ttl serta mengikuti OJT (*On the Job Training*)
2. Melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan SP3
3. Melakukan pencatatan penggunaan dana pada buku kas umum serta mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran
4. Mengajukan termin pencairan dana kepada PPK dengan lampiran sesuai dengan yang dipersyaratkan
5. Menyelenggarakan transparansi pelaksanaan kegiatan melalui musyawarah desa dan penempelan informasi pelaksanaan kegiatan di papan-papan pengumuman dan memastikan dapat diakses oleh semua pihak (Pra Konstruksi dan pasca Konstruksi)
6. Menyampaikan kemajuan kegiatan fisik kepada PJOK Kecamatan dengan mempublikasikannya melalui media komunikasi yang ada di tingkat desa
7. Membuat dan menyampaikan laporan akhir kepada PPK, yang berisi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan beserta kelengkapannnya
8. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan hasil akhir

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui musyawarah desa dan menempelkan di papan-papan informasi

9. Memfasilitasi pembentukan KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara)
10. Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen PNPM PISEW yang menjadi tanggungjawab LKD.

Salah satu tujuan dan sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM – PISEW) yaitu penguatan institusi lokal di tingkat desa, untuk meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan. Hal ini tercermin dari pelaksanaan kegiatan dan yang menerima manfaat adalah masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa. Intervensi dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis dan bantuan stimulus infrastruktur sosial dan ekonomi dasar yang diharapkan dapat mendukung upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Grigg (dalam Pranoto, 2007) Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Definisi teknik juga memberikan spesifikasi apa yang dilakukan sistem infrastruktur dan mengatakan bahwa infrastruktur adalah aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting.

Sarana lingkungan menurut SNI 03-6967-2003 didefinisikan sebagai fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk menyelenggarakan dan mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Prasarana dapat diartikan sebagai infrastruktur. Untuk menciptakan suatu lingkungan pemukiman yang baik maka diperlukan infrastruktur pemukiman dan fasilitas umum pemukiman. Adapun yang dimaksud dengan infrastruktur pemukiman ialah jalan lokal, saluran drainase, pengadaan air bersih, pembuangan air kotor, persampahan, listrik dan telepon.

Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM –PISEW) ada beberapa komponen kegiatan, antara lain :

1. Pembangunan Infrastruktur Skala Kecil

   Dalam PNPM PISEW terdapat enam kategori kegiatan pembangunan infrastruktur skala kecil yang secara langsung dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Yaitu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Infrastruktur transportasi, yaitu pembangunan jalan, jembatan, tambatan perahu, dan komponen terkait.

b. Peningkatan produksi pertanian yaitu pembangunan irigasi tersier.

c. Peningkatan pemasaran pertanian, yaitu pembangunan pasar, gudang produksi, dan lantai jemur.

d. Air bersih dan sanitasi yaitu pembangunan sanitasi lingkungan (MCK) dan air bersih (perpipaan, bak penampungan air bersih, sumur pompa tangan, hidran umum).

e. Pendidikan yaitu rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), termasuk fasilitas pendukung seperti kamar mandi/ WC serta pengadaan sarana pendukung kelas seperti meja belajar, kursi dan papan tulis, tapi tidak termasuk buku-buku pelajaran sekolah.

f. Kesehatan yaitu rehabilitasi Puskesmas, Puskesmas Pembantu (perawatan dan non-perawatan), serta pembangunan atau rehabilitasi Polindes/ Poskesdes, Posyandu dan Rumah Singgah.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Lokal, Fasilitator dan Masyarakat

Untuk pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan infrastruktur yang prioritas bagi masyarakat miskin dan diusulkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa.

b. Tidak memerlukan pembebasan lahan

c. Beroreintasi pada pengembangan wilayah pedesaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat

e. Memprioritaskan pemberian kesempatan kerja kepada masyarakat desa setempat

f. Mengutamakan penggunaan material setempat

g. Penggunaan teknologi sederhana yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhan setempat.

h. Merupakan infrastruktur yang dapat dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat.

i. Tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, sosial dan budaya.

j. Tidak tumpang tindih dengan kegiatan sektor lain yang sejenis

k. Terintegrasi dengan sistem infrastruktur yang ada.

Untuk masing-masing jenis infrastruktur yang akan dilaksanakan harus memenuhi atau berlandaskan pada kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) Kriteria Infrastruktur Transportasi

a. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi jalan tanah, jalan rabat beton, dan perlengkapannya yaitu jembatan kayu, jembatan besi, jembatan beton, jembatan gantung, gorong-gorong dan lain-lain mempertimbangkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) Lahan untuk jalan desa telah tersedia

2) Beroreintasi kepada pengembangan wilayah (jalan poros/ penghubung desa)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke *outlet* (jalan poros desa lain/ jalan dengan fungsi lebih tinggi/ sungai/ laut/ ferry).

4) Diprioritaskan untuk infrastruktur jalan dan jembatan pedesaan yang memiliki nilai pelayanan ekonomi yang tinggi.

5) Kontruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh LKD

6) Kontruksi jalan dan jembatan harus memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM PISEW.

b. Tambatan Perahu

1) Pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi Tambatan Perahu termasuk di dalamnya jalan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman.

2) Kontruksi Tambatan Perahu harus memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM PISEW.

3. Kriteria infrastruktur untuk Peningkatan Produksi Pertanian

Pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi irigasi pedesaan berupa irigasi pedesaan, embung, bendung sederhana atau air tanah/ mata air, yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri, dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Luas areal daerah irigasi pedesaan maksimal 100 hektar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Kontruksi sederhana dengan mempertimbangkan sumber daya setempat (tenaga kerja, material, peralatan dan teknologi) sehingga mampu dilaksanakan oleh LKD.

c. Bukan bagian dari irigasi teknis atau irigasi yang telah masuk dalam inventarisasi DPU Pengairan.

d. Jenis infrastruktur yang boleh dilaksanakan terdiri atas bangunan pengambilan, saluran, bangunan bagi dan bangunan pelengkap

e. Kontruksi memenuhi standar teknis sebagaimana diatur dalam Panduan Teknis PNPM PISEW

4. Kriteria Infrastruktur untuk Pemasaran Pertanian/ Pasar Desa

Pembangunan baru, peningkatan atau rehabilitasi pasar desa untuk pemasaran pertanian dapat berupa bangunan pasar desa, gudang, lantai jemur, dan jenis infrastruktur lain yang mendukung pemasaran produk pertanian, dilakukan dengan kriteria-kriteria yaitu diperuntukan bagi desa dengan dominasi mata pencaharian penduduk sebagai petani yang belum memiliki infrastruktur untuk pemasaran pertanian atau dalam kondisi tidak bisa berfungsi secara optimal.

5. Kriteria Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi

a. Pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi pembangunan air minum berupa sumur gali, sumur pompa tangan, penangkapan mata air, penampungan air hujan, pengelolaan air permukaan, instalasi pengolahan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

air sederhana, Hidran Umum/ HU, dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) Diperluan bagi masyarakat miskin yang rawan air minum, yaitu desa yang air tanah dangkalnya tidak baik minum karena payau/ asin atau langka dan selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau.
2) Memliliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah jiwa calon pengguna)
3) Sesuai dengan kebutuhan dan kondisi/ karateristik setempat.

b. Sanitasi Pedesaan

Pembangunan baru, peningkatan dan rehabilitasi sanitasi pedesaan berupa sarana MCK dan drainase dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

1) Diperuntukan pada masyarakat miskin dengan kondisi sanitasi lingkungan buruk
2) Lokasi/ kawasan yang rawan air bersih
3) Memiliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah jiwa calon pengguna).
4) Dampak lingkungan yang ditimbulkan adalah yang paling minimum
5) Higienis dan mudah dalam pemeliharaannya, dalam arti masyarakat dapat melakukannya secara mandiri.

6. Kriteria Sarana Pendidikan

Peningkatan dan rehabilitasi sarana Sekolah Dasar dan sekolah Menengah Pertama dengan prioritas untuk sekolah dasar dilakukan dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Dapat berupa rehabilitasi dan atau pembangunan baru atau penambahan kelas, pengadaan meja dan kursi, kamar manndi dan WC, air bersih dan bangunan penunjang lainnya.

b. Tidak boleh untuk membangun sekolah baru, insentif pengajar, pembelian alat tulis dan buku.

c. Diprioritaskan pada sekolah dengan kondisi buruk dan atau di kawasan penduduk miskin, atau tidak didapatkan sekolah negeri atau milik yayasan di wilayah tersebut.

d. Kontruksi memenuhi standar teknis sebagaimana di atur dalam Panduan Teknis PNPM PISEW atau standar perencanaan kontruksi yang ditentukan pleh instansi terkait (Kementrian Pekerjaan Umum)

e. Tidak diperbolehkan untuk membangun sekolah swasta milik pribadi perorangan kecuali dalam kondisi sesuai kriteria pada poin 3 (tiga).

7. Kriteria Infrastruktur untuk Sarana Kesehatan

Pembangunan atau rehabilitasi untuk Polindes/ Poskesdes, Posyandu dan Rumah Singgah serta rehabilitasi untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu berupa sarana penunjang seperti ruang perawatan, ruang periksa, pengadaan meja dan kursi, kamar mandi, dan WC, air bersih atau bangunan penunjang lainnya sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Hanya untuk fasilitas non medis, tidak boleh untuk insentif paramedik, pengadaan obat-obatan dan alat-alat kedokteran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Diprioritaskan pada wilayah rawan penyakit atau tingkat prevalensi penyakit tinggi

c. Memiliki cakupan pelayanan yang luas (jumlah penduduk pengguna) dan kawasan penduduk miskin dan atau aturan perencanaan dan kebijakan instansi terkait (Kementrian Kesehatan).

Selanjutnya oleh karena LKD ini merupakan organisasi yang dasar pembentukannya bersifat mandiri, sukarela, terbuka, transparan dan kemitraan maka untuk penjelasan selanjutnya dibutuhkan beberapa konsep teori antara lain :

UNIVERSITAS TERBUKA

A. Kajian Teori

1. Good Governance

United Nations Development Programe (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai " *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*". Menurut definisi ini governance mempunyai tiga kaki *(three legs)*, yaitu *economic, political dan administrative. Ecomonics governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity, poverty dan quality of life. Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan, sedangkan *administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu institusi dari *governance*

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintahan), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha) dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000:5).

Konsep *good governance* sejak tahun 1991 dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral dan bilateral seperti JICA, OECD, GTZ (Keban; 2000: 52). Mereka memberikan tekanan pada beberapa indikator, antara lain: (1) demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan pemerintah; (2) hormat terhadap hak asasi manusia dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku; (3) partisipasi rakyat: (4) efisiensi, akuntabilitas transparansi dalam pemerintah dan administrasi publik; (5) pengurangan anggaran militer, dan (6) tata ekonomi yang berorientasi pasar. OECD dan World Bank (LAN; 2000:6) memsinonimkan *good governance* dengan penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka. Dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frameworks* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Sedangkan UNDP (Widodo, 2001:24) dalam workshop yang diselenggarakannya menyimpulkan *"that good governance system are participatory, implying that all members of governance institutions have a voice in influencing decision making* " Namun dalam perkembangan berikutnya lembaga ini memberikan definisi *good governance*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat *(society)*.

Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat *(society)*. Pada tataran ini, *good governance* berorientasi pada 2 (dua) hal pokok, yakni: *Pertama*, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Pada tataran ini, *good governance* mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya, seperti *legitimacy, accountability, securing of human right, autonomy and devolution of power dan assurance of civilion control*; *kedua*, pemerintahan yang berfungsi secara ideal yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Dalam konteks ini, *good governance* tergantung pada sejauh mana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pengertian *good governance* di atas, maka dapat diidentifikasi indikator-indikator yang terkandung didalamnya. UNDP (LAN; 2000:7) mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut:

1. *Participation*; Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun secara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

atas dasar keabsahan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*; kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
3. *Transparancy*; Transparansi dibangun atas dasar keabsahan arus informasi. Proses-proses, lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsive*; Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
5. *Consensus Orientation; Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam kebijakan – kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*, semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and effeciency*; Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Acuntability*; Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat *(civil society)* bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

9. *Strategic vision*; Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sementara itu, United Nations (Keban; 2000, 52) merumuskan indikator *good governance* yang meliputi: (1) kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik efektif dan responsif; (2) akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan; (3) partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta; (4) perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan (5) komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Memahami *governance* adalah bagaimana memahami integrasi peran agen pembangunan; pemerintah (birokrasi), pihak swasta dan *civil society*. Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum serta keamanan yang kondusif. Pihak swasta berperan positif dalam menumbuhkan kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, sedangkan *civil society* harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam aktivitas perekonomian, sosial, politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap jalannya aktivitas-aktivitas tersebut. Sehingga pemahaman *good governance* adalah terjadinya hubungan yang sinergis dan kontruktif di antara aktor-aktor birokrasi, pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang sinergis dan kontruktif

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

akan terjadi manakala ada pengerahan sumber daya yang optimal dan potensial yang dimiliki oleh masing-masing aktor (agen) pembangunan tersebut atas dasar kesadaran dan kesepakatan bersama terhadap visi yang ingin dicapai dalam pelayanan publik (Suharyanto, 2005: 86-87) .

Dalam menciptakan *good governance* di suatu negara hendaknya mampu mendekatkan antara unsur pemerintah, unsur swasta maupun masyarakat. Pemerintah hendaknya menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada swasta dan masyarakat, sehingga keduanya dapat mengambil porsi yang tepat dalam pembangunan melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hubungan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan swasta menjadi bagian penting dalam *good governance* tersebut. Menurut Sulistiyani (2004:76) pemerintah diposisikan sebagai fasilitator atau katalisator, sedangkan tugas untuk pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen Negara termasuk dunia usaha dan masyarakat. Bentuk ideal relasi yang ingin diwujudkan adalah " kemitraan" antara pemerintah, masyarakat, swasta, organisasi massa, organisasi politik, organisasi profesi dan LSM. Dengan demikian konsep *good governance* merujuk pada tiga pilar utama, yaitu *public governance, corporate governance dan civil society.*

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah merujuk kepada sebuah proses pembuatan kebijkan dan proses dimana kebijakan tersebut dilaksanakan yang melibatkan baik Negara (pemerintah), sektor swasta maupun masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

kebijakan tersebut (Eko Prasojo, *et.al*). Disini dapat terlihat adanya interaksi antar sektor tersebut dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan sebagaimana dapat digambarkan sebagai berikut :

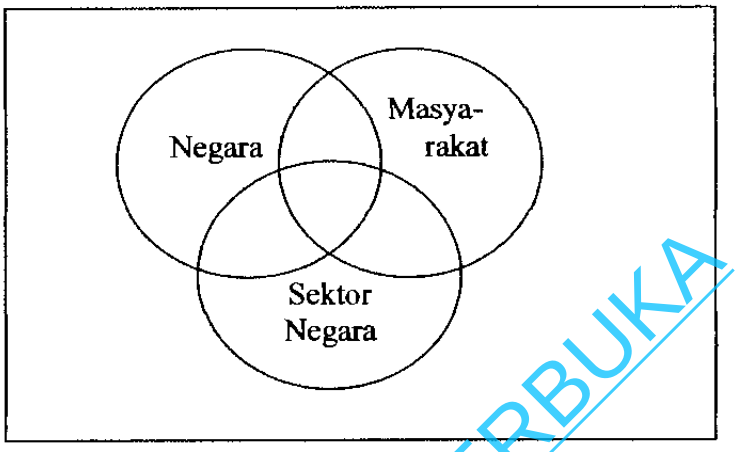

Sumber : Buku Pemerintahan Daerah, 2007

Gambar 2.1 Keseimbangan Tiga Unsur

2. Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari konteks pembangunan masyarakat. Menurut Korten (Sulistiyani; 2004: 37) terdapat dua pendekatan dalam pembangunan, yakni *Top-down* dan *Button Up*. Pendekatan *top-down* merupakan bentuk blue print strategi (cetak biru) merupakan pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai obyek pembangunan semata. Sedangkan *bottom up* merupakan strategi pembangunan yang memposisikan rakyat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

sampai *people centered development*. Lebih lanjut Korten (Huri; 2008:84) menegaskan bahwa kegagalan model pembangunan di negara-negara berkembang seperti model pembangunan *community development* dan model partisipasi kebanyakan disebabkan karena model tersebut tidak memberikan kesempatan kepada rakyat miskin ikut dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pemilihan, perencanaan, pelaksanaan terhadap program pembangunan. Dengan kata lain masyarakat miskin pada khususnya hanya dianggap sebagai objek dari pembangunan itu sendiri.

Menurut Sulistiyani (2004:38-40), kelemahan yang paling menonjol adalah mematikan inisiatif dan kreativitas masyarakat. Bentuk penyeragaman kegiatan melalui pendekataan pembangunan ini juga menimbulkan banyak masalah. Cara pandang yang kaku telah mengabaikan kekhususan wilayah dan masyarakat. Dengan demikian pendekatan ini tidak memperhatikan aspek sosial budaya, perbedaan potensi wilayah, kemampuan sumber daya manusia, sehingga program pembangunan sampai dengan bentuk kegiatan dibuat seragam (sama) untuk semua wilayah.

Konsep pemberdayaan sesungguhnya merupakan visualisasi dari pendekatan *bottom-up*. Sebelumnya konsep pemberdayaan dikalangan pemerintah akrab dikenal dengan pembangunan partisipatif. Akan tetapi karena idealnya pekerjaan yang harus dilakukan oleh masyarakat, justru menimbulkan masalah juga. Masyarakat belum seluruhnya memiliki perilaku peduli dan inisiatif serta kemampuan yang memadai. Sebagian besar masyarakat Indonesia

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masih berkiblat pada perintah, sehingga tinggal menjadi pelaksana saja, bukan menjadi konseptor. Kondisi tersebut tampaknya begitu mengakar, akibatnya internalisasi nilai-nilai pembangunan yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sepertinya nilai tersebut telah mengkristal dan tertanam di hati masyarakat, bahwa program dari pemerintah adalah merupakan suatu *given* saja, oleh karena itu masyarakat diterima sebagai suatu pemberian yang harus diterima apa adanya *(taken for granted)*. Program-program pembangunan dikemas sedemikian rupa sebagai barang jadi dan masyarakat tinggal menerima apa adanya saja.

Pendekatan pembangunan yang dipandang lebih relevan dalam melakukan pembangunan di Indonesia adalah pendekatan campuran atau model campuran *(mix model)* antara pendekatan dari atas dan pendekatan dari bawah. Bentuk outentik dari pendekatan ini adalah bahwa konsep umum program pembangunan telah dibuat oleh *decision maker*. Dengan demikian hasil kebijakan pembangunan adalah berupa *policy* yang masih bersifat umum. Sedangkan pihak pemerintah daerah dapat menginterpretasikan *policy* tersebut untuk kepentingan lokal, yang mungkin sifatnya spesifik dan kasuistik. Interpretasi tersebut tertuang ke dalam *policy guidelines* yang merupakan hasil kerjasama dengan masyarakat, perguruan tinggi, NGO, organisasi massa atau kelompok pengembang swadaya masyarakat yang lain.

Konsep pemberdayaan masyarakat menurut Pranaka dan Priyono (1996) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) fase, yaitu *fase inisial, fase partisipatoris*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

dan fase emansipatoris. Pada *fase inisial*, semua proses pemberdayaan berasal dari pemerintah, oleh pemerintah dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini rakyat bersifat pasif, melaksanakan apa yang direncanakan pemerintah dan tetap tergantung kepada pemerintah. Pada *fase partisipatoris*, proses pemberdayaan berasal dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama masyarakat, dan diperuntukan bagi rakyat. Pada fase ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian. Kemudian ketika *fase emansipatoris*, proses pemberdayaan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan dukungan oleh pemerintah. Pada fase ini masyarakat sudah menemukan kekuatan dirinya, sehingga dapat melakukan pembaharuan dalam mengaktualisasikan diri.

Pemberdayaan masyarakat seharusnya mempunyai nilai kesetaraan, bahwa masyarakat juga harus diberi kesempatan dalam proses pengambilan keputusan mulai dari tahap identifikasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, sehingga masyarakat dapat memelihara keberlanjutan kegiatan dan dapat mempertanggungjawabkan secara terbuka apa yang telah diputuskan bersama. Pembangunan yang berorientasi pada masyarakat semestinya memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk dapat ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Syarat dari keikutsertaan seluruh anggota masyarakat, selain peluang dan akses yang sama. Konsekuensinya masyarakat harus berdaya untuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

berperan serta dalam pembangunan. Maka adalah sebuah keharusan memulai konsep pembangunan tersebut dengan apa yang dinamakan dengan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang berdaya perlu sekiranya dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat yang lebih komprehensif serta berorientasi jauh kedepan dan berkelanjutan *(sustainable)*. Pemberdayaan yang harus dilakukan adalah bagaimana pemerintah dan stakeholders lainnya mampu bersinergi dalam merencanakan program, melaksanakan dan mengawasi.

Menciptakan masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta maupun masyarakat melalui mekanisme kemitraan yang serasi dan seimbang. Ide dasar kemitraan tersebut dimunculkan sebagai kritik pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down*, yang kemudian memposisikan pemerintah sebagai aktor dominan, dan membiarkan sikap keacu tak acuhan pihak swasta terhadap proses pemberdayaan kaum lemah (Sulastiyani, 2004:193).

Dari berbagai macam konsep tentang pemberdayaan masyarakat tersebut, maka yang dapat digunakan untuk membantu dalam membahas masalah pemberdayaan adalah bagaimana pemberdayaan masyarakat dilihat sebagai pemberian daya kepada masyarakat, karena pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat merupakan penciptaan suasana atau kondisi yang memudahkan kemungkinan potensi masyarakat untuk dapat berkembang. Hal

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

ini didasari pada logika bahwa tidak ada manusia atau masyarakat yang tidak memiliki daya. Hanya saja manusia tersebut dapat saja belum memahami akan kemampuan atau daya yang dimilikinya, atau apabila masyarakat menyadari daya yang dimiliki maka mungkin saja daya tersebut dirasakan belum mampu untuk dikembangkan secara mandiri. Bila asumsi ini yang berkembang maka, menurut (Sulistiyani : 2004), pemberdayaan dapat dikatakan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga mengantarkan pada proses kemandirian.

3. Kemitraan

Menurut Sulistiyani (2004:129-130), kemitraan dilihat dari perspektif etimologis kemitraan diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari asal kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan "pasangan jodoh, sekutu atau kompanyon" sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dari pengertian tersebut, maka faktor terbentuknya kemitraan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: (1) ada dua pihak atau lebih; (2) memiliki

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

kesamaan visi dalam mencapai tujuan; (3) ada kesepakatan; (4) saling membutuhkan.

Misi utama dari kemitraan adalah membantu memecahkan permasalahan ketimpangan dalam kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan antar wilayah yang dibangun atas landasan saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan fungsi dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan dan proporsi masing-masing terlibat. Terjadi *pooling of resources* atau penggabungan sumberdaya, sumber dana, sumber informasi untuk mendapatkan kombinasi terbaik agar memberi nilai tambah (sinergi) dalam kemitraan.

Kemitraan dapat diartikan sebagai bentuk atau usaha bersama sektor publik dan private untuk mencapai tujuan bersama. Dimana sektor publik menunjuk pada instansi non pemerintah atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Kemitraan dapat diartikan sebagai aktivitas bersama diantara kelompok yang berkepentingan berdasarkan pada pengenalan kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan mencapai tujuan yang disepakati bersama yang dikembangkan melalui komunikasi yang efektif dan tepat waktu.

Berkowitz (2000:67-72), menyatakan bahwa kolaborasi adalah metode yang digunakan oleh organisasi atau individu yang bergabung bersama untuk meningkatkan kemampuan dari terbatasnya sumber daya organisasi melalui: (1) memperbaiki atau mengembangkan keuntungan dari suatu kegiatan melalui usaha bersama; (2) proses membangun hubungan dari suatu kegiatan melalui

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

usaha kekuasan dalam mengambil keputusan; dan (3) saling tukar informasi, membagi sumber daya dan mengembangkan kapasitas untuk keuntungan bersama dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.

Padget & Berkowitz, (2004:251-257) menyatakan kolaborasi adalah individu dan kelompok yang bekerjasama untuk keuntungan bersama dengan mengutamakan hubungan horizontal dari hirarki. Koalisi menunjuk lebih khusus kepada kelompok yang bekerja sama dari pada individu. Selanjutnya, kemitraan menjangkau lintas sektoral meliputi batasan yang luas dari pemerintah. Kemitraan kolaborasi merefleksikan praktek kerjasama di antara pemerintah dan mitra kerja yang berkerjasama.

Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan merupakan suatu upaya kolaboratif yang terus menerus guna mencapai tujuan bersama. Kemitraan merupakan kerjasama di antara dua atau lebih pihak (komponen) yang saling terkait dan bekerjasama sebagai mitra dan sebagai perwujudan usaha bersama dan dengan adanya komitmen bersama. Kemitraan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terdapat dua atau lebih pihak (komponen) yang terlibat yakni pemerintah, swasta dan masyarakat.
2. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada yang sifatnya membawahi pihak lain.
3. Adanya tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai.
4. Setiap pihak memiliki tanggung jawab sendiri.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

5. Setiap pihak memberikan input berupa finansial, teknologi, pengetahuan atau sumber lainnya dalam sebuah proses pembelajaran.

Pola kemitraan tersebut memerlukan upaya yang efektif untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan/ ditentukan sebelumnya. Konsep dan pengertian kemitraan yang dimaksudkan adalah keterkaitan pihak pemerintah, masyarakat, swasta atau kelompok peduli lainnya untuk ikut melakukan pelayanan urusan publik, ikut melayani tugas-tugas pelayanan yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah.

Menurut Dwiyanto, (1996:17) dalam pola kemitraan pemerintah, masyarakat dan swasta bisa melakukan pembagian kerja yang wajar dan saling melengkapi sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing. Pemerintah biasa memusatkan perannya sebagai regulator, fasilitator dan promotor penyelenggaraan pelayanan publik. Swasta karena kemampuannya dalam memberi respon terhadap kebutuhan masyarakat secara cepat dan efisien biasa lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan operasional terutama dalam produksi dan distribusi pelayanan publik. Untuk pelayanan publik tertentu yang bersifat lokal, unik dan spesifik maka masyarakat akan bisa berperan secara efektif dibandingkan dengan pemerintah dan perusahaan bisnis.

Lebih lanjut Dwiyanto mengatakan, bahwa birokrasi pemerintah akan kehilangan peranan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kendatipun dalam proses produksi dan distribusi pelayanan publik perannya semakin berkurang, namun secara kualitatif peranan pemerintah justru semakin penting.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Pemerintah tetap memegang kekuasaan penting terutama dalam penentuan kebijakan dan prioritas pelayanan. Standar pelayanan dan pemantauan performasi sektor swasta. Hanya untuk pelayanan tertentu yang memegang sangat vital kedudukannya bagi kepentingan negara dan masyarakat banyak, birokrasi pemerintah perlu terlibat dalam penyelenggaraannya. Namun demikian, keterlibatan birokrasi pemerintah dalam penyelenggaraan suatu pelayanan publik, tidak berarti bahwa mereka perlu diberi monopoli. Kemungkinan untuk melibatkan swasta untuk berkompetisi dengan birokrasi pemerintah sebaiknya selalu terbuka. Sektor swasta dalam hal ini tidak saja perusahaan swasta atau dunia usaha tetapi juga kelompok – kelompok masyarakat lainnya non pemerintah atau non birokrasi seperti LSM, NGO, LKD, Perguruan Tinggi dan lembaga-lembaga swasta lainnya yang mempunyai kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan.

Kemitraan bukanlah sekedar sekumpulan aturan main yang tertulis dan formal atau suatu kontrak kerja melainkan lebih menunjukkan perilaku hubungan yang bersifat intim antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak membantu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Wilson dan Wilson (1994:95) kemitraan sekurang-kurangnya memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut:

1. Lebih bersifat jangka panjang bukan sekedar hubungan sesaat oleh sebab tujuan-tujuan yang ingin dicapai biasanya lebih mendasar, disamping itu hubungan sesaat tidak dapat membangun relasi yang mendalam.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

2. Lebih difokuskan pada pemecahan persoalan bersama untuk mencapai tujuan bersama bukan sekedar menjual suatu produk (barang atau Jasa).
3. Didasarkan atas nilai-nilai luhur seperti lazimnya suatu kerjasama seperti kejujuran, keterbukaan, saling percaya, saling memperhatikan, kesetaraan dan sebagainya.
4. Saling bergantung dimana tiap pihak sesuai peran dan fungsi masing-masing saling membutuhkan dan dibutuhkan agar tercapai tujuan bersama.

Selain sifat dasar tersebut kemitraan merupakan jalinan kerjasama antara kedua pihak atau lebih dalam suatu kegiatan di mana pihak-pihak yang bermitra mempunyai kedudukan yang sejajar *(equal standing)*. Selain itu juga proses kemitraan akan terjadi dan benar-benar dapat disebut kemitraan apabila kedua pihak saling membutuhkan, saling melengkapi/ mengisi, saling menguntungkan, saling menghormati, saling memberi kepercayaan dan saling memperkuat.

Kemitraan saat ini diperlukan dan menjadi suatu kebutuhan terutama dalam program pemberdayaan masyarakat. Ada tiga alasan menurut Linton (dalam Parwoto, 2006) dianggap penting: (1) persoalan yang dihadapi oleh semua pihak (stakeholder), para pelaku pembangunan (sektor swasta dan masyarakat) dan penyelenggara pembangunan (pemerintah) sudah sangat kompleks dan kronis sehingga tidak ada satu pihakpun yang mengklaim memahami persoalan yang dihadapi oleh pihak lain. Akibatnya tindakan sepihak/ diselesaikan secara sepihak saja tidak lagi memadai, termasuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

misalnya meningkatkan pelayanan saja. Diperlukan kerjasama atau bentuk hubungan baru antar pihak (penyelenggara dan pelaku pembangunan) yang lebih intim untuk bersama-sama memecahkan persoalan bersama yang sudah kronis tersebut untuk mencapai tujaun bersama pula; (2) pergeseran posisi utama dari pemerintah dan swasta (sebagai pemasok) ke masyarakat. Ini berarti masyarakatlah yang kini menentukan apa yang perlu dan bagaimana dipasok. Seringkali tuntutan masyarakat tidak mampu lagi dipenuhi oleh pasokan konvensional; (3) Keterbatasan sumberdaya di semua pihak baik pihak pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan maupun di pihak pelaku pembangunan lainnya; swasta maupun masyarakat, sehingga perlu dilakukan sinergi untuk mencapai tujuan bersama. Keterbatasan sumberdaya dapat dilihat dari dua sisi; pertama, dari sisi kelangkaan dapat diartikan (i) keterbatasan ketersediaan sumberdaya yang dibutuhkan oleh semua pihak, artinya sumberdaya yang tersedia terbatas yang membutuhkan banyak, sehingga setiap penggunaan oleh satu pihak akan berpengaruh pada pihak lain. Jadi perlu ada kerjasama baru yang lebih konseptual dan mendasar atau (ii) keterbatasan dalam arti tiap pihak menguasai sumberdaya yang sama secara terbatas sehingga untuk memproduksi sesuatu perlu kerjasama yang lebih konseptual sehingga tercapai sinergi. Kedua, dari sisi penyebaran diartikan bahwa tiap pihak hanya menguasai satu atau dua jenis sumberdaya saja (dana saja, tanah saja atau tenaga kerja saja) sehingga untuk menghasilkan sesuatu perlu keterlibatan semua pihak yang menguasai sumberdaya yang berbeda. Dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

demikian maka yang dibutuhkan bentuk kerjasama baru yaitu kemitraan bersifat jangka panjang, berorientasi pada pemecahan persoalan bersama, didasarkan nilai-nilai luhur dan tercapainya saling ketergantungan.

Lebih lanjut Parwoto mengatakan, agar kemitraan seperti tersebut di atas dapat berjalan maka penerapan kemitraan harus mengikuti prinsip-prinsip dasar sebagai berikut: (1) Partisipasi/ *Participation* (P), semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyatakan pendapat, memutuskan hal-hal yang berlangsung menyangkut nasibnya dan bertanggungjawab atas semua keputusan yang telah disepakati bersama. Dalam melaksanakan partisipasi maka semua pihak harus memperhatikan ketepatan waktu atau momentum artinya partisipasi harus tepat waktu/ *puckual* (P), sehingga terjadi singkronisasi, (2) akseptasi/ *acceptable* (A), kehadiran tiap pihak diterima oleh pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Ini juga berarti bahwa tiap pihak lain apa adanya dan dalam kesetaraan. Ini juga berarti bahwa tiap pihak memiliki fungsi masing-masing dan di dalam fungsi masing-masing tersebutlah terjadi kesetaraan. Agar tiap pihak dapat diterima oleh pihak lain maka kepada tiap pihak dituntut untuk bersikap bertanggung jawab atau dapat diandalkan atau bersifat tanggung gugat/ *collaboration* (C); (3) komunikasi/ *communication* (C), masing-masing pihak harus mau dan mampu mngkomunikasikan dirinya beserta rencana kerjanya sehingga dapat dilakukan koordinasi dan sinergi. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk mau meleburkan dirinya menjadi satu kesatuan/ *collaboration* (C); (4) percaya/ *trust* (T),

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

masing-masing pihak harus dapat mempercayai dan dipercaya atau saling percaya karena tidak mungkin suatu hubungan kerjasama yang intim dibangun di atas kecurigaan atau saling tidak percaya. Untuk itu tiap pihak dituntut untuk berani bersikap terbuka/ *transparant* (T); (5) berbagi/ *share* (S), masing-masing harus mampu membagikan dirinya dan miliknya *(time treasture and talents)* untuk mencapai tujuan bersama dan bukan satu pihak saja yang harus berkorban atau memberikan segalanya sehingga tidak lagi proporsional. Dalam prinsip berbagi ini juga mengandung arti penyerahan/ *submit (put under control of another-* S) artinya tiap pihak disamping siap memberi juga siap menerima pendapat orang lain termasuk dikritik.

Menurut Kooiman (dalam Lele, 2006:167) kemitraan merupakan jawaban alternatif untuk menerobos berbagai kebuntuan dengan kesadaran bahwa, *pertama,* kebijakan publik seyogyanya melibatkan semua stakeholders, baik pemerintah, kalangan swasta, maupun masyarakat sipil; *kedua*, masing-masing aktor tersebut memiliki karakteristik tersendiri yang ditandai oleh berbagai keterbatasan di satu sisi serta keunggulan di sisi lain sehingga interaksi yang komplementer merupakan prasyarat bagi keberhasilan integrasi energy; dan *ketiga*, kemitraan merupakan pilar penting bagi pembentukan *good governance*, atau sebagaimana dinyatakan beberapa analis, kemitraan merupakan salah satu ciri khas penting dari model *new governance.*

Salah satu prasyarat kunci bagi bekerjanya kemitraan adalah kesetaraan dalam pengambilan keputusan, pemilikan sumberdaya, akses

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

informasi dan sebagainya. Dominasi salah satu pihak hanya akan berakibat pada penarikan diri pihak lain. Selain persyaratan tersebut, pengalaman di beberapa Negara yang sudah dan sedang mengembangkan program-program kemitraan memberikan pelajaran penting bahwa kemitraan hanya akan efektif dan berkelanjutan jika terdapat visi bersama, kejelasan visi, *sense of purpose*, adanya kepemimpinan yang efektif yang dapat menjamin tercapainya keuntungan kolaboratif, akuntabilitas mutal dan multi arah, interdependensi dan komplementaritas, adanya proses pembelajaran bersama, serta kesetaraan kekuasaan. Demikian halnya saling percaya, saling menghargai, kredibilitas dan kompetensi semua partisipan dan komunikasi yang partisipatoris dan sejajar (Lele, 2006:168).

Menurut Mohr dan Spekman (1994: 132-135) ada 3 faktor yang berhubungan dengan keberhasilan kemitran, yaitu :

1. Kepercayaan, masyarakat sebagai kelompok sasaran diberi kepercayaan memilih dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan potensi wilayah, masalah yang dihadapi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, produktif dan bekelanjutan. Suatu kemitraan tidak akan berhasil kecuali bila ada kepercayaan timbal balik antara pihak yag bermitra dan kepercayaan ini akan tercapai bila masing-masing mitra bertindak secara konsisten terhadap sasaran hasil yang dituju. Dengan adanya kepercayaan yang timbal balik dan saling terbuka antara pihak yang bermitra akan meningkatkan kemampuan beradaptasi dan saling tukar menukar informasi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

untuk memecahkan permasalahan secara bersama-sama untuk mencapai hasil yang lebih baik.

2. Komitmen jangka panjang, komitmen jangka panjang antar mitra dapat ditunjukkan dengan adanya kesediaan mitra untuk dilibatkan dan secara terus menerus bersama-sama dalam memecahkan masalah yang tidak diantisipasi sebelumnya. Dengan adanya komitmen dalam hubungan kemitraan diharapkan terjadi keseimbangan pencapaian sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang dari masing-masing mitra dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama tanpa ada rasa takut akan perilaku oportunitis.
3. Komunikasi yang efektif, dikarenakan oleh adanya perbedaaan budaya, tujuan, sasaran akhir yang dikehendaki oleh masing-masing pihak yang bermitra akan terjadi konflik dan mengakibatkan terjadinya pertentangan dalam hubungan antar mitra. Komunikasi yang efektif akan membantu meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan pihak yang bermitra. Termasuk didalamnya pembentukan saluran komunikasi yang efektif, yang dapat digunakan untuk memotivasi anggota mitra ikut berpartisipasi dalam perencanaan, menentukan sasaran akhir dan usaha korporasi untuk menciptakan harapan yang sesuai.

Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997:71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan kemitraan maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain (1) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Instansi pelaksana; (2) tersedia waktu dan sumber daya; (3) keterpaduan sumberdaya yang diperlukan; (4) implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; (5) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; (6) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; (7) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; (8) tugas-tugas terperinci dan diurutkan secara sistematis; (9) komunikasi dan koordinasi yang baik; (10) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Selanjutnya dengan jelas dikemukakan Dwiyanto (1996:19-20) bahwa keberhasilan upaya pengembangan kemitraan pemerintah dan swasta dalam pelayanan publik ditentukan oleh banyak faktor, yakni : (1) kemitraan yang menekankan pada *coproduction* dan *coprovision* hanya akan bisa berjalan efektif kalau diikuti oleh perubahan sikap dan orientasi pejabat birokrasi pemerintah (2) pemerintah perlu terus mengembangkan dan memberikan fasilitas untuk mengembangkan sektor swasta; (3) pemerintah perlu mengurangi keterlibatannya dalam kegiatan operasional pelayanan publik kalau sektor swasta-organisasi voluntir dan perusahaan bisnis sudah bisa melakukannya; (4) pengalihan peran pemerintah kepada swasta hendaknya dilakukan secara transparan dan terbuka; dan (5) pemberian kekuasaan yang besar kepada sektor swasta perlu diikuti oleh perbaikan efektifitas kontrol birokrasi dan politik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

4. Model Kemitraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat

Model adalah pola (contoh, acuan, ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan (Departemen P dan K, 1984:75). Definisi lain dari model adalah abstraksi dari sistem sebenarnya, dalam gambaran yang lebih sederhana serta mempunyai tingkat prosentase yang bersifat menyeluruh, atau model adalah abstraksi dari realitas dengan hanya memusatkan perhatian pada beberapa sifat dari kehidupan sebenarnya (Simamarta, 1983: ix – xii).

Jenis-jenis model dapat dibagi dalam lima kelas yang berbeda :

1. Kelas I, pembagian menurut fungsi :
   a. Model deskriptif : hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan.
      Contoh : peta organisasi
   b. Model prediktif : model ini menunjukkan apa yang akan terjadi, bila sesuatu terjadi.
   c. Model normatif : model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap satu persoalan. Model ini memberi rekomendasi tindakan tindakan yang perlu diambil.
      Contoh : model budget advertensi, model economics, model marketing.
2. Kelas II, pembagian menurut struktur.
   a. Model Ikonik : adalah model yang menirukan sistem aslinya, tetapi dalam suatu skala tertentu.
      Contoh : model pesawat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Model Analog : adalah suatu model yang menirukan sistem aslinya dengan hanya mengambil beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog.

Contoh : aliran lalu lintas di jalan dianalogkan dengan aliran air dalam sistem pipa.

c. Model Simbolis : adalah suatu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol biasanya dengan simbol-simbol matematik. Dalam hal ini sistem diwakili oleh variabel-variabel dari karakteristik sistem yang ditinjau.

3. Kelas III, pembagian menurut referansi waktu.

a. Statis : model statis tidak memasukkan faktor waktu dalam perumusannya.

b. Dinamis : mempunyai unsur waktu dalam perumusannya.

4. Kelas IV, pembagian menurut referansi kepastian.

a. Deterministik : dalam model ini pada setiap kumpulan nilai input, hanya ada satu output yang unik, yang merupakan solusi dari model dalam keadaan pasti.

b. Probabilistik : model probabilistik menyangkut distribusi probabilistik dari input atau proses dan menghasilkan suatu deretan harga bagi paling tidak satu variabel output yang disertai dengan kemungkinan-kemungkinan dari harga-harga tersebut.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Game : teori permainan yang mengembangkan solusi-solusi optimum dalam menghadapi situasi yang tidak pasti.

5. Kelas V, pembagian menurut tingkat generalitas.

a. Umum

b. Khusus

Kelima kelas model di atas dapat digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, bentuk dari sesuatu hal yang diproduksi. Selanjutnya model yang akan dikembangkan dalam penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini termasuk deskriptif yaitu model yang menggambarkan model kemitraan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan pelayanan publik, aparat pemerintah perlu mengetahui berbagai bentuk/ pola kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat. Menurut Mustopadidjaja (dalam Suharyanto 2005:98-102) bentuk kemitraan dapat diidentifikasikan dalam beberapa tingkat dan satuan yaitu :

1. Kemitraan Makro. Kemitraan ini merupakan kontribusi yang bersifat antar sektor pelayanan publik. Kemitraan makro ini dapat dilihat dalam lingkup internasional dan nasional. Dalam lingkup internasional, kemitraan diperlukan untuk menghadapi era globalisasi yang mengarah kesistem ekonomi yang membuka peluang bagi pemerintah Negara manapun untuk membuka kegiatan usaha di Negara lainnya. Peluang "go internasional"

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sudah seharusnya direspon pemerintah Indonesia dengan membuka pintu usaha nasional serta bersiap diri menghadapi tantangan persaingan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada di tanah air. Kunci peningkatan daya saing adalah efesiensi dan kualitas barang dan jasa yang dipasarkan. Hal ini mendorong pada keunggulan kompetitif, disamping meningkatkan keunggulan komparatif.

2. Kemitraan Sektoral. Kemitraan sektoral ini merupakan hubungan kerjasama para agen pembangunan dalam pelayanan publik di masing-masing sektor. Pemerintah mempunyai peran untuk menyediakan dan pihak swasta diberi kesempatan untuk terlibat dalam pelayanan publik, terutama di wilayah yang mempunyai intensitas kebutuhan dan tingkat pertumbuhan pelayanan publik tinggi serta mempunyai kelayakan ekonomi (menguntungkan) bagi pihak swasta. Untuk meningkatkan kemitraan sektoral, peranan yang perlu ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatkan pelayanan informasi, termasuk prioritas alokasi dana pemerintah dalam pelayanan publik;
   b. Memberi perhatian khusus bagi pengembangan sumber daya yang dikelola oleh masyarakat dalam skala menengah, dan kecil guna menopang atau memperkuat struktur ekonomi masyarakat.
   c. Mendorong kemitraan pembiayaan dalam menanggung beban biaya pembangunan sarana dan prasarana pelayanan publik, terutama di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Melakukan identifikasi kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang penting namun tidak dijangkau atau tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta. Hasil identifikasi ditindaklanjuti dengan memberikan pelayanan publik seperti kegiatan lainnya.

3. Kemitraan regional. Kemitraan ini ditujukan untuk menghadapi kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan beserta pelayanan publiknya, dengan mendorong investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah yang belum berkembang. Perhatian khusus diberikan kepada wilayah yang secara geografis terpencil, minus, kritis, kantong kemiskinan, dan terbelakang. Tindakan ini sekilas tidak rasional bagi pihak swasta, namun tetap realistis untuk dilaksanakan dengan kemitraan. Lingkup yang dijangkau adalah pemerintah pada tingkat atasnya, dalam kerangka menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya setempat dan dikelola secara efisien, nyaman dan aman dalam arti luas. Misalnya, untuk memenuhi pelayanan publik di suatu desa tertinggal maka kemitraan diterapkan dalam lingkup kecamatan atau kabupaten. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian atau bahkan pariwisata yang pada ujungnya bisa memenuhi motivasi pihak swasta dalam mendapatkan keuntungan secara ekonomis.

Untuk mewujudkan kondisi di atas, masyarakat dan pihak swasta memerlukan peranan pemerintah dalam hal :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Desentralisasi dalam perizinan pelayan publik yang dikelola oleh pihak swasta dan efisien pelayanan birokrasi bagi perizinan kegiatan-kegiatan pelayanan publik.
b. Insentif fiskal dan moneter yang lebih nyata dalam pelayanan publik di daerah tertinggal
c. Ketersediaan dan kemudahan mendapatkan informasi mengenai potensi yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan publik di daerah.

Selain berdasarkan kontribusi yang diberikan dalam bentuk kemitraan pada tingkat operasional dapat diidentifikasikan bentuk kemitraan, yaitu bentuk kemitraan, pembiayaan, yang dikembangkan sebagai solusi masalah kelangkaan dana atau keterbatasan modal; dan bentuk kemitraan teknis; yang difungsikan sebagai solusi atas kekurangan tenaga profesional dan kelemahan iptek, baik dalam organisasi pemerintah maupun organisasi swasta.

Semenjak pemerintahan orde baru upaya meningkatkan kemampuan masyarakat juga dilakukan, namun tidak sepenuhnya memiliki kontribusi dalam pembangunan. Dalam pembangunan pada masa orde baru pembangunan dilaksanakan melalui proses pendekatan terpusat. Pendekatan ini dinyatakan dalam bentuk pembangunan dari pemerintah oleh pemerintah untuk rakyat.

Pemaknaan pendekatan dari pemerintah, oleh pemerintah untuk masyarakat adalah:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Datangnya ide, rencana pembangunan dan sekaligus proses perencanaan dan penetapan keputusan datangnya ide dari pemerintah tanpa melibatkan masyarakat.
2. Implementasi kebijakan pembangunan juga dilakukan oleh pemerintah, tanpa melibatkan aktor-aktor masyarakat seperti tokoh masyarakat kaum profesional, para ahli di bidang tertentu, ormas-ormas sebagai figur masyarakat. Dengan demikian masyarakat hanya merupakan pihak yang diperlakukan sebagai sasaran/ objek pembangunan yang tidak punya andil kecuali menerima begitu saja apa yang diinginkan pemerintah.

Ternyata pendekatan pembangunan terpusat yang memposisikan dominasi pemerintah tersebut tidak mampu menghasilkan kemakmuran secara nyata. Walaupun perekonomian secara agregat mengalami kebangkitan dan pertumbuhan, akan tetapi hanyalah merupakan kemakmuran semu. Di balik pertumbuhan ekonomi yang divisualisasikan melalui GNP dan GDP ternyata tersimpan kerapuhan masyarakat dan tercipta ketergantungan yang beruntun.

Akhirnya kelemahan pendekatan pembangunan demikian ini disadari kelemahannya, dan digantikan oleh pendekatan kedua yaitu pendekatan pembangunan dari pemerintah bersama rakyat, oleh pemerintah bersama rakyat untuk rakyat. Pemaknaan pendekatan ini adalah:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Datangnya ide dan perencanaan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Tetapi kenyataannya ide berupa input, permintaan mungkin bisa datang dari masyarakat, akan tetapi dalam proses formal terbentuknya kebijakan seringkali sudah dikendalikan oleh pusat.
2. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dilakukan bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi pengertian masyarakat di sini jangan dibayangkan bahwa masyarakat luas secara otomatis dapat mengakses, karena dalam hal ini tentu ada katup- katup yang mengatur secara formal. Memang masyarakat mulai ditempatkan pada posisi sebagai subjek pembangunan, akan tetapi dal hal ini masih bersifat selektif. Masyarakat yang terlibat langsung sebagai pelaku utama sangatlah terbatas jumlahnya.
3. Masyarakat pada hakikatnya masih merupakan tujuan dari pembangunan itu sendiri, sehingga masih sangat kental intervensi pemerintah terhadap masyarakat.

Sedikit banyaknya pendekatan ini sudah mencerminkan suatu watak kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Akan tetapi kemitraan yang terbentuk ternyata masih timpang belum ada unsur swastanya. Dengan demikian seolah tidak ada tanggung jawab sosial bagi kalangan pebisnis dan swasta dalam pengertian luas.

Pendekatan kedua juga belum seberapa efektif, pada kenyataannya dominasi pemerintah masih besar. Peran masyarakat dalam proses

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

perencanaan sebagaimana terekspresikan melalui perencanaan dari bahwa, terkesan banyak merupakan formalitas belaka.

Pendekatan pembangunan ketiga dilontarkan sebagai upaya merealisasikan bentuk kemitraan pemerintah dan masyarakat. Pendekatan pembangunan yang dimaksud adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah. Pemaknaan pendekatan ini adalah

1. Datangnya ide dan perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan aspek-aspek lokal yang bersifat kasuistik. Pemerintah memberikan fasilitas konsultasi, informasi data anggaran dan tenaga ahli yang dibutuhkan
2. Masyarakat mengimplementasikan sendiri apa yang telah direncanakan dengan fasilitasi pemerintah, baik berupa anggaran, tenaga ahli, teknologi dll
3. Kemanfaatan hasil pembangunan untuk masyarakat dan sekaligus menajemen hasil pembangunan juga dilakukan dalam sistem sosial masyarakat dimana mereka tinggal.

Peran pemerintah pada umumnya berada pada posisi fasilitasi (fasilitator) terhadap pelaksanaan pembangunan. Fasilitasi tersebut dapat berupa kebijakan politik, kebijakan umum, kebijakan sektoral/ departemental, maupun batasan-batasan normatif lain. Di samping itu fasilitasi dapat berupa tenaga ahli, pendanaan, penyediaan teknologi dan tenaga terampil dan lain-lain (Sulistiyani, 2004, 94-96)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Selanjutnya menurut Sulistiyani (2004:130-132) bentuk lain dari kemitraan adalah bertolak dari pemahaman akan dunia organisma, baik yang bersel satu yang tidak kasat mata, maupun hewan yang dapat terlihat, maka kemitraan dibedakan menjadi:

1. *Pseudo partnership,* atau kemitraan semu
2. *Mutalism partnership,* atau kemitraan mutualistik
3. *Conjugation partnership,* atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah pesekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama – sama penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

Kemitraan semu semacam ini tampak nyata terjadi pada pola pembangunan yang dilakukan pada jaman orde baru, yang sering disosialisasikan melalui slogan "pembangunan dari dan oleh pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna dari semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal. Berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua agen/ organisasi atau lebih yang memiliki status sama atau berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus menunjang satu dengan lain. Pemikiran kemitraan demikian ini diadopsi dari pola simbiosis mutualisme yang terjadi antara kerbau dan burung dalam kehidupan binatang.

Kemitraan konjungsi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan "*paramesium*" dan *paramecium* melakukan konjungsi (penggabungan) untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Bertolak dari analogi tersebut maka organisasi, agen-agen kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemanpuan masing-masing.

Bentuk kemitraan yang dikembangkan berdasarkan atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup:

1. *Subordinate union of partnership*
2. *Linear union of partnership*
3. *Linear collaborative of partnership*

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *subordinate union of partnership.* Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berbeda dalam satu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas - bawah, kuat – lemah. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linear atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *linear union of partnership.* Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjsama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi status atau legalitas.

Kemitraan dengan kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status legalitas atau kekuatan para

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-visi yang saling mengisi satu dengan lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Secara umum terdapat empat bentuk kemitraan lain, yaitu :

1. *Contributory Partnership* atau kemitraan melalui kontribusi. Yaitu suatu kesepakatan yang mana sebuah organisasi swasta atau publik menyetujui memberikan sponsor atau dukungan, umumnya berupa dana, untuk beberapa kegiatan yang akan mempunyai sedikit atau sama sekali efek terhadap proses partisipasi. Sementara kontribusi dana selalu merupakan hal yang esensial bagi suksesnya kegiatan
2. *Operational Partnership* atau kemitraan operasional. Merupakan jenis kemitraan dengan peserta atau mitra melakukan pembagian kerja, tidak hanya dalam pengambilan keputusan. Disini penekannya untuk mencapai kesepakatan atas tujuan yang diinginkan bersama, kemudian bekerjasama untuk mencapainya. Kerjasama ini dapat begitu tinggi, yang mana peserta saling berbagai sumber daya bukan uang dalam jumlah besar. Kekuasaan utama masih dipegang oleh peserta yang mempunyai sumber dana dan ini biasanya dipegang oleh lembaga-lembaga pemerintah.
3. *Consulrative partnership*. Yaitu bentuk kemitraan dimana instansi yang bertugas mengelola sumber daya atau lingkungan secara aktif mencari masukan dari perseorangan, kelompok serta organisasi lain di luar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pemerintah. Mekanismenya biasanya melalui pembentukan komite, yang dirancang terutama untuk memberikan saran pada instansi publik tentang isu atau kebijakan khusus. Kontrol jelas dipegang instansi publik yang mempunyai kebebasan untuk memilih saran yang diberikan. Walaupun demikian kemitraan karena instansi publik mengetahui harga politis yang harus dibayarkan dengan tidak dipakainya saran publik yang mereka kumpulkan.

4. *Collaborative Partnership.* Dalam kemitraan ini terjadi pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang sesungguhnya. Tujuannya untuk mencapai tujuan yang diterima oleh semua pihak, yang mana informasi, dana dan tenaga saling dipertukarkan. Ini merupakan satu-satunya bentuk kemitraan yang mana setiap peserta mempunyai otonomi. Lebih khusus lagi, dalam bentuk ini instansi pemerintah memberikan beberapa kekuasaannya kepada organisasi di luar pemerintah. Umumnya pelimpahan ini tidak disertai tanggungjawab, yang tetap secara formal dipegang oleh instansi pemerintah. Dalam bentuknya yang terbaik, keputusan dicapai melalui consensus.

Menurut Sulistiyani (2004:130), dari perspektif etimologis tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya. Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang sama atau *subordinate*, memiliki kesamaan misi atau misi berbeda tetapi saling mengisi / melengkapi secara fungsional.

5. Manajemen

Telah banyak dirumuskan oleh para pakar tentang pengertian manajemen. Rumusan manajemen menurut George Terry adalah pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan bantuan orang lain. Sejalan dengan rumusan itu Mary Parker Follet menyatakan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Demikian pula Drucker merumuskan pengertian manajemen sebagai kegiatan spesifik dalam menggerakkan sejumlah orang agar berlangsung efektif dalam mencapai tujuan dan organisasi menjadi produktif. Selanjutnya manajemen dapat juga diartikan sebagai kiat mengatur atau mengelola semua sumber daya yang dimiliki organiasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efesien (Irawan dkk, 2000).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Berdasarkan pengertian manajemen diatas, manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan dan menyelesaikan aktivitas demi tercapainya tujuan-tujuan (Ratminto dan Winarsih 2005; 4). Dengan demikian ada tiga hal yang penting yang berkaitan dengan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Aspek - aspek mendasar yang terkandung dalam perencanaan adalah penetapan tujuan dan aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan seperti apa yang harus dikerjakan, dimana dikerjakan, siapa dan bagaimana hal tersebut dikerjakan (Djaenuri, 1997). Menurut (Gaspersz, 2004), tujuan dikategorikan baik apabila tujuan tersebut memiki kriteria SMART *(Spesific, Measurable, Aggressive but Attainable, Result Oriented and Time Bound)*. Tujuan harus mereflesikan pencapaian spesifik yang diinginkan, terukur, dapat dicapai, tujuan menyatakan suatu hasil dan adanya batasan waktu dalam mencapai tujuan. Berkaitan dengan perencanaan, hal yang penting berupa tujuan yang hendak dicapai, persyaratan yang ditentukan, sistem dan prosedur yang ditetapkan serta personil yang terlibat.

Langkah berikutnya dalam fungsi manajemen adalah tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pada hakekatnya merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana, betapa baiknya perencanaan tidak akan bermakna jika dilaksanakan secara tidak benar. Pada tahap ini banyak kegiatan yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilakukan, tetapi beberapa kegiatan penting antara lain menyangkut aktivitas penyusunan dan pengalokasian sumber daya, mengarahkan orang-orang untuk bekerja, aktivitas menyatukan kegiatan organisasi agar terintegrasi secara harmonis, aktivitas pengelolaan anggaran dan aktivitas mengelola staf sebagai sumber daya organisasi (Djaenuri, 1997).

Kegiatan pengawasan merupakan langkah terakhir dari fungsi manajemen. Kegiatan pengawasan termasuk dalam salah satu kegiatan yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan, melalui kegiatan pengawasan, maka akan segera diketahui pelaksanaan rencana kegiatan berdasarkan atau tidak. Sebaliknya hasil pengawasan dapat dijadikan umpan balik untuk perencanaan berikutnya. Efektivitas pengawasan sangat ditentukan dengan keabsahan fakta yang terkumpul, ketepatan melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan (Manulang, 2005). Adapun cara mengumpulkan fakta lapangan melalui peninjauan pribadi, interviu, laporan tertulis dan pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat khusus.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Kerangka Berpikir

Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Pemerintah Daerah melakukan kemitraan agar program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan lebih terintegrasi dan terkoordinasi diperlukan perpaduan kerjasama antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam program tersebut

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

seperti LKD dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menganalisis bentuk kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini :

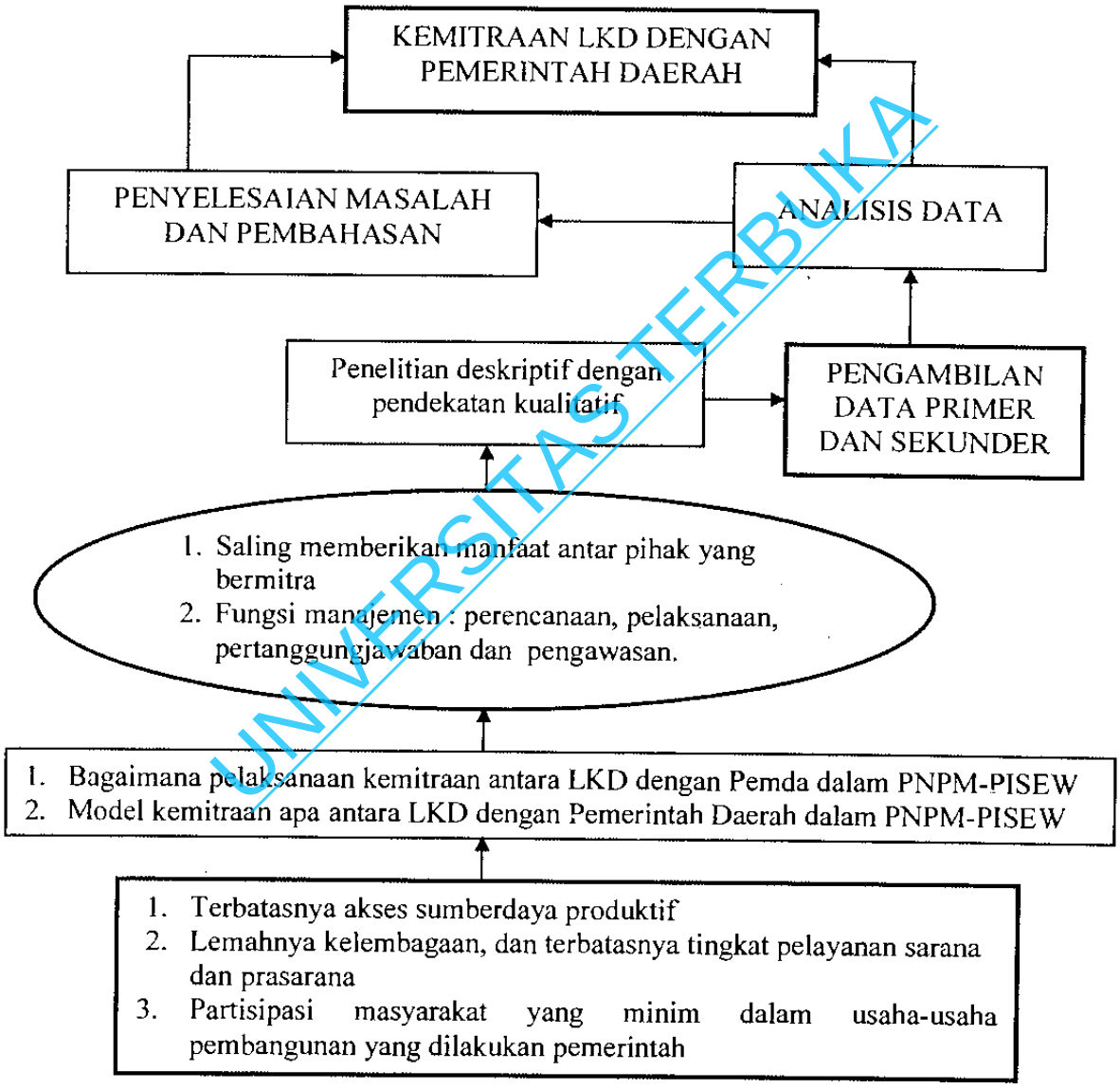

Gambar 2.2. Skema Kerangka Pikir Penelitian

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

C. Definisi Konsep dan Operasional

Penelitian ini menggunakan sejumlah istilah utama/ kunci yang berhubung dengan masalah penelitian. Semua istilah tersebut penulis berupaya mendefinisikannya guna menyamakan pengertian dan menghindarkan kesalahanpengertian antara maksud penulis dan pembaca.

Guna maksud menyamakan definisi mengenai istilah-istilah yang penulis pakai, berikut ini diberikan batasan istilahnya :

1. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) adalah lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa, seperti kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Karang Taruna, PKK, Remaja Masjid, Remaja Gereja dan sebagainya. Setiap LKD harus mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, Tenaga Teknis dan Anggota. Pengurus organisasi tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari lima (5) orang, dengan minimal satu anggotanya adalah perempuan atau perwakilan dari unsur minoritas di desa.
2. Program PNPM PISEW adalah salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan di daerah pedesaaan, memperbaiki pengelolaan pemerintah dan penguatan institusi di pedesaan. Intervensi dilakukan melalui penyediaan bantuan teknis dan bantuan stimulus infrastruktur sosial dan ekonomi dasar yang diharapkan dapat mendukung upaya pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat melalui

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mekanisme yang partisipatif dan sinkron dengan sistem perencanaan pembangunan yang ada.

3. Secara konseptual pelaksanaan kemitraan adalah hubungan dan interaksi antara dua pihak atau lebih yang ditempuh melalui kerjasama yang serasi, selaras dan seimbang yang akan membentuk satu kesatuan hubungan dalam satu wadah kemitraan yang serasi, selaras, seimbang di mana masing-masing pihak saling bekerjasama saling berhubungan untuk mencapai tujuan dan mempunyai kesamaan arah dalam mencapai tujuan. Secara operasional pelaksanaan kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah dijelaskan melalui indikator sebagai berikut :

   a. Tahap Perencanaan

      Hal-hal penting yang berkaitan dengan perencanaan, berupa tujuan yang hendak dicapai, sistem dan prosedur yang diterapkan dan personil yang terlibat serta persyaratan yang harus di penuhi dalam kemitraan. Tahap Perencanaan, menggunakan indikator : Penyusunan proposal kegiatan, Pengajuan proposal kegiatan dan Pencairan dana.

   b. Tahap pelaksanaan

      Pada tahap pelaksanaan, beberapa kegiatan yang menjadi fokus perhatian adalah : *pertama*, menyangkut aktifitas penyusunan dan pengalokasian sumber daya sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. *Kedua*, mengarahkan orang-orang untuk bekerjasama. *Ketiga*, aktifitas menyatukan kegiatan organisasi agar terintegrasi secara

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

harmonis sehingga sistem dan prosedur dapat dilaksanakan secara konsisten. *Keempat*, aktifitas pengelolaan anggaran dan aktifitas mengelola staf sebagai sumber daya organisasi, yang menggambarkan hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam kemitraan.

c. Tahap pertanggungjawaban, menggunakan indikator :

Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan melalui penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan.

d. Tahap pengawasan

Pada tahap pengawasan sangat ditentukan dengan keabsahan fakta yang terkumpul, ketepatan waktu evaluasi dan tindakan perbaikan.

4. Bentuk kemitraan adalah model kerjasama antara LKD dengan Pemerintah Daerah dalam suatu wadah kebersamaan dengan mengedepankan nilai-nilai kemitraaan, dimana kedua pihak mempunyai aktifitas bersama dengan memiliki kesamaan bentuk potensi, tidak membedakan status atau kekuatan, dalam upaya menanggulangi kemiskinan sebagai tujuan yang ingin dicapai bersama. Bentuk kemitraan sebagai berikut :

a. Model *Pseudo Partnership*, atau Kemitraan Semu

1. Hubungan kedua pihak tidak serius melakukan kerjsama, kalaupun itu ada sifatnya hanya formalitas
2. Tidak ada tujuan yang jelas, sehingga visi yang diperjuangkan tidak ada kejelasan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

3. Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down.

b. *Subordinatif Union Of Partnership*

1) Status dan kemampuan masing-masing pihak tidak seimbang

2) Adanya dominasi salah satu pihak yang kuat sehingga tidak ada sharing dan peran serta fungsi yang seimbang

3) Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down

c. *Contributory Partnership*

1) Kedua pihak dalam melakukan kegiatan faktor dana merupakan aspek utama untuk suksesnya suatu kegiatan, sementara aspek lain tidak begitu penting

2) Dominasi pada pihak yang mempunyai kontribusi banyak

3) Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down

d. *Operasional Partnership*

1) Sistem pembagian kerja yang terpisah

2) Otoritas kekuasaan dipegang oleh pemilik dana terbesar

3) Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down

e. *Consultative Partnership*

1) Bersifat konsultasi saja atau sekedar forum sumbang saran

2) Otoritas berada pada pihak tertentu dalam menentukan saran yang akan diputuskan

3) Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down

f. *Colaborative Partnership*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1) Adanya pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan
2) Otonomi masih dipegang oleh instansi Pemerintah
3) Relasi hubungan atas-bawah sehingga lebih bersifat top down

g. *Linear Union of Partnership*

1) Posisi kedua pihak pada garis lurus
2) Mempunyai kesamaan tujuan atau misi, besaran/ volume usaha atau organisasi, status atau legalitas

h. *Linear Colaborative or Partnership*

1) Tidak membedakan besaran volume, status/ legalitas kekuasaan kedua pihak
2) Visi misi saling mengisi
3) Hubungan secara linear, pada garis lurus tidak saling tersubordinasi

i. Kemitraan Mutualisitik

1) Memahami pentingnya melakukan kemitraan
2) Saling memberi dan mendapatkan manfaat
3) Tujuan jelas dan dapat dilakukan secara optimal
4) Sumberdaya tidak harus sama, tidak membedakan besaran volume, status/ legalitas kekuatan pihak lain
5) Saling melengkapi atas kekurangan yang dimiliki oleh pihak lain
6) Posisi kedua pihak berada pada posisi yang sama dan tidak saling tersubordinasi
7) Tidak ada pihak yang merasa dominan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pada hakekatnya penelitian sosial merupakan suatu upaya untuk mengungkapkan fenomena sosial tertentu dan pembentukan kesimpulan teoritis tentang jalin menjalinnya gejala atau fenomena sosial tersebut. Seperti juga melihat kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Pemerintah Daerah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas.

Penelitian tentang kemitraan antar Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Pemerintah Daerah dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yanag alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Menurut Mardalis (1990) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesa atau tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendiskripsikan apa adanya dengan variabel-variabel yang diteliti. Pendapat lain tentang penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2005 : 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Penelitian kualitatif juga mempunyai desain penelitian sementara yang berkembang di lapangan dan menganalisis data dengan cara induksi. Menurut Moleong (2005:11) penelitian deskriptif adalah peneltian berisi kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, tape recorder, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnnya.

Dengan demikian, metode deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau mengemukakan gejala-gejala sesuai dengan aspek yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka untuk mencapai derajat keilmiahan data, peneliti melakukan iuji keabsahan data.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Moleong (2000) dan Nasution (1990) menyatakan bahwa ada 4 (empat) kriteria yang dapat digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu : *credibility, transferability, dependability, confirmability*

1. *Credibility*

   Penerapan konsep derajad kepercayaan ini berfungsi untuk melaksanakan *inquiry* sedemikian rupa, sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Selain itu berfungsi untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti dengan jalan memperpanjang masa observasi, melakukan *peer debriefing* (hasil kajian didiskusikan dengan orang lain agar mendapatkan kritik dan saran), *triangulasi* (untuk mengecek kebenaran), *member check* (mengecek ulang garis besar berbagai hal yang telah disampaikan informan). Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2000 :178). Triangulasi dalam penelitian Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini adalah metode atau cara pengumpulan data ganda yang antara lain berupa : pengamatan, wawancara dan analisis dokumen. Untuk memperoleh data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara dengan para informan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara dicocokkan dengan dokumen-dokumen yang di dapat. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini selain menggunakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

triangulasi metode juga menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan meminta penjelasan berulang kepada informan mengenai informasi yang telah diberikannya untuk mengetahui keabsahan atau ketegasan informasinya dalam suatu wawancara tambahan. Selain itu keterangan dari informan lain untuk mengetahui derajat kepercayaan informan tersebut.

2. *Transferability*

   Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan keteralihan tersebut peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama.

3. *Dependability*

   Kebergantungan dan kepastian untuk mengecek serta memastikan hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti akan mendiskusikan dengan pembimbing secara setahap demi setahap, mengenai konsep-konsep yang dihasilkan dilapangan setelah hasil penelitian dianggap benar, kemudian diadakan seminar tertutup dan terbuka dengan mengundang teman sejawat dan pembimbing.

4. *Confirmability*

   Dalam penelitian kualitatif. uji konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil penelitian. dikaitkan dengan proses yang

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

B. Informan

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 37 LKD di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan. Sampel penelitian harus mencerminkan kondisi sesungguhnya dari jumlah populasi yang ada. Apabila jumlah subyek penelitian kurang dari 100, maka semuanya diambil sehingga penelitian ini sekaligus menjadi penelitian populasi. Dengan demikian, sesuai dengan topik dan lokasi penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, dianggap potensial dalam menunjang akurasi data.

Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*), yaitu Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan pertimbangan waktu, biaya dan tenaga. Kesamaan lokasi penelitian dengan tempat tinggal peneliti, diharapkan akan mempermudah, mempercepat dan menjamin akurasi data. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Moleong (2000 : 61) dimana cara terbaik yang ditempuh dalam penelitian lapangan adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif yakni : pergilah, jajagilah di lapangan untuk melihat apakah terdapat kesesuaian dengan kenyataan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

C. Instrumen Penelitian

Data yang diperlukan untuk mengadakan penelitian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) ini adalah mengutamakan data primer dan didukung oleh data sekunder untuk memperkuat.

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan wawancara mendalam kepada informan yaitu : birokrat pada tingkat pemerintah kabupaten, kecamatan, desa yang terlibat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) dan masyarakat Kecamatan Airgegas sebagai sasaran program ini dan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terhadap fenomena-fenomena empiris yang terjadi berkaitan dengan kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas.
2. Sumber data yang kedua adalah melalui pengumpulan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari informan seperti proses mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh sudah diolah seperti dokumen-dokumen tertulis dan studi kepustakaan. Data sekunder yang dibutuhkan merupakan data mengenai gambaran umum atau deskripsi tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW). Sedangkan data sekunder lainnya yang dijadikan acuan adalah data-data

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

yang didokumentasikan seperti dalam bentuk laporan penelitian, jurnal, pedoman pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW, laporan pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW oleh LKD serta data lain yang didokumentasikan terkait dengan pencapaian maksud dari penelitian yang dilakukan ini.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan reliable maka dipilihlah tehnik yang tepat dan benar. Menurut Vredenbregt (1987; 72-98), teknik umum yang digunakan dalam studi kasus adalah observasi langsung, observasi partisipasi dan wawancara bebas.

Tetapi dalam penelitian ini digunakan tehnik wawancara bebas *(interview)* sebagai teknik umum dengan maksud untuk menjaga data primer yang relevan terhadap setiap variabel penelitian maka wawancara yang akan dilakukan didasarkan pada pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan terbuka *(open ended question)*, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada, dengan demikian diharapkan informan akan dapat menjawab dengan leluasa dan bebas dalam memberikan berbagai alternatif jawaban.

Langkah-langkah mengumpulkan/ memperoleh data dilapangan atau teknik penelitian digunakan :

1. Pengamatan *(Observasi)*, merupakan suatu pengamatan yang sistematis yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar, terutama dalam mengamati dan menafsirkan gejala-gejala yang akan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

berhubungan dengan objek penelitian. Pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas khususnya yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah. Kegiatan yang diamati dalam peneltian ini adalah rapat dalam rangka koordinasi program, monitoring dan evalusi program.

2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara *(interviewer)* yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang di wawancarai *(interviewee)* yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan untuk mengetahui secara mendalam dan mengkaji aspek yang menjadi fokus dalam bahasan dan rumusan masalah, dan kemungkinan aspek-aspek yang belum dirumuskan. Bentuk wawancara yang dilakukan yaitu wawancara bebas yakni wawancara dilakukan tanpa daftar pertanyaan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang akrab dan harmonis serta diharapkan dapat memberikan kebebasan dan ketentraman dalam membeberkan permasalahan. Peralatan yang digunakan dalam wawancara salah satu adalah menggunakan alat perekam. Tahapan wawancara dilakukan pada beberapa informan yang dinilai mampu memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti yang dipilih secara *purposive sampling* yaitu sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Unsur/ Instansi/jabatan	Profil	Ket
1.	BP3MD	Ketua Tim Koordinasi PNPM-PISEW Kabupaten	1 orang
2.	Dinas Pekerjaan Umum	Dinas mitra, Instansi Pemerintah Kabupaten yang menjadi mitra LKD	3 orang
3.	Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan	Bertugas mensosialisasikan program PNPM PISEW, memantau pelaksanaan program, memonitor serta mengumpulkan laporan pelaksanaan kegiatan, membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.	1 orang
4.	Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK)	Bertugas membantu pengadministrasian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan	I orang
5.	Ketua LKD	Penanggungjawab kegiatan LKD	6 orang
6.	Konsultan Pendamping	Bertugas sebagai fasilitator dalam kegiatan	1 orang
7.	Warga Masyarakat		3 orang
8.	Camat	Koordinator Program Tingkat Kecamatan	1 orang

3. Telaah Dokumen dan Studi Kepustakaan, tehnik ini mengumpulkan data yang diperoleh melalui bahan yang tertulis seperti Nota Kesepakatan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, SK Bupati, laporan evaluasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), data LKD, pedoman program, review hasil penelitian, literatur berupa buku, jurnal, dan melalui media internet yang membahas tentang hal itu.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana menggambarkan kemitraan LKD dan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Airgegas. Fakta-fakta tersebut dikumpulkan selanjutnya menganalisis informasi berupa data dengan tidak menggunakan uji statistik, melainkan analisis non statistik sesuai dengan rancangan penelitian. Analisis data penelitian ini berasal dari beberapa sumber informasi, yang didapat dari wawancara mendalam. Proses pengolahan data dengan menggunakan analisis tema dapat diurutkan sebagai berikut : Telaah seluruh data/ informasi yang dikumpulkan dari wawancara mendalam, mereduksi data/informasi dengan merangkum dan menyimpulkan sesuai data yang telah diteliti. Selain itu juga, analisis dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan informan (emik) dan interpretasi peneliti (etic) terhadap data di lapangan, analisis dilakukan dengan menghubungkan dan disesuaikan dengan teori yang digunakan sehingga dapat dihasilkan kesimpulkan dan rekomendasi penelitian.

Penjelasan emik dimaksudkan untuk dapat mengungkapkan apa yang dipikirkan, diketahui, dilakukan, diharapkan oleh informan sesuai apa yang disampaikan informan sendiri (*native's point of view*). Beberapa karakteristik pendekatan emik adalah (1) metode utama adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan bahasa lokal;, (2) maksudnya adalah untuk mencari kategori-kategori makna (*the categories of meanings*), sedekat mungkin dengan cara-cara orang lokal mendefinisikan sesuatu; (3) definisi-definisi makna oleh

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

orang lokal dan sistem ide mereka dilihat sebagai penjelasan penting dari perilakunya. Pendekatan emik memungkinkan suatu ide atau perilaku informan dikaitkan dengan konteks-nya (*context-bound*). Disamping pendekatan emik, penelitian ini juga menggunakan pendekatan etik (*etic*). Penjelasan etik adalah suatu penjelasan tentang gejala atau fenomena yang diberikan oleh peneliti berdasarkan pengamatan dan pemahamannya. Beberapa karakteristik pendekatan etik adalah (1) metode utamanya adalah observasi terhadap perilaku; (2) maksudnya adalah untuk mencari poly perilaku sebagaimana didefinisikan oleh peneliti; (3) sistem dan pola-pola didefinisikan' melalui analisis peristiwa dan tindakan (*evenis and actions*). Penjelasan etik dalam kasus penelitian ini terutama digunakan untuk menilai manajemen kemitraan dan model-model kemitraan. Penjelasan etik ini dimaksudkan sebagai perbandingan dengan penjelasan emik yang diberikan oleh informan, artinya penjelasan etik inipun dikonfirmasikan dengan penjelasan emik. Dengan demikian terjadi saling silang (*cross check*) antar dua penjelasan. Melalui pengkombinasian ini diharapkan dapat diraih keleluasaan kajian dan kedalaman analisisnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB IV
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PNPM PISEW

Dalam bab ini akan diuraikan kondisi gambaran wilayah penelitian serta gambaran dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) sebagai berikut :

A. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

1. Rumusan Visi dan Misi Kecamatan

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, dimana dan bagaimana organisasi/ instansi harus dibawa dan kerja agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisifatip, inovatif serta produktif.

Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menggambarkan suatu kondisi yang diinginkan sekarang dan masa depan berisikan cita dan citra yang harus diwujudkan oleh Kecamatan Airgegas.

Rumusan Visi Kecamatan Airgegas Tahun 2009-2013 dalam rangka penyelarasan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Bangka Selatan adalah : " ***TERWUJUDNYA AIRGEGAS SEJAHTERA, TERDEPAN DALAM LAYANAN MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH, BERSIH DAN BERWIBAWA"***

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Untuk terwujud serta terrealisasikannya visi di atas, maka ditetapkan misi Kecamatan Airgegas sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat (Publik)
b. Meningkatkan peran masyarakat dalam menunjang Pemerintahan dan pembangunan
c. Menciptakan situasi keamanan yang kondusif dan ketertiban umum secara menyeluruh
d. Menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemerintah, Masyarakat dan Swasta.

2. Kondisi Fisik Wilayah

Kecamatan Airgegas merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan yang secara geografis memiliki Daerah yang cukup potensial dan strategis, karena letaknya berbatasan lansgsung dengan Kabupaten Bangka Tengah, disamping itu merupakan jalur penghubung antara propinsi dan Kabupaten.

Kecamatan Airgegas adalah sebuah wilayah yang secara geografis terletak di Daerah Dataran Tinggi dengan ketinggian 50 –200 m DPL. Luas Kecamatan Airgegas terbagi oleh kawasan Bangunan/perkarangan dan Lainnya. Tercatat pada Tahun 2011 luas Bangunan/Perkarangan 1.352,58 Ha, 83.660,92 Ha untuk Tanah Kering, 550 Ha Untuk penggunaan Tanah lainnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

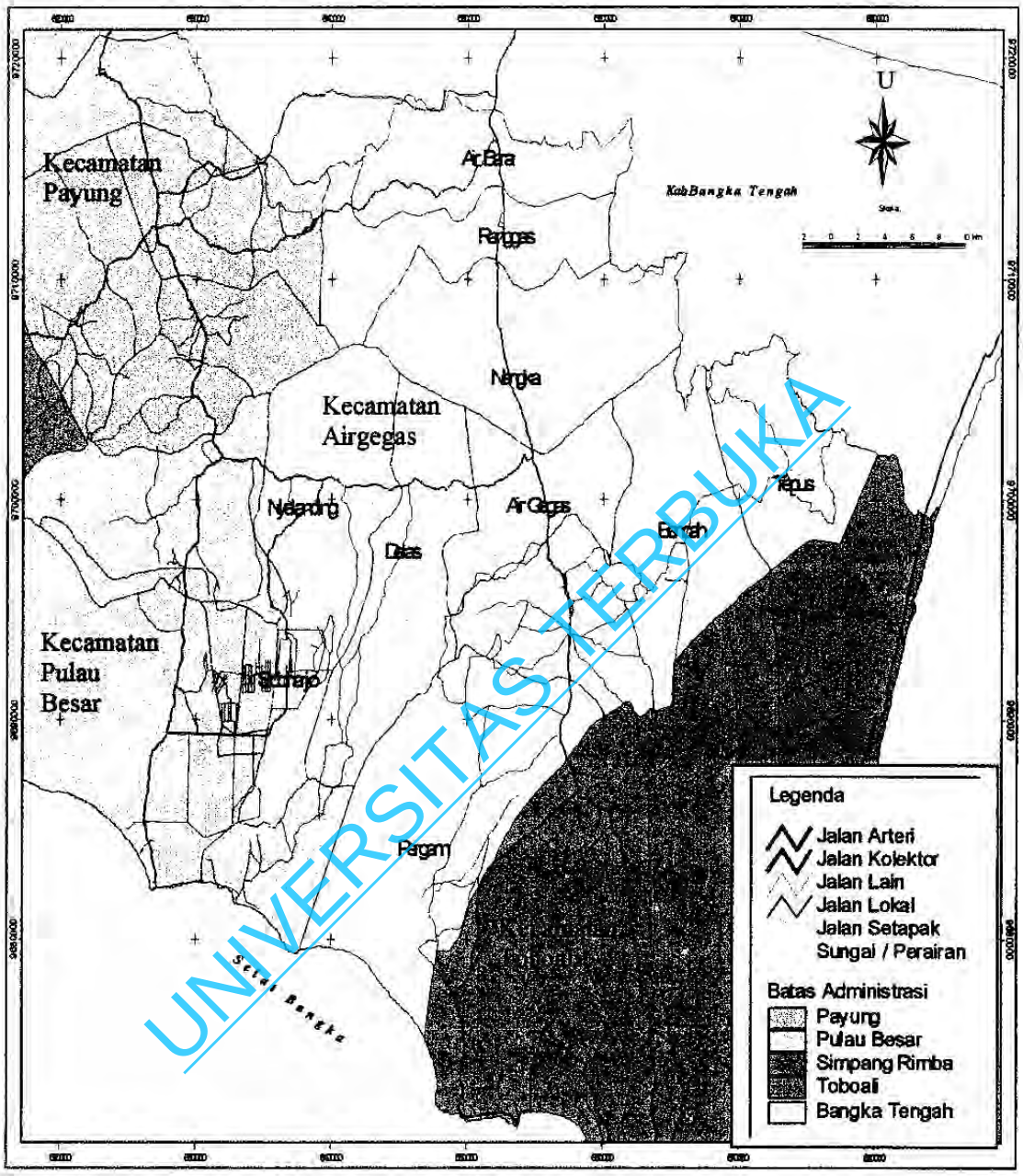

Sumber : Kantor Kecamatan Airgegas

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Airgegas

UNIVERSITAS TERBUKA

Secara umum Wilayah Administrasi Kecamatan Airgegas yang berbatasan langsung di sebelah utara dengan kabupaten Bangka Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Toboali, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan payung, sebelah Timur berbatasan dengan selat Gelasa.

a. Letak Geografis Dan Administrasi Kecamatan Airgegas

Kecamatan Air Gegas terdiri dari Sepuluh desa dengan luas 85.363,5 ha sebagaimana dalam tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.2 Luas Tiap-Tiap Desa Di Kecamatan Airgegas

No	Desa	Luas Wilayah (Ha)
1.	Pergam	3.750
2.	Bencah	8.000
3.	Tepus	6.000
4.	Airgegas	14.500
5.	Delas	12.013,5
6.	Sidoharjo	900
7.	Nyelanding	11.140
8.	Nangka	15.010
9.	Ranggas	7.000
10	Airbara	7.050
Jumlah		**85.363,5**

Sumber : Kecamatan Dalam Angka Tahun 2012

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Kependudukan

1) Jumlah Dan Kepadatan Penduduk

Jumlah Penduduk pada tahun 2011 di Kecamatan Airgegas sebanyak ± 8.731 Kepala Keluarga dan 37.784 jiwa.

2) Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki di Kecamatan Airgegas dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tahun	Laki - Laki		Perempuan		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1.	2007	17.445	50,3	17.216	49,7	34.661
2.	2008	18.110	51,2	17.233	48,8	35.343
3.	2009	19.008	51,4	17.970	48,6	36.974
4.	2010	19.312	51,5	18.175	48,5	37.487
5.	2011	19.447	51,5	18.337	48,5	37.784

Sumber : Kecamatan Dalam Angka

3) Struktur Penduduk berdasarkan Rumah Tangga

Jumlah penduduk berdasarkan rumah tangga di Kecamatan Airgegas dapat dilihat pada tabel 4.2.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan rumah tangga di Kecamatan Airgegas

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Tangga	Penduduk/ Rumah Tangga (%)
1.	2007	34.661	7.742	22,34
2.	2008	35.343	7.951	22,50
3.	2009	36.974	8.470	22,91
4.	2010	37.487	8.643	23,05
5.	2011	37.784	8.731	23,11

Sumber : Kecamatan Dalam Angka

3. Kondisi Perekonomian

Secara garis besar kondisi perekonomian di kecamatan Airgegas bersumber dari sektor Pertanian dan ada juga beberapa penduduknya yang bergerak di bidang Perkebunan. Sektor Pertanian merupakan sumber utama pendapatan penduduk dimana hampir seluruh wilayah Kecamatan berupa hamparan pertanian. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani Padi Ladang, dan ada beberapa penduduk merupakan petani Karet dan Lada. Untuk sektor peternakan hanya sedikit dari jumlah penduduk, dimana bidang peternakan yang di kembangkan adalah ternak ayam dan sapi. Sedangkan sumber perekonomian lainnya adalah bidang pelayanan jasa dan perdagangan skala kecil yaitu tempat penerimaan penjualan hasil pertanian yang merata hampir setiap desa di kecamatan Airgegas.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

4. Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Airgegas

a. Prasarana Jalan

Secara garis besar wilayah kecamatan Airgegas sudah terlayani oleh Jalan baik jalan tanah, jalan semi permanen(kerikil) ataupun Jalan Aspal. Namun, Prasarana jalan pada Kecamatan Air gegas ini banyak yang rusak khususnya jalan aspal yang merupakan jalan poros kecamatan sebagian besar rusak berat dan memerlukan perbaikan yang segera di tangani oleh Pemerintah Daerah. Untuk Prasarana jalan antar desa sebagian merupakan jalan aspal dan kebanyakan berupa jalan perkerasan dengan kerikil dan timbunan, sebagaimana gambar 4.1 berikut ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012

Gambar 4.1 Jalan Desa

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

b. Prasarana Jembatan

Prasarana Jembatan di Kecamatan Airgegas ini semuanya menggunakan jembatan Besi, kayu dan beton dengan kondisi relatif , dimana secara umum masih bisa di gunakan sebagai lintasan orang maupun kendaran roda dua dan roda empat, sebagaimana gambar 4.2 di bawah ini.

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012

Gambar 4.2 Jembatan di Jalan Desa

UNIVERSITAS TERBUKA

c. Prasarana Air Bersih

Kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari – hari penduduk di Kecamatan Airgegas misalnya mandi dan cuci sebagian besar terlayani penyediaan air melalui sumur sebanyak 76,03 % dan mata air

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

19,68 %, serta sungai/ danau sebesar 4,28 %, sebagaimana gambar 4.3 berikut ini :

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012

Gambar 4.3 Tempat Mandi dan Cuci

d. Drainase Air Limbah

Air limbah yang terdapat di Kecamatan Airgegas umumnya berupa limbah domestik/ rumah tangga. Air limbah tersebut umumnya dialirkan kesungai terdekat, sehingga beban sungai – sungai di wilayah tersebut semakin berat dan tingkat pencemaran air sungai sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari kondisi sungai yang ada di wilayah tersebut seperti pada gambar 4.4 berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012

Gambar 4.4 Dranase dan Pemukiman

UNIVERSITAS TERBUKA

Sistem pengolahan limbah dari septictank sedikit penggunaannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa kecenderungan yaitu :

1) Kurang sadarnya penduduk setempat akan arti kebersihan dan kelestarian lingkungan
2) Biaya pembuatan sistem pengolahan yang relatif memberatkan, faktor budaya masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem pengolahan limbah tersebut.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

e. Listrik

Pada wilayah Airgegas ini dapat dikatakan bahwa seluruh penduduknya telah menikmati fasilitas listrik dari PLN. Namun ada 31,5 % KK yang masih belum memiliki sambungan langsung, atau masih ikut dengan cara membayar kepada tetangganya sebagaimana gambar 4.5 dibawah ini :

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012

Gambar 4.5 Jaringan Listrik

UNIVERSITAS TERBUKA

f. Telekomunikasi

Untuk sektor telekomunikasi di kecamatan Air Gegas sudah dilayani oleh adanya penyediaan telekomunikasi seluler melalui telepon

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

genggam dengan penyediaan jaringan oleh beberapa provider seluler seperti Telkomsel, maupun Indosat, akan tetapi dengan wilayah yang merupakan dataran tinggi ada beberapa desa yang masih belum dapat menangkap signal telepon seluler, sebagimana gambar 4.6 berikut ini :

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012

Gambar 4.6 Jaringan Telepon

UNIVERSITAS TERBUKA

g. Pengelolaan Sampah

Sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sumber sampah berasal dari pemukiman, pasar, kawasan pertokoan dan perdagangan, kawasan perkantoran dan sarana umum, kawasan industri,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

peternakan hewan, dan fasilitas umum lainnya. Pembuangan sampah menjadi masalah yang memerlukan perhatian sungguh-sungguh, karena berkaitan erat dengan keindahan dan kesehatan masyarakat. Volume sampah pada saat ini kenaikannya belum terlalu signifikan, akan tetapi dengan semakin bertambahnya penduduk maka volume sampah akan bertambah sejalan dengan dinamika perubahan yang terjadi.

Kesadaran warga akan kebersihan lingkungannya masih dapat dikatakan kurang baik, karena masih banyak warga yang menganggap bahwa sungai merupakan tempat sampah umum yang dapat menampung segala macam kotoran dan nantinya akan bersih dengan sendirinya. Hal ini berakibat semakin dangkal dan semakin kotornya sungai sebagaimana gambar 4.7 di bawah ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Sumber : Dokumentasi Penulis, 2012

Gambar 4.7 Tempat Pembuangan Sampah

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Pada umumnya kegiatan pengelolaan pembuangan sampah ini dapat dibagi menjadi tiga yaitu : pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan. Jenis sampah terdiri atas 2 (dua) yakni sampah organik dan sampah anorganik.

5. Perkembangan Kegiatan Ekonomi Di Kecamatan

Untuk perkembangan kegiatan Ekonomi di Kecamatan Airgegas sebagian besar berasal dari hasil pertanian. Perkembangan perekonomian dari pertanian dapat dilihat dari meningkatnya transaksi jual beli, terutama perdagangan hasil tani berupa Karet, meskipun harga yang di patok petani disesuaikan dengan harga satuan pasar dan juga melihat kondisi hasil karetnya apabila bagus maka harganya akan tinggi. Perekonomian lainnya yang cukup berkembang adalah bidang peternakan, dimana terjadi peningkatan pemesanan terhadap produksi ternak terutama ternak ayam. Sektor ekonomi lainnya yang berkembang adalah sektor jasa dan pelayanan publik.

UNIVERSITAS TERBUKA

6. Kelembagaan Ekonomi Yang Ada Di Kecamatan

Kelembagaan ekonomi yang ada di Kecamatan yang cukup potensial dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat setempat, diantara lembaga-lembaga ekonomi ini antara lain Lembaga Koperasi dan simpan pinjam.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

7. Perkembangan Investasi

a. Sektor Pertanian

1) Meningkatkan produksi pertanian melalui usaha diversifikasi, intensifikasi, eksistensi dan rehabilitasi
2) Meningkatkan alat mesin pertanian melalui kelompok-kelompok pelayanan jasa alat mesin pertanian
3) Meningkatkan kemampuan petani dalam penguasaan dan penerapan teknologi pertanian yang berwawasan lingkungan
4) Mempertahankan lahan pertanian produktif
5) Meningkatkan jalan usaha tani
6) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani .

b. Sektor Perdagangan

1) Terciptanya sistem perdagangan yang makin efisien dan efektif, mampu memanfaatkan dan memperluas pasar serta membentuk harga yang wajar dan saling menguntungkan bagi produsen dan konsumen khususnya untuk komoditi pertanian dan peternakan melalui penyediaan prasarana/sarana perdagangan yang memadai, potensi serta memanfaatkan arus informasi pasar.
2) Memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan daya saing produk pertanian dan peternakan.
3) Meningkatkan pendapatan produsen terutama petani dan nelayan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

4) Kerja sama pada kemitraan antara usaha-usaha besar, menengah dan kecil

8. Kelembagaan

Pada Kecamatan Airgegas kelembagaan yang sudah ada di desa-desa sebagian besar masih aktif dan dan mempunyai struktur organisasi yang cukup baik, hanya sedikit kelembagaan yang mati suri atau stagnan karena tidak terstruktur dengan baik. Kelembagaan yang masih aktif diantaranya adalah Karang Taruna, PKK, Remaja Masjid, Kelompok Tani, Kelompok Yasinan, Rukun Kematian, BPD, pada masing-masing desa.

9. Aspirasi Masyarakat

Prioritas kegiatan yang dikembangkan berdasarkan aspirasi masyarakat antara lain :

a. Aspek kegiatan yang mendukung aksesbilitas untuk pengembangan wilayah:
   1) Pembangunan Jalan Desa
   2) Penimbunan Jalan desa
   3) Pembuatan Jembatan
   4) Pembuatan Siring
b. Aspek kegiatan yang mendukung perekonomian masyarakat:
   1) Pembuatan Jalan Usaha Tani di Desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

2) Aspek kegiatan yang mendukung pasca panen:

a) Pembuatan Gudang Penyimpanan Hasil Panen

b) Pembuatan Pasar Desa

3) Aspek kegiatan yang mendukung fasilitas umum:

a) Pengadaan Air Bersih

b) Pembuatan MCK

4) Aspek Kesehatan & Pendidikan

a) Pembangunan sarana Kesehatan

b) Pembangunan sarana Pendidikan

B. DESKRIPI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL DAN EKONOMI WILAYAH (PNPM-PISEW)

1. Pengertian PNPM PISEW

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) adalah suatu program untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, Pemerintah Daerah sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat daerah.

Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) diharapkan juga

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dapat berhubungan dan melembaga proses konsultatif antara pemerintah dan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam penangulangan kemiskinan. Hal ini berarti bahwa PNPM PISEW hanya dapat berjalan sesuai dengan tujuannya apabila di antara masing-masing pelaku pembangunan memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama untuk saling koordinasi, kooperasi dan kolaborasi satu terhadap yang lain sehingga terjadi kemitraan. PNPM PISEW hanya sekedar stimulant untuk membantu dan mempercepat terwujudnya proses kemitraan yang ditumbuhkan antara mereka sendiri.

Bagi masyarakat, terutama LKD, PNPM PISEW juga dimaksudkan sebagai proses pembelajaran untuk mengakses dan menggalang berbagai sumber daya maupun sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah atau masyarakat, sehingga diharapkan dapat lebih mengoptimalkan kemandirian dan keberlanjutan upaya penanggulangan kemiskinan.

Lembaga kemasyarakatan desa (LKD)/ masyarakat mampu bermitra dengan pemerintah daerah, maka LKD-LKD harus memiliki kredibilitas yang menjamin kepercayaan dari berbagai pihak tersebut. Dengan demikian hanya LKD-LKD yang telah menunjukkan kinerja sebagai LKD berdaya yang memiliki peluang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam proses *channeling* dari program-program yang ada, khususnya melalui kegiatan PNPM PISEW. Kegiatan PNPM PISEW ditempatkan sebagai sarana pembelajaran kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

2. Tujuan Pelaksanaan Kegiatan PNPM PISEW

Maksud pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW adalah agar terjadi proses pembelajaran kemitraan dan gerakan bersama oleh seluruh pelaku di tingkat kecamatan sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

Tujuan umum dari pelaksanaan PNPM PISEW adalah melembagakan kemitraan sinergis antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk membangun wilayahnya dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman, produktif dan berjati diri.

Adapun tujuan PNPM PISEW adalah : mempercepat pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan dengan berbasis pada sumberdaya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan daerah di tingakat kabupaten, kecamatan dan desa (*local governance*), serta penguatan institusi lokal di tingkat desa.

Sedangkan sasaran PNPM PISEW adalah

a. Pengurangan tingkat kemiskinan penduduk pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja
b. Peningkatan pelayanan infrastruktur sosial ekonomi pedesaan yang meliputi pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) kategori, yaitu : (i) transportasi, (ii) produksi pertanian, (iii) pemasaran pertanian, (iv) air bersih dan sanitasi, (v) pendidikan, (vi) kesehatan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Terbentuknya Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagai pusat pengembangan ekonomi dan forum Kelompok Diskusi Sektor (KDS)

d. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam berperan sebagai fasilitator dalam melaksanakan pembangunan melalui penyelenggaraan Pelatihan Perencanaan Pembangunan, dan Pelatihan Pelaksanaan Pembangunan Insfrastruktur Pedesaan

e. Meningkatnya kapasitas dan partisifasi masyarakat dalam proses pembangunan, yang tercermin dari menguatnya fungsi KDS, melalui rangkaian pelaksanaan musyawarah pembangunan dari tingkat desa hingga ke tingkat kabupaten.

3. Keterlibatan Dua Unsur Dalam Pelaksanaan PNPM PISEW

Pelaksanaan PNPM PISEW melibatkan dua unsur utama, yaitu :

a. Pemerintah Kabupaten, melalui dinas-dinas

b. Masyarakat, melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

Kedua unsur dimaksud akan belajar bermitra mulai tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi kegiatan PNPM PISEW.

4. Struktur Organisasi Pelaksanaan PNPM PISEW

Pelaksanaan Program PNPM PISEW akan melibatkan berbagai institusi, sesuai dengan komponen kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi serta kompetensi dari berbagai institusi pemerintahan baik di pusat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

maupun di daerah, dan konsultan/ fasilitator yang akan memberikan bantuan teknis kepada masyarakat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara jelas, struktur organisasi pelaksanaan dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini :

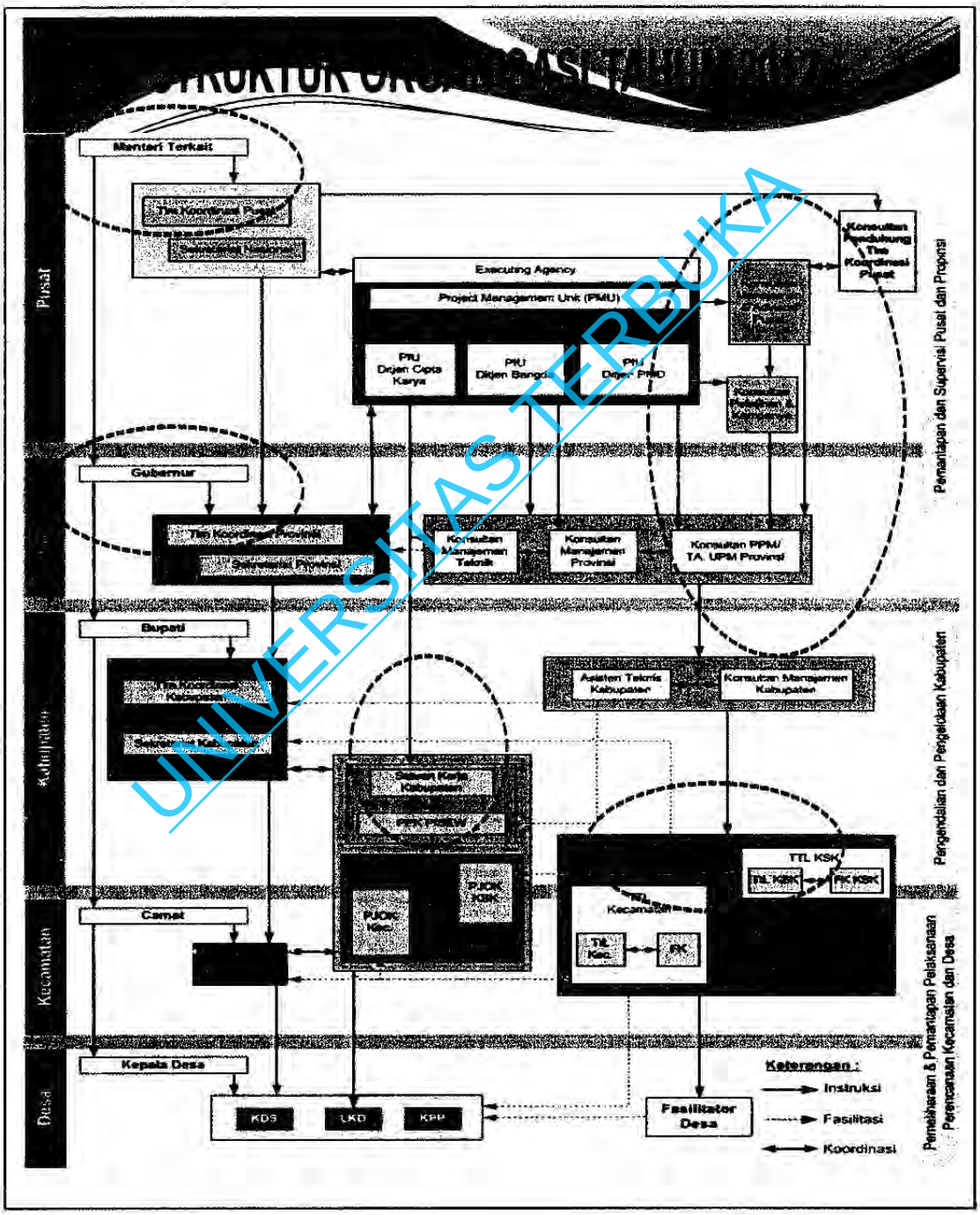

UNIVERSITAS TERBUKA

Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Propinsi berperan melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan supervise dan pemantauan, Pemerintah Kabupaten melakukan pengelolaan dan pengendalian, sedangkan Kecamatan dan Desa melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan.

Untuk dapat tercapainya proses dan hasil pelaksanaan program dengan baik, telah dibentuk organisasi pengendali dari tingkat pusat dan daerah, yang nantinya diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan program di lapangan. Di tingkat pusat lembaga penyelenggara program PNPM PISEW adalah Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang bertindak selaku koordinator.

Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang terdiri atas unsur-unsur terkait, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Kelancaran tugas Pemerintah Propinsi dalam penanggulangan kemiskinan, maka ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Kepala Bappeda Propinsi sebagai Ketua Tim Koordinasi dengan keanggotaan meliputi sebagai berikut:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

a. Asisten Sekretariat Pemerintah Propinsi Bidang Ekonomi dan Pembangunan
b. Bappeda Propinsi
c. Badan/ Dinas/ Kantor Pemberdayaan Masyarakat
d. Dinas Pekerjaan Umum
e. Dinas Pertanian
f. Dinas Kesehatan
g. Dinas Pendidikan
h. Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
i. Badan/Dinas/ Kantor Terkait

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Kabupaten Bangka Selatan sebagai penangungjawab pelaksanaan Kegiatan PNPM PISEW. Pemerintah Kabupaten berperan menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW di wilayah kerjanya. Tim Koordinasi Kabupaten dengan keanggotaan terdiri dari pejabat/staf yang mewakili instansi anggota Tim Koordinasi. Sedangkan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW di tingkat Kecamatan adalah camat, sedangkan di tingkat desa adalah Kepala Desa sebagai penanggung jawab, dan pelaksana PNPM PISEW adalah Lembaga Kemasyarakat Desa (LKD) bersama pemerintah kabupaten melalui dinas terkait.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW di berbagai tingkatan pemerintahan, Tim Koordinasi PNPM PISEW di bantu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

konsultan pendamping yang terdiri dari Konsultan Pendukung Tim Koodinasi Pusat (KPTKP), Konsultan Manajemen Propinsi (KMP) dan Konsultan Manajemen Teknis (KMT) untuk wilayah propinsi, Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) dan Asisten Teknis Kabupaten, Fasilitator Kecamatan (FK) dan Tenaga Teknik Lapangan (TtL) untuk tingkat kecamatan, Fasilitator Desa (FD) untuk lebih kurang 10 (sepuluh) desa.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) yaitu berwujud dana stimulant yang berasal dari Pemerintah Pusat untuk memperkuat kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya mempercepat kegiatan penanggulangan kemiskinan secara partisipatif dan berkelanjutan dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana dasar.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas merupakan upaya membangun gerakan bersama untuk menanggulangi kemiskinan di wilayah secara mandiri. Proses yang panjang ini telah menghasilkan perkembangan positif. Terutama dalam membangun lembaga masyarakat warga di tingkat desa yang cukup mengakar, representatif, dan kepemimpinan kolektif yang disebut dengan lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), inilah yang diharapkan mampu menjadi pondasi yang kokoh bagi terbangunnya tatanan masyarakat berdaya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sasaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) adalah masyarakat miskin yang ada di seluruh desa di Kecamatan Airgegas, dimana terdapat 37 LKD seperti pada tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6 Nama-Nama Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

No	Nama LKD	Desa
1.	LKD Kelompok Tani Serunting Sakti	Airgegas
2.	LKD Kelompok Tani Karya Makmur	Airgegas
3.	LKD Kelompok Tani Tani Jaya	Airgegas
4.	LKD PKK	Airgegas
5.	LKD Taruna Tani	Airgegas
6.	LKD Kelompok Tani Karya Tani	Airgegas
7.	LKD Karya Indah	Airgegas
8.	LKD LPM	Airgegas
9.	LKD PKK	Airbara
10.	LKD LPM	Airbara
11.	LKD Kelompok Tani Jaya Tani	Airbara
12.	LKD Kelompok Tani Indah Jaya	Airbara
13.	LKD Kelompok Tani Tani Bersama	Airbara
14.	LKD Mandiri	Bencah
15.	LKD Mawar	Bencah
16.	LKD Melati	Bencah
17.	LKD Kelompok Tani Sejahtera	Delas
18.	LKD Irmas Teratai	Nangka
19.	LKD Maju Bersama	Nangka

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lanjutan Tabel 4.4

No	Nama LKD	Desa
20.	LKD Karang Taruna	Nyelanding
21.	LKD Kelompok Tani Lebat Subur	Nyelanding
22.	LKD Kelompok Tani Subur Jaya	Nyelanding
23.	LKD Sejahtera	Nyelanding
24.	LKD Kelompok Tani Air Baru 1	Nyelanding
25.	LKD Jaya Sejahtera	Pergam
26.	LKD Jaya Makmur	Ranggas
27.	LKD Karya Maju	Ranggas
28.	LKD Tani Teratai	Ranggas
29.	LKD Lembaga PKK	Sidoharjo
30.	LKD Karang Taruna	Sidoharjo
31.	LKD Kelompok Tani Karya Tani	Sidoharjo
32,	LKD Posyandu Delima	Sidoharjo
33.	LKD Kelompok Tani Margo Mulyo	Sidoharjo
34.	LKD Kelompok Tani Harapan Makmur	Sidoharjo
35.	LKD Lembur Kuning	Sidoharjo
36.	LKD LPM	Tepus
37.	LKD Tani Kemasyarakatan	Tepus

Sumber Data : PJOK Kecamatan Airgegas 2012

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

BAB V
ANALISIS MANAJEMEN KEMITRAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA (LKD) DENGAN PEMERINTAH DAERAH

Kemitraan LKD dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) merupakan program untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat dan pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan kemiskiman dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat daerah.

Kegiatan PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara terpadu. Terpadu yang dimaksud disini adalah (1) terpadu dalam hal pendanaan dan (2) terpadu dalam pelaksanaan kegiatan. Yang dimaksud dengan terpadu dalam hal pendanaan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan berasal dari Pemerintah Pusat melalui APBN dan juga berasal dari Pemerintah Daerah melalui APBD serta swadaya masyarakat baik dalam bentuk dana maupun dalam bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Selanjutnya, terpadu dalam hal pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan masyarakat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kemitraan LKD dengan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM PISEW dengan sumber dana dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang disebut dengan sharing dana. Sharing dana ini merupakan bentuk penyertaan dana penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari kedua pihak dengan porsi yang seimbang. Selain itu juga sumber dana berasal dari swadaya masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat tidak saja berbentuk dana tetapi juga dalam bentuk lainnya.

Rencana kegiatan LKD yang ada di singkronkan dengan rencana program yang ada di dinas atau instansi teknis dan kegiatannya didanai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan kegiatan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pertanggungjawaban dilaksanakan bersama antara LKD dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dan LKD. Melalui kegiatan PNPM PISEW ini terlihat kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.

Berikut ini akan dipetakan bentuk kemitraan sebagai berikut :

1. Model kemitraan *pseudo partnership*, atau kemitraan semu.
   a. Hubungan kedua pihak tidak serius melakukan kerja sama, kalaupun itu ada sifatnya hanya formalitas.
   b. Tidak memahami untuk apa melakukan hubungan kerjasama atau kemitraan.
   c. Tidak ada tujuan yang jelas, sehingga visi yang diperjuangkan tidak ada kejelasan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Manfaat yang diperoleh atau yang didapatkan hanya oleh salah satu pihak, dalam hal ini yang kuat.

e. Tidak ada otonomi dalam kekuasaan, sehingga masih ada dominasi salah satu pihak

f. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down

2. *Subordinate union of partnership*

a. Status dan kemampuan masing-masing pihak tidak seimbang

b. Tidak berada pada garis lurus yang seimbang

c. Adanya dominasi salah satu pihak yang kuat sehingga tidak ada sharing dan peran serta fungsi yang seimbang.

d. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down.

3. *Contributory partnership*

a. Kedua pihak dalam melakukan kegiatan faktor dana merupakan aspek utama untuk suksesnya suatu kegiatan, sementara aspek lain tidak begitu penting.

b. Lebih berorientasi pada hasil, bukan pada proses

c. Dominasi pada pihak yang mempunyai kontribusi banyak

d. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down

4. *Operational Partnership*

a. Sistem pembagian kerja yang terpisah

b. Saling membagi sumberdaya, dalam arti harus mempunyai sumber daya atau kekuatan yang seimbang.

c. Otoritas kekuatan dipegang oleh pemilik dana terbesar.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

d. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down

5. *Consultative Partnership*

a. Bersifat konsultasi saja atau sekedar forum sumbang saran

b. Otoritas berada pada pihak tertentu dalam menentukan saran yang akan diputuskan

c. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down

6. *Colaborative Partnership*

a. Adanya pembagian kekuasaan dalam pengambilan keputusan

b. Tujuan diterima semua pihak

c. Saling tukar informasi, dana dan tenaga

d. Setiap pihak mempunyai otonomi

e. Pihak lain (pemerintah) memberikan kepada pihak lain atau organisasi lain di luar pemerintah, akan tetapi tidak disertai tanggung jawab

f. Otonomi masih dipegang oleh instansi pemerintah

g. Relasi hubungan atas bawah sehingga lebih bersifat top down

7. *Linear union of partnership*

a. Posisi kedua pihak pada garis lurus

b. Mempunyai kesamaan tujuan atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas

8. *Linear Colaborative of partnership*

a. Tidak membedakan besaran volume, status/legalitas kekuatan kedua pihak

b. Visi, Misi saling mengisi

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Hubungan secara linear, pada garis lurus tidak saling tersubordinasi

9. Kemitraan mutulistik

a. Memahami pentingnya melakukan kemitraan

b. Saling memberi dan mendapatkan manfaat

c. Tujuan jelas dan dapat dilakukan secara optimal

d. Sumberdaya tidak harus sama, tidak membedakan besar volume, status/legalitas kekuatan pihak lain

e. Saling melengkapi atas kekurangan yang dimiliki oleh pihak lain

f. Posisi kedua pihak berada pada posisi yang sama dan tidak saling tersubordinasi

g. Tidak ada pihak yang merasa dominan

Sumber dana PNPM-PISEW berasal dari pemerintah (Pinjaman Luar Negeri, Rupiah Murni APBN, dan Rupiah Murni APBD), dan masyarakat (swasta dan swadaya masyarakat. Sebagai komitmen untuk pelaksanaan Program PNPM-PISEW Pemerintah Kabupaten diwajibkan mengalokasikan dana APBD sebagai dukungan operasional sesuai jadwal kegiatan PNPM-PISEW tahun 2012.

Sumber pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM PISEW berasal dari *Activity Sharing* Tahun 2012 di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 2.022.500.000,- dengan perincian, untuk peningkatan jalan sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan pengadaan lantai jemur Desa Sidoharjo sebesar Rp. 22.500.000,-. Sedangkan dari Pemerintah Pusat, dapat disajikan dalam tabel 5.1 di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Tabel. 5.1 Kegiatan dan Biaya Pengembangan Insfrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2012

No	Desa	Nama Kegiatan		Volume	Satuan	Nilai Paket (Rp.)	Keterangan
I	Airgegas	1.	Pembangunan Jalan Baru Paket 1	0.55	km	43.500.000	1
		2.	Pembangunan Jalan Baru Paket 2	0.55	km	43.500.000	2
		3.	Pembangunan Jalan Baru Paket 3	0.55	km	43.500.000	3
		4.	Pembangunan Jalan Baru Paket 4	0.55	km	43.500.000	4
		5.	Pembangunan Jalan Baru Paket 5	0.55	km	43.500.000	5
		6.	Pembangunan Jalan Baru Paket 6	0.55	km	43.500.000	6
		7.	Pembangunan Jalan Baru Paket 7	0.55	km	43.500.000	7
		8.	Pembuatan Jembatan Beton	4x4.5	m^1	44.200.000	8
II	Airbara	1.	Pembangunan Parit Pasangan Batako Paket 1	140	m^1	35.000.000	9
		2.	Pembangunan Parit Pasangan Batako Paket 2	120	m^1	30.100.000	10
		3.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Paket 1	60	m^1	41.300.000	11
		4.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Paket 2	60	m^1	41.300.000	12
		5.	Pembangunan Sarana Pemandian Umum	1	unit	32.500.000	13

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lanjutan Tabel 5.1

No	Desa	Nama Kegiatan		Volume	Satuan	Nilai Paket (Rp.)	Keterangan
III	Bencah	1.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 1	0.55	km	43.500.000	14
		2.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 2	0.55	km	43.500.000	15
		3.	Pembangunan Posyandu	1	unit	50.000.000	16
IV	Delas	1.	Pembangunan Pasar Desa	1	los	36.400.000	17
V	Nangka	1.	Pembangunan Parit Pasangan Batako Paket 1	150	m^1	37.300.000	18
		2.	Pembangunan Parit Pasangan Batako Paket 2	150	m^1	37.300.000	19
VI	Nyelanding	1.	Pembangunan Parit Pasangan Batako Paket 1	153	m^1	38.000.000	20
		2.	Pembangunan Parit Pasangan Batako Paket 2	153	m^1	38.000.000	21
		3.	Pembangunan Parit Pasangan Batako Paket 3	153	m^1	38.000.000	22
		4.	Pembangunan Jalan Paving Block	190	m^1	40.900.000	23
		5.	Pembangunan Sarana Pemandian Umum	1	Unit	34.100.000	24
VII	Pergam	1.	Pembangunan Posyandu	1	unit	50.000.000	25

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lanjutan Tabel 5.1

No	Desa	Nama Kegiatan		Satuan	Volume	Nilai Paket (Rp.)	Keterangan
VIII	Ranggas	1.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Paket 1	150	m^1	40.900.000	26
		2.	Pembangunan Talud Penahan Tanah Paket 2	150	m^1	40.900.000	27
		3.	Pembuatan Jembatan Beton	4x4.5		44.200.000	28
IX	Sidoharjo	1.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 1	0.55	km	41.100.000	29
		2.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 2	0.55	km	41.100.000	30
		3.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 3	0.55	km	41.100.000	31
		4.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 4	0.55	km	41.100.000	32
		5.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 5	0.55	km	41.100.000	33
		6.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 6	0.55	km	41.100.000	34
		7.	Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 7	0.55	km	41.100.000	35
X	Tepus	1.	Pembuatan MCK	1	Unit	40.000.000	36
		2.	Pembangunan Sarana Pemandian Umum	1	unit	30.400.000	37
	TOTAL					1.500.000.000	37 Paket

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pelaksanaan kegiatan proyek yang didanai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW), dengan paparan kegiatan kemitraan sebagai berikut :

a. Talud Penahan Tanah dan Parit Pasangan Batako

Dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Jenis konstruksi antara lain pasangan batu dengan mortar, pasangan batu kosong, beton, kayu dan sebagainya. Fungsi utama dari konstruksi penahan tanah adalah menahan tanah yang berada dibelakangnya dari bahaya longsor akibat :

1) Benda-benda yang ada atas tanah (perkerasan & konstruksi jalan, jembatan, kendaraan, dll)
2) Berat tanah
3) Berat air (tanah)

Dinding penahan tanah merupakan komponen struktur bangunan penting utama untuk jalan raya dan bangunan lingkungan lainnya yang berhubungan tanah berkontur atau tanah yang memiliki elevasi berbeda. Secara singkat Dinding penahan merupakan dinding yang dibangun untuk menahan massa tanah di atas struktur atau bangunan yang dibuat.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

b. Pembangunan Jalan Tanah

Jalan Desa adalah jalan yang dapat dikategorikan sebagai jalan dengan fungsi lokal di daerah pedesaan. Artinya jalan desa dapat berfungsi sebagai penghubung antar desa atau ke lokasi pemasaran, atau berfungsi sebagai penghubung hunian/perumahan, serta juga berfungsi sebagai penghubung desa ke pusat kegiatan yang lebih tinggi tingkatannya (kecamatan).

Jalan desa dibangun atau ditingkatkan untuk membangkitkan manfaat bagi masyarakat pedesaan, seperti :

1) Memperlancar hubungan dan komunikasi dengan tempat lain
2) Mempermudah pengiriman sarana produksi ke desa
3) Beroreintasi kepada pengembangan wilayah (jalan poros/ penghubung desa) antara lain :
   a) Menghubungkan pusat kegiatan (pasar, TPI, sentra produksi) ke *outlet* antara lain jalan poros desa, jalan fungsi lebih tinggi, sungai, laut dan ferry
   b) Membuka isolasi desa
4) Memenuhi standar teknis pembangunan jalan dan jembatan pedesaan
5) Mempermudah pengiriman hasil produksi ke pasar, baik yang di desa maupun yang diluar
6) Meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk kesehatan, pendidikan dan penyuluhan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Pembangunan Jalan Paving Blok

Paving block menurut SNI 03-0691-1996 didefinisikan sebagai suatu komposisi bahan bangunan yang dibuat dari campuran semen portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu paving block tersebut.

Paving block sering dipergunakan untuk mengeraskan jalan, halaman kantor atau rumah atau pun areal parkir. Fungsi utama bahan ini adalah untuk menutup lantai dengan bersih dan dalam jangka waktu yang lama. Paving blok dapat dipasang tanpa menggunakan semen. Hal ini membuatnya sebagai alternatif yang murah dan mudah untuk penyerapan air dan tempat yang bebas lumpur. Dari segi keindahan, bangunan yang sederhana akan lebih indah dengan lantai dan tempat yang bagus. Di pasaran dapat ditemukan berbagai bentuk, motif dan pola sesuai dengan selera konsumen.

Keberadaan paving block bisa menggantikan aspal dan pelat beton, dengan banyak keuntungan yang dimilikinya. Penggunaan paving block memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

1) Dapat diproduksi secara massal.
2) Dapat diaplikasikan pada pembangunan jalan dengan tanpa memerlukan keahlian khusus.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3) Pada kondisi pembebanan yang normal paving block dapat digunakan selama masa-masa pelayanan dan paving block tidak mudah rusak.
4) Paving block lebih mudah dihamparkan dan langsung bisa digunakan tanpa harus menunggu pengerasan seperti pada beton
5) Tidak menimbulkan kebisingan dan gangguan debu pada saat pengerjaannya.
6) Paving block menghasilkan sampah konstruksi lebih sedikit dibandingkan penggunaan pelat beton.
7) Adanya pori-pori pada paving block meminimalisasi aliran permukaan dan memperbanyak infiltrasi dalam tanah.
8) Perkerasan dengan paving block mampu menurunkan hidrokarbon dan menahan logam berat.
9) Paving block memiliki nilai estetika yang unik terutama jika didesain dengan pola dan warna yang indah (www.paving.org.uk).
10) Perbandingan harganya lebih rendah dibanding dengan jenis perkerasan konvensional yang lain.
11) Pemasangannya cukup mudah dan biaya perawatannya pun murah (www.paving.org.uk)

d. Pembangunan Jembatan Beton

Jembatan adalah suatu bangunan kontruksi di atas sungai atau jurang yang di gunakan sebagai prasarana lalu lintas darat. Tujuan dari pembangunan jemabatan di pedesaan adalah sarana penghubung pejalan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kaki atau lalu lintas kendaraan ringan di pedesaan, dengan kontruksi sederhana dan menggunkaan bahan-bahan lokal atau bahan setempat. Jembatan pada jalan desa yang menghubungkan perkampungan dengan pusat kegiatan produksi, seperti pertanian, perkebuanan dan lain-lain. Jenis jembatan dikembangkan di pedesaan terdiri dari jembatan gantung, jembatan kayu, jembatan beton dan jembatan kayu dengan gelegar besi.

Pada program tahun 2012 ini akan dibangun jembatan beton. Untuk desain dan kontruksi jembatan beton konsultan pendamping dapat menggunakan Standar bina Marga atau kimpraswil kabupaten. Keuntungan penggunaan jembatan beton dibanding jembatan kayu atau jembatan gelegar besi, antara lain :

1) Masa pakainya lebih lama
2) Kebutuhan untuk pemeliharaan seharusnya/ relatif lebih kecil
3) Harga tidak jauh berbeda dengan jembatan kayu, dan lebih murah daripada gelegar besi
4) Dapat dibangun di tempat yang tidak ada kayu dan pengangkutan gelegar besi sangat sulit/ relatif mahal
5) Masyarakat mendapatkan ketrampilan baru, yaitu cara menggunakan bahan beton yang notabene sangat dipengaruhi oleh tingkat dan kualitas pemahaman struktur beton dan cara pengerjaannya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Sedangkan kerugiannya antara lain :

1) Perlu ketrampilan khusus dalam desain
2) Perlu pengawasan tenaga trampil yang dapat mengawasi tanpa meninggalkan lokasi bangunan
3) Perlu perhatian khusus untuk menjamin kualitas pekerjaan
4) Sangat peka terhadap penurunan tanah/ turunnya pondasi, maka perlu pondasi yang terjamin kuat
5) Lebih sulit pemeliharaan bila ada kerusakan
6) Kerusakan lebih sulit di deteksi sampai dengan jembatan ambruk, maka lebih berbahaya
7) Bila di buat lebar dan panjang, proporsi biayanya sangat besar, dan proposal dana untuk bahan lebih tinggi di banding proporsi untuk tenaga kerja
8) Tanpa pengawasan yang ketat, resiko kegagalan cukup besar
9) Ketrampilan untuk membangun jembatan beton tidak dapat diterapkan oleh masyarakat sendiri pada masa pasca proyek, karena sangat tergantung pada konsultan dan pengawas. Mereka tidak mendapatkan ketrampilan yang dapat diterapkan pada kebutuhan lain-lain.

e. Pembangunan Posyandu Desa

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak.

Pembangunan posyandu bertujuan untuk (1) meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan fasilitas kesehatan dasar (Posyandu) dalam menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia, (2) meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama berkaitan dengan penuruanan AKI dan AKB (3) meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penuruanan AKI dan AKB.

Pembangunan Posyandu telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut (1) diprioritaskan pada wilayah rawan penyakit (2) lokasinya strategis dekat dengan pemukiman penduduk dan transportasinya mudah dijangkau (3) lahan telah dibebaskan dan luas tanah yang dipergunakan diperhitungkan untuk perkembangan yang akan datang (4) diupayakan pembangunannya pada tanah yang relatif datar.

f. Pembangunan Pasar Desa

Pasar desa merupakan suatu jenis sarana dan prasarana pedesaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi jual-beli. Persyaratan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

utama untuk pengadaan pasar adalah ada penjual dan pembeli serta komoditi yang akan diperjualbelikan.

g. Pembangunan MCK dan Sarana Pemandian Umum

Sanitasi adalah merupakan manajemen segala bentuk buangan limbah yang berpengaruh pada kesehatan baik itu limbah padat maupun cair. Fasilitas sanitasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam suatu kawasan permukiman. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan pemanfaatan sanitasi dapat memperburuk kualitas lingkungan tersebut.

Kondisi rendahnya kualitas lingkungan merupakan permasalahan yang hampir sama bagi seluruh permukiman. Lingkungan yang buruk dapat di identifikasi dengan melihat aspek-aspek yang yang berpengaruh pada kualitas hunian tersebut seperti jaringan air bersih, drainase, persampahan, fasilitas MCK, tingkat kepadatan dan kemiskinan. Berdasarkan berbagai aspek yang berpengaruh di atas keberadaan MCK merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam penciptaan kualitas lingkungan perumahan yang sehat, hal ini dikarenakan limbah yang ditimbulkan dari manusia tersebut apabila tidak dibuang pada tempat yang disediakan maka dapat menurunkan kualitas dari lingkungan serta menimbulkan berbagai macam penyakit yang berpengaruh pada kesehatan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Buruknya kualitas lingkungan pada masyarakat, minimnya MCK yang ada, serta masyarakat yang masih memanfaatkan tempat terbuka untuk buang air (sungai dan hutan), mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang ada dengan penyediaan fasilitas MCK.

PNPM PISEW merupakan sarana pembelajaran kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Indikator pelaksanaan dan capaian Program PNPM PISEW dapat dilihat pada tumbuhnya kebutuhan rasa kebersamaan dan kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban kegiatan serta pengawasan kegiatan.

Kemitraan LKD dengan Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM PISEW merupakan langkah tindak lanjut dari upaya-upaya penangulangan kemiskinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Melalui kemitraan tersebut diharapkan terbangun dan melembaganya proses konsultatif antara Pemerintah Daerah dan LKD dalam melakukan penanggulangan kemiskinan. LKD juga diharapkan dapat mengakses dan menggalang berbagai sumber daya yang dimiliki oleh berbagai pihak di tingkat daerah sehingga diharapkan dapat lebih mendorong kemandirian upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Kemitraan antara LKD dengan pemerintah daerah melalui dinas atau instansi terkait dalam penanggulangan kemiskinan melalui program PNPM PISEW yang diuraikan di atas dapat di sajikan dalam gambar 5.2 di bawah ini.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

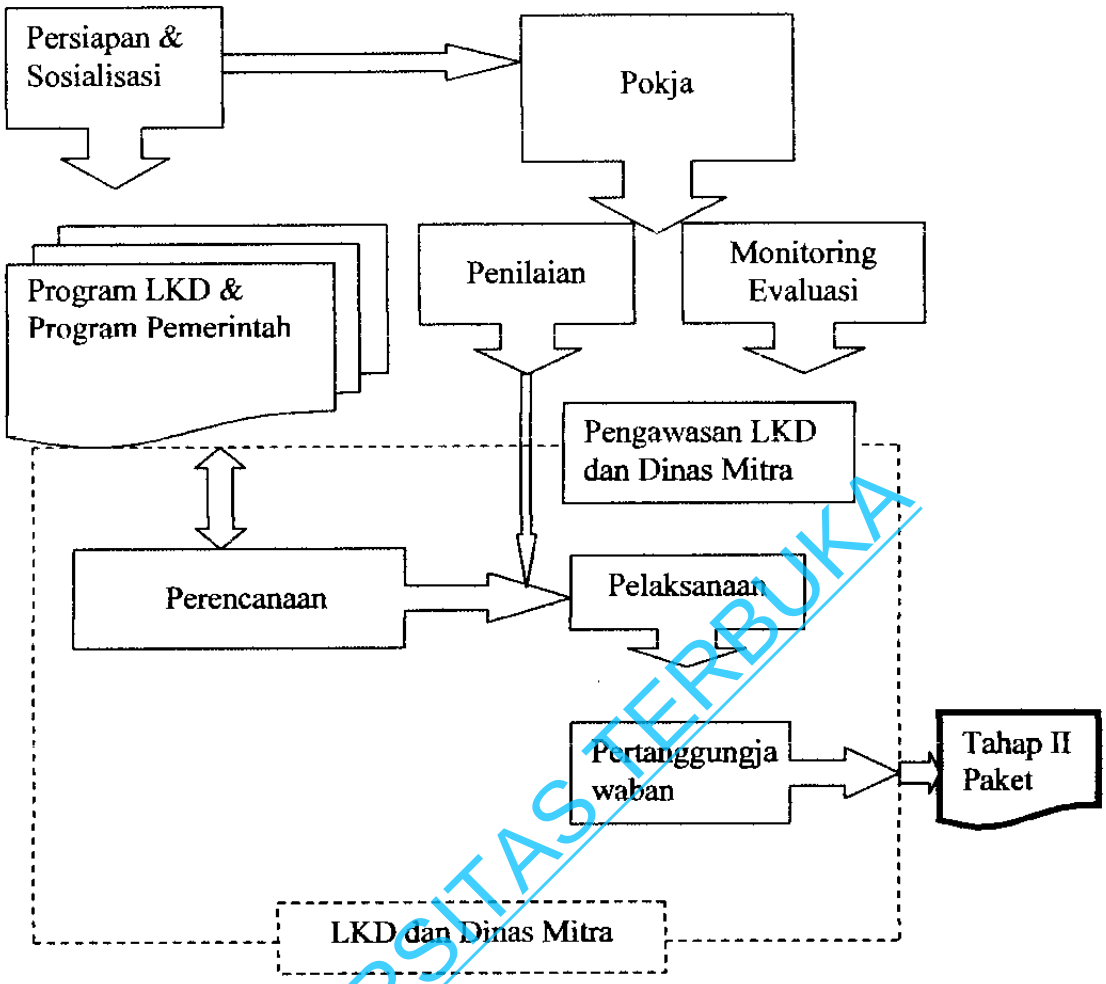

Sumber : Diolah dan Interpretasikan dari PNPM PISEW

Gambar 5.1 Kemitraan LKD dan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui PNPM PISEW

UNIVERSITAS TERBUKA

Gambar 5.2. Memperlihatkan adanya hubungan kemitraan antara LKD dan Pemerintah daerah melalui dinas, dimana LKD dan dinas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan menyatu dalam suatu wadah yang akan melakukan serangkaian

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kegiatan bersama mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertangggungjawaban kegiatan dan pengawasan kegiatan.

Membangun kebersamaan antara LKD dan Pemerintah Daerah dalam suatu wadah sebagai proses pembelajaran bersama kedua pihak. Dari proses pembelajaran tersebut, maka dapat dikembangkan prinsip-prinsip (1) pelembagaan kemitraan dan pembangunan partisipatif, khususnya dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan antara LKD dan pemerintah daerah, (2) menumbuhkembangkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kepemerintahan melalui mekanisme komunikasi timbal balik, (3) mendorong proses alih pengetahuan, sumber daya, teknologi, informasi dan lain-lain dari dinas/ instansi terkait kepada masyarakat, (4) mendorong dinas/ instansi terkait lebih memahami kultur, dinamika dan kebutuhan riil serta permasalahan masyarakat, (5) mengoptimalkan keterpaduan potensi masyarakat dengan sumber daya dan potensi yang di miliki dinas/ instansi terkait; (6) membangun kepercayaaan dan kerjasama sinergis antara LKD dengan pemerintah daerah melalui dinas/ instansi terkait.

UNIVERSITAS TERBUKA

A. Perencanaan Kegiatan

LKD mengajukan usulan kegiatan untuk mendapatkan dana PNPM PISEW. Kemitraan yang terjadi antara LKD dan Pemerintah Daerah pada awal rencana kegiatan adalah penentuan jenis kegiatan yang akan diusulkan. Penentuan kegiatan ini dilakukan bersama antara LKD dan Pemerintah Daerah. (1) Melalui rapat koordinasi tingkat kabupaten yang difasilitasi oleh BP3MD

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

bersama Pokja dan dihadiri oleh seluruh LKD dan Dinas. (2) rapat koordinasi yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Rapat ini dihadiri oleh anggota Pokja. PJOK, Pemerintah, dinas terkait dan seluruh LKD. Tahap perencanaan dapat digambarkan seperti gambar 5.2 dibawah ini :

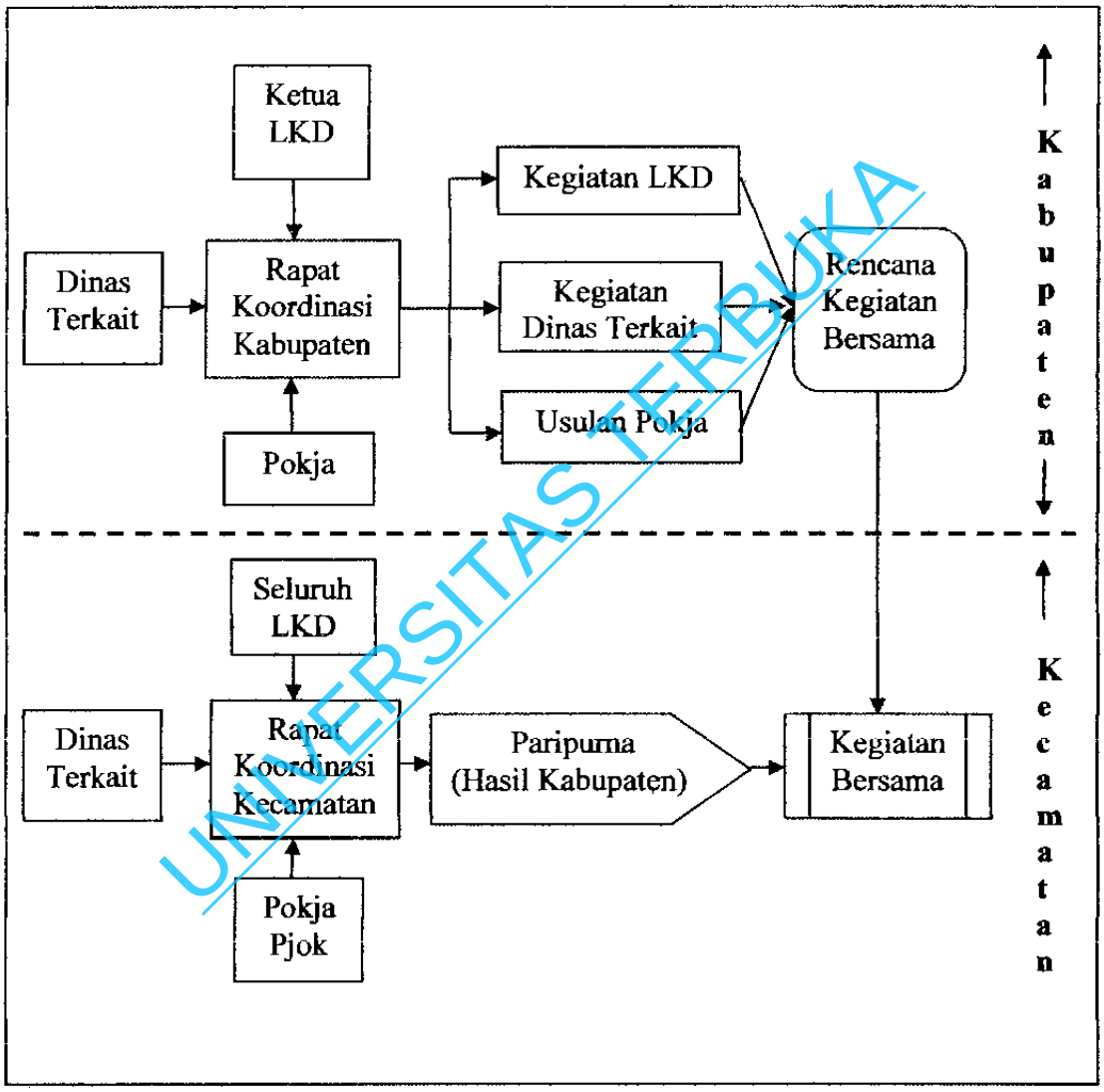

Sumber : Data diolah dari dokumen PNPM PISEW

Gambar 5.2 Skema Tahap Perencanaan PNPM PISEW

UNIVERSITAS TERBUKA

Pada tahap ini terjalin sinergi antara LKD dan dinas terkait yang telah memutuskan kegiatan-kegiatan yang akan diusulkan dan dilaksanakan secara bersama.

Kepedulian Pemerintah Daerah dalam mengakomodir hasil LKD merupakan suatu yang luar biasa dalam kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah. Kepedulian tersebut jarang terjadi karena biasanya pemerintah daerah jarang mengakomodir kebutuhan masyarakat walaupun dalam mekanisme perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa akan tetapi sangat jarang mengakomodir usulan-usulan masyarakat

1. Penyusunan proposal kegiatan

Dalam penyusunan proposal kegiatan ini akan terjalin kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait. Dalam hal ini, kedua pihak secara bersama-sama menyusun proposal sesuai dengan jenis kegiatan yang telah disepakati bersama pada awal kegiatan perencanaan. Terjalinnya kemitraan antara LKD dan pemerintah daerah diketahui dari hasil wawancara dengan salah seorang ketua LKD. Dalam wawancara itu ketua LKD menyatakan :

> " Sebelum penyusunan proposal kegiatan dilaksanakan, dinas terkait melakukan bimbingan teknis tentang pembuatan rencana detail kegiatan. LKD melakukan persiapan bahan-bahan terkait yang dibutuhkan, jadi ada kerjasama antara unsur dinas dan LKD. (Wawancara, 18-07-2012)"

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Hasil pengamatan yang dilakukan melalui dokumen rencana kegiatan seperti proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) ditemukan proposal yang berisi (1) susunan angggota; (2) lembar pengesahan; (3) penjelasan tentang pentingnya kegiatan proyek bagi masyarakat; (4) usulan kegiatan dan rencana detail kegiatan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua LKD terdapat kerjasama atau kemitraan antara unsur pemerintah dan LKD dalam penyusunan proposal kegiatan. Kemitraan yang terjalin di antara kedua belah pihak terlihat pada kesamaan peran antara kedua pihak tersebut. Pemerintah Daerah melalui dinas terkait melakukan bimbingan teknis kepada LKD terkait proposal kegiatan yang diusulkan. Hal ini juga dapat dilihat pada penandatanganan proposal yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Daerah yang diwakili oleh dinas mitra, dan perwakilan LKD. Setelah proposal kegiatan disusun bersama antara LKD dengan dinas terkait, kemudian proposal kegiatan tersebut di verifikasi dan direkomendasikan oleh Tim Verifikasi dan selanjutnya diajukan ke Pemerintah Daerah.

Proposal yang diajukan memenuhi persyaratan sesuai dengan pedoman teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW). Tahap penyusunan proposal kegiatan dapat digambarkan pada gambar 5.3 berikut ini :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

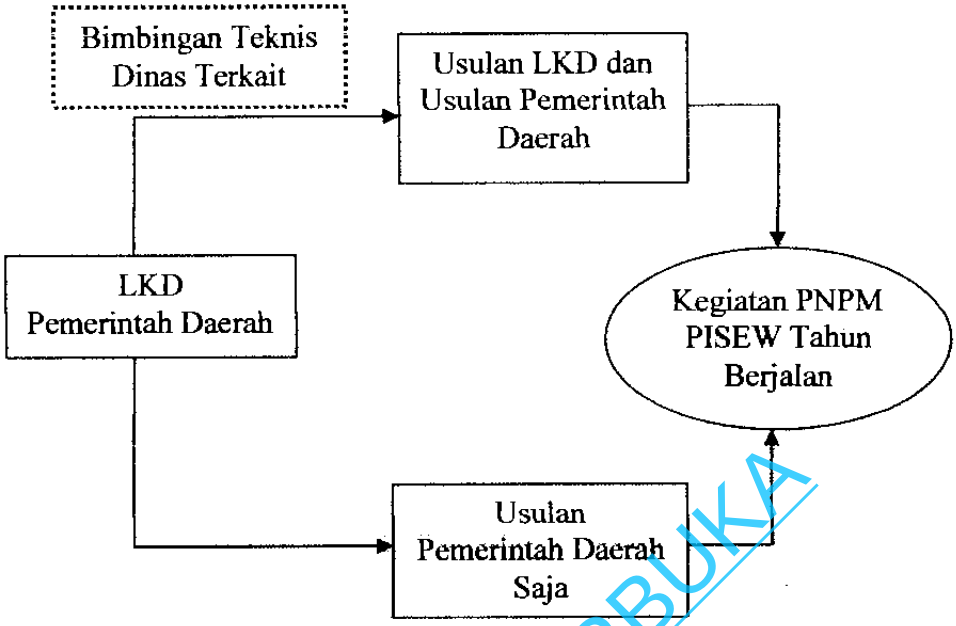

Sumber : Data diolah dari dokumen PNPM PISEW

Gambar 5.3 Skema Tahap Penyusunan Proposal PNPM PISEW

Unsur kemitraan ini melihat perbedaan antara LKD dan Pemerintah Daerah terkait dengan kepemilikan sumber daya atau kekuatan potensi salah satu pihak. Dalam organisasi kemitraan di tingkat kecamatan, ada satu pihak yang merasa mempunyai kewenangan yang besar. Mempunyai otoritas yang tinggi, atau merasa dominan karena mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan pihak lain hal ini tampak pada proses pengambilan keputusan dalam setiap tahapan penyusunan proposal kegiatan. Peran LKD dalam melaksanakan penyusunan proposal kegiatan pelaksanaannya secara umum masih belum optimal, pada awal kegiatan bisa memberikan akses luas kepada LKD, dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

pengambilan keputusan pun juga dilakukan secara demokratis, namun setelah itu dalam perjalanan selanjutnya, berbagai macam rapat dalam penyusunan proposal program kerja, ada keputusan yang mengikuti keputusan pemerintah yang mempunyai program pada tahun berjalan terutama pada kegiatan yang dana dari APBD, seperti peningkatan jalan Desa Sidoharjo sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Hal ini seperti pernyataan salah satu pejabat Dinas PU di Kabupaten Bangka Selatan :

> " Untuk *sharing dana* dari Kabupaten Bangka Selatan, biasanya mengikuti program yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Bangka Selatan tahun berjalan" (Wawancara, 18-07-2012).

Pada tahap penyusunan proposal kegiatan memiliki model kemitraan dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dengan tanpa melibatkan swasta. Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat tidak berada pada derajat atau status yang setara. Hal ini ditunjukkan oleh hubungan peran yang tidak setara antara keduanya. Dalam hal ini pemerintah berada pada level perencana dan donator yaitu sebagai menentukan petunjuk teknis dan mendanai program. Sedangkan masyarakat pada level program lokal, yang mana bisa mengusulkan kegiatan yang dibutuhkan. Pemerintah memberikan fasilitasi kebutuhan tenaga konsultan yang didistribusikan ke desa-desa, yaitu sebagai konsultan yang bertugas mendampangi LKD. Dapat disimpulkan kemitraan yang dilakukan, masing-masing aktor berada pada level yang berbeda, dan memainkan peran yang berbeda pula.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

2. Pengajuan proposal kegiatan

Proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) yang telah di susun oleh LKD sebelum diajukan untuk mendapatkan dana, terlebih dahulu diverifikasi menyangkut kelengkapan dan kebenaran pengisian data secara berjenjang yang dimulai dari Tim Fasilitator Kecamatan, TTI, POKJA, PJOK sampai pada unsur Dinas PU. Setelah dilakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen tersebut, ditemukan adanya kemitraan dinas/ instansi terkait pemerintah dengan LKD melalui satu bagian yang tidak terpisahkan.

Pada tahap ini keberadaan dinas mitra dan LKD yang merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan, selain itu juga keterlibatan Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat sebagai unsur pemerintah di tingkat kecamatan memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan di wilayah kerjanya dapat berjalan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain hal tersebut, kemitraan juga terjadi pada saat tim Verifikasi melakukan pemeriksaaan terhadap proposal, ini dapat terlihat pada struktur anggotanya yang terdiri pemerintah daerah, masyarakat dan konsultan. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk kemitraan yang dibangun di dasarkan atas prinsip kebersamaan karena kedua pihak mempunyai tanggungjawab yang sama dan prinsip kesetaraan karena kedua pihak berada pada posisi yang setara. Tahap pengajuan proposal kegiatan seperti gambar 5.4 berikut ini:

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

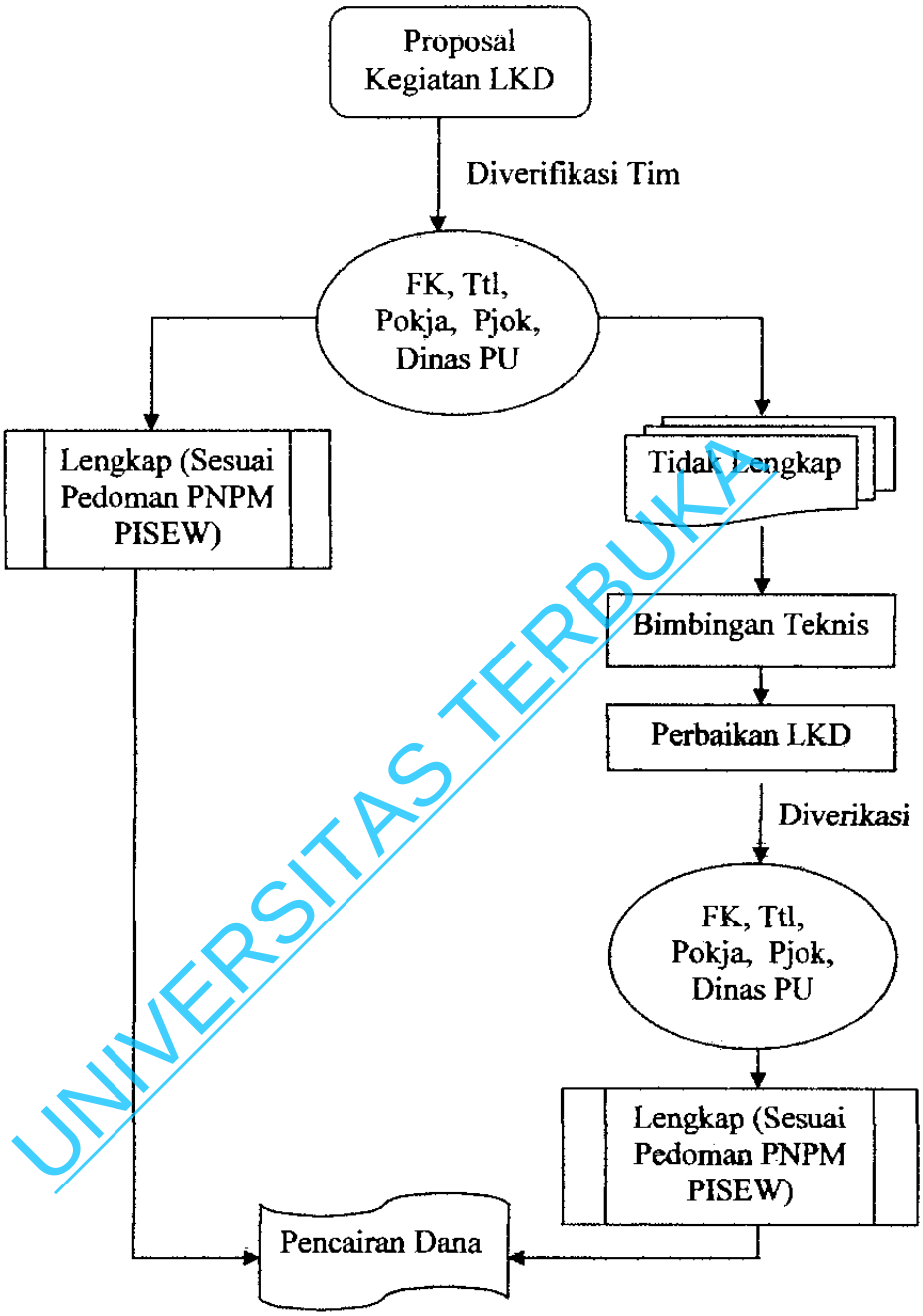

UNIVERSITAS TERBUKA

Sumber : Data diolah dari dokumen PNPM PISEW

Gambar 5.4 Skema Tahap Pengajuan Proposal PNPM PISEW

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

3. Pencairan dana

Setelah proposal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) dan dokumen pencairan dana diverifikasi oleh Tim Verifikasi, pada proses selanjutnya dilakukan pencairan dana.

Ketua LKD mengajukan permintaan pembayaran kepada PPK PISEW, dengan melampirkan dokumen (back up data) yang telah disetujui Konsultan Teknis (FK dan TtI) dan memberikan nomor rekening Bank LKD. Atas dasar pengajuan dokumen permintaan dana dari LKD maka PJOK akan memberikan verifikasi setelah memeriksa kelengkapan dokumen dan kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada PPK PISEW.

PPK PISEW mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) ke KPA, dengan melampirkan dokumen SP3, BAP, surat rekomendasi, rencana jadwal kerja dan kwitansi pembayaran. KPA menerbitkan SPM-LS setelah dilakukan pengujian atas SPP yang diajukan.

KPPN menerbitkan SP2D-RK dan mengirimkannya ke Bank Operasional Mitra Kerja KPPN. Bank Operasional Mitra Kerja KPPN mentransfer dana ke rekening ketua LKD. LKD dapat segera memanfaatkan dana yang tersedia di rekening LKD. Mekanisme pencairan dana tersebut dapat di gambarkan 5.5 sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

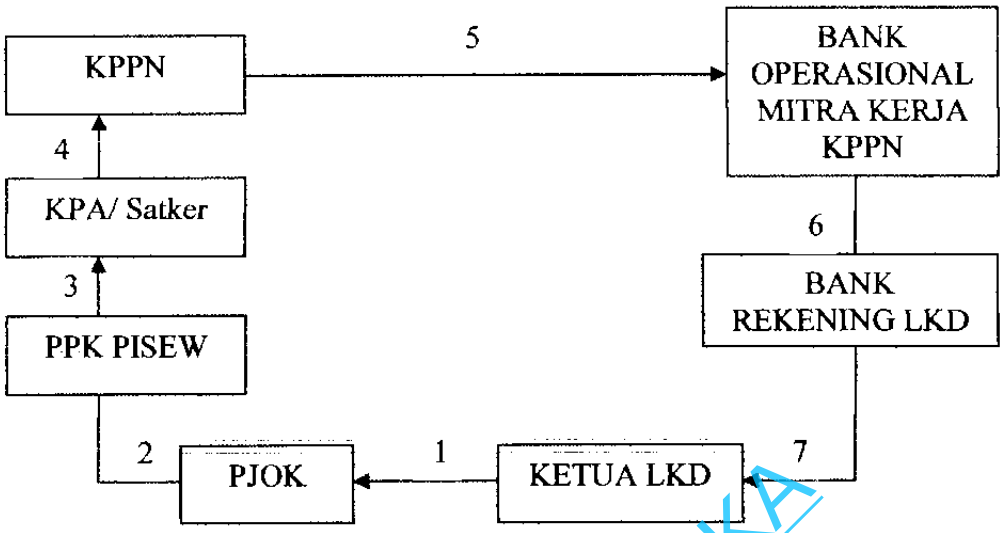

Sumber : Buku Panduan PNPM PISEW

Gambar 5.5 Mekanisme penyaluran dan pencairan dana PNPM PISEW

Dalam pelaksanaan dilapangan tata cara pencairan dana PNPM PISEW dengan pengaturan pembayaran sebanyak empat tahap pencairan. Setelah SP3 ditandatangani oleh PPK dan LKD maka LKD dapat mengajukan permintaan uang muka sebagai pembayaran tahap pertama kepada PPK di Kabupaten yang akan mengajukan SPP langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan selanjutnya KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor perbandaharaan Negara (KPPN). SPP-LS tahap I sebesar 30% dari nilai SP3 tanpa jaminan bank garansi, dengan lampiran :

a. SP3 (Form LKD-6)

b. Surat Rekomendasi Camat (Form LKD-5a)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

c. Pakta Integritas (Form LKD-13)

d. Rencana Jadwal Pelaksanaan (Form LKD-8f)

e. Berita Acara Pembayaran Uang Muka (Form LKD-10.a.1)

Pencairan Tahap II dan III masing-masing sebesar 30% dari nilai SP3 dapat diajukan setelah prestasi pekerjaan mencapai 40% dan 80% dengan dilampirkan :

a. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)

b. Berita Acara Prestasi Pekerjaan (Form LKD-.10.c)

c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD-10.d)

d. Kwitansi Pembayaran Angsuran tanpa materai (form LKD-10.b)

e. Rencana Penggunaan Dana (form LKD-10.a)

Pencairan Tahap IV sebesar 10% dari nilai SP3 dapat diajukan setelah prestasi pekerjaan selesai mencapai 100% dengan dilampiri :

a. Berita Acara Pembayaran/ Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)

b. Berita Acara Prestasi pekerjaan (Form LKD-10.c)

c. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD 10.d)

d. Kwitansi Pembayaran Angsuran Tanpa materai (Form LKD-10.b)

e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari LKD ke PPK (Form LKD-11.a)

f. Foto dokumentasi pelaksanaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau station (STA) yang sama

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

g. Rencana kegiatan Operasional dan Pemeliharaaan (OP) oleh Tim OP yang dibentuk berdasarkan rembug Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di tingkat desa.

Kemitraan yang terjadi dalam proses pencairan dana tersebut sesuai dengan penelusuran terhadap dokumen pencairan dana, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bertindak atas nama Pemerindah Daerah sebagai Pihak Pertama melakukan perjanjian dengan pihak kedua yaitu Ketua LKD dan Kepala Dinas. Kedua belah pihak sepakat melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Ketua LKD dan Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Dinas terkait menjadi satu bagian yang tidak dapat dipisahkan (Pihak kedua) melakukan perjanjian dengan PJOK selaku pihak pertama. Bahwa kedua pihak baik LKD dan dinas mitra bertangggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan, mematuhi berbagai ketentuan yang berlaku dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan beserta dana yang telah digunakan secara transparan. Demikian juga dalam rekening dana bantuan atas nama LKD, dimana *spesiment* tanda tangan terdiri dari Ketua LKD dan perwakilan dinas terkait, sehingga setiap penarikan dana di bank harus ditanda tangani oleh kedua pihak.

Setelah selesai dokumen yang digunakan untuk mencairkan dana untuk memulai pelaksanaan kegiatan di verikasi, saat pengajuan pencairan dana haruslah menunggu semua dokumen masuk sebanyak 7 (Tujuh)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan ke Bank mitra. Pada tahap ini sering terjadi keterlambatan memasukan dokumen dari LKD. Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan pencairan dana termin pertama dan terakumulasi pada pembuatan pertanggungjawaban program untuk pencairan termin kedua, hal ini seperti dikatakan oleh PJOK Kecamatan sebagai berikut :

> " Kami menerima kebijakan Bank yang baru mau mencairkan dana setelah semua dokumen terkumpul tetapi kami mengharapkan kesadaran dari kawan-kawan LKD untuk kerjasamanya sehingga tidak menggangu kegiatan lain yang mau dijalankan "(Wawancara, 18-07-2012).

B. Tahap pelaksanaan

Sebelum pekerjaan kegiatan proyek PNPM PISEW dilaksanakan, LKD melakukan pertemuan dengan warga untuk membahas pelaksanaan pekerjaan proyek, seperti yang dikemukan oleh salah seorang anggota LKD sebagai berikut :

> " Sosialisasi dilaksanakan sebelum kegiatan PNPM-PISEW di kerjakan untuk menginformasikan pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya LKD menyusun jadwal kerja, rencana kebutuhan dana dan tenaga". (Wawancara, 18-07-2012).

Pertemuan yang dilaksanakan oleh LKD dengan warga masyarakat selain membicarakan hal-hal tersebut, juga menyepakati bentuk swadaya masyarakat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan proyek. Dari hasil pengamatan melalui catatan/ notulen rapat yang diselenggarakan oleh LKD tersebut,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ditemukan kesepakatan menyangkut tugas-tugas yang harus dilakukan oleh LKD, yaitu :

1. Mengadakan/ menyediakan bahan-bahan yang berhubungan dengan pekerjaan proyek termasuk tenaga kerja dan peralatan kerja
2. Mengelola administrasi dan keuangan proyek
3. Mengawas jalannya pengerjaan proyek

Sebagai wujud transparansi pelaksanaan pengerjaan proyek kepada masyarakat, masyarakat dapat melibatkan diri dalam pengerjaan proyek mulai dari pengadaan atau penyediaan bahan, pengerjaan proyek, sampai pada pengawasan pengerjaan proyek. Hal ini dilakukan agar mereka mengetahui setiap dana yang keluar untuk pengerjaan proyek tersebut.

Aktivitas kemitraan yang dilakukan oleh LKD dan pemerintah Daerah adalah kedua pihak bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek, tidak terbatas pada pembagian tugas. Sebagai wujud tanggung jawab dinas mitra sebagai lembaga yang mengetahui atau lembaga yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dinas mitra melakukan bimbingan secara terus menerus terhadap panitia terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas kepanitiaan. Upaya ini dilakukan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan memahami cara melakukan suatu pekerjaan dengan baik, disamping itu juga terjalin komunikasi timbal balik dan proses konsultatif.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Realisasi Kegiatan

Pelaksanaan pekerjaan proyek yang didanai PNPM PISEW dapat terlihat dalam gambar 5.6 pada peta wilayah Kecamatan Airgegas :

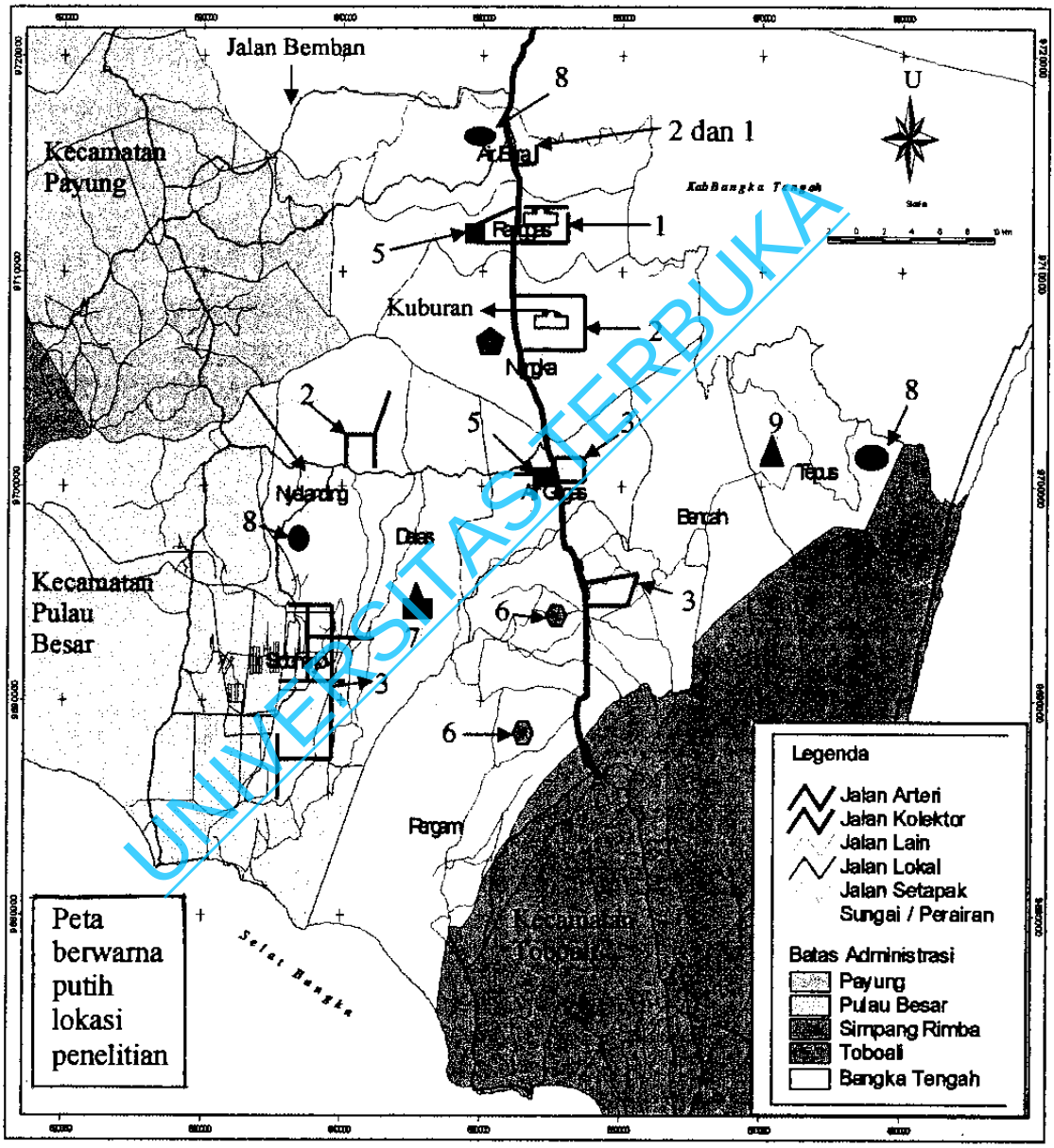

Gambar 5.6 Peta Lokasi Realisasi Program PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas

UNIVERSITAS TERBUKA

13/40951.pdf

Legenda Peta :

1. Talud Penahan Tanah
2. Parit Pasangan Batako
3. Pembangunan Jalan Tanah
4. Pembangunan Jalan Paving Blok
5. Pembangunan Jembatan Beton
6. Pembangunan Posyandu Desa
7. Pembangunan Pasar Desa
8. Pembangunan Sarana Pemandian Umum
9. Pembangunan MCK

Paparan realisasi kegiatan kemitraan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) sebagai berikut :

a. Talud Penahan Tanah

Pembuatan talud penahan tanah yang merupakan bagian dari kegiatan PNPM PISEW disesuaikan dengan kondisi geografis desa. Secara geografis, desa Airbara dan Ranggas termasuk daerah yang kondisi tanahnya tidak stabil. Kondisi geografis seperti ini rentan dengan robohnya tanah. Karena itu, beberapa masyarakat di desa tersebut merekomendasikan pembangunan talud penahan tanah sebagai kegiatan prioritas. Realisasi pekerjaan Talud Penahan Tanah Paket 1 dan 2 di Desa

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Airbara Senilai Rp. 82.600.000,- dan Talud Penahan Tanah Paket 1 dan 2 di Desa Ranggas senilai Rp. 81.800.000,-. Lokasi pembangunan talud penahan tanah dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

b. Parit Pasangan Batako

Keberadaan parit pasangan batako di kompleks pemukiman penduduk adalah untuk mengatasi masalah genangan air di jalan.. Namun demikian, dibeberapa loksi, parit ini dijadikan sebagai tempat pembuangan air limbah. Realisasi pekerjaan Parit Pasangan Batako Paket 1 dan 2 di Desa Airbara senilai Rp. 65.000.000,- dan Parit Pasangan Batako Paket 1 dan 2 di Desa Nangka senilai Rp. 74.600.000,- serta Parit pasangan Batako Paket 1 sampai 3 di Desa Nyelanding senilai Rp. 114.000.000,-. Lokasi pembangunan parit pasangan batako dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

c. Pembangunan Jalan Tanah

Nilai strategis dari tersedianya sarana prasarana dalam bentuk jalan adalah mendukung aktivitas keseharian masyarakat. Jalan merupakan kebutuhan yang tidak kalah penting dengan kebutuhan saranan prasarana lainnya. Hal ini tercermin melalui PNPM PISEW Tahun 2012 Pembangunan Jalan Tanah Puru Paket 1 s/d 7 di Desa Airgegas senilai Rp.304.500.000,- dan Penimbunan Jalan Tanah Puru Paket 1 dan 2 di Desa Bencah senilai Rp. 87.000.000,-. Peningkatan Jalan Tanah Puru Paket I sampai Paket 7 di Desa Sidoharjo senilai Rp. 287.700.000,- serta

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

peningkatan jalan Sidoharjo senilai Rp. 2.000.000.000,-. Lokasi pembangunan jalan tanah dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

d. Pembangunan Jalan Paving Blok

Kegiatan pembangunan jalan paving blok merupakan salah satu pilihan kegiatan yang diusulkan dalam program PNPM PISEW. Kegiatan pembangunan jalan paving blok dilaksanakan mengingat kondisi jalan ekonomi yang ramai dilalui masyarakat tapi dalam kondisi berair dan licin. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini dirasakan oleh 250 orang. Pembangunan Jalan Paving Blok dilakukan di Desa Nyelanding senilai Rp. 40.900.000,-. Lokasi pembangunan jalan paving block dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

e. Pembangunan Jembatan Beton

Penduduk Desa Airgegas dan Desa Ranggas sebagian besar adalah petani. Pembangunan jembatan beton merupakan salah satu kebutuhan dasar sebagian besar masyarakat petani karena dampak langsung dari keberadaan jembatan sangatlah membantu dalam perlancar arus barang dan jasa. Pembangunan Jembatan Beton di Desa Airgegas senilai Rp. 44.200.000,- dan Desa Ranggas senilai Rp. 44.200.000,-. Lokasi pembangunan jembatan beton dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

f. Pembangunan Posyandu Desa

Kegiatan sosial lain yang direkomendasikan oleh masyarakat dalam program PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas salah satunya yaitu

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan memberikan perhatian kepada kesehatan ibu dan anak yang ada. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan Pembangunan Posyandu di Desa Bencah senilai Rp. 50.000.000,- dan di Desa Pergam senilai Rp. 50.000.0000,-. Lokasi pembangunan posyandu desa dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

g. Pembangunan Pasar Desa

Salah satu aspek yang juga menjadi perhatian masyarakat dalam program PNPM PISEW adalah perhatian kepada kelompok usaha ekonomi pedesaan. Bentuk kegiatan tersebut adalah dengan memberikan peluang tempat usaha bersama dengan dibangunnya pasar desa. Penyerapan dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Desa di Desa Delas senilai Rp. 36.400.000,-. Kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat desa delas dan sekitarnya. Lokasi pembangunan pasar desa dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

h. Pembangunan Sarana Pemandian Umum

Sarana Pemandian Umum merupakan kebutuhan masyarakat yang penting. Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan sarana pemandian umum yang dilakukan PNPM PISEW mendapat dukungan dari masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya antusias masyarakat sebagai wujud pemberian dukugan atas program tersebut. Pembangunan Sarana Pemandian Umum dilakukan di Desa Nyelanding senilai Rp. 34.100.000,- dan Desa Tepus

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

senilai Rp. 30.400.000,-. Lokasi pembangunan sarana pemandian umum dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

i. Pembangunan MCK

Kebutuhan masyarakat akan keberadaan sarana MCK di Desa Tepus tidak kalah pentingnya deangan kebutuhan akan prasarana dasar lingkungan yang lain. Pembangunan MCK dilakukan menghindari perilaku buruk sebagian masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan hajat. Total realisasi pembangunan MCK dalam pelaksanaan kegiatan ini 1 paket yaitu di Desa Tepus senilai Rp. 40.000.000,-. Lokasi pembangunan MCK dapat dilihat pada gambar 5.6 diatas.

C. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan suatu keharusan sebagai wujud tanggungjawab yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaaan administrasi kegiatan dan keuangan. Prinsip pertanggungjawaban dalam hubungan kemitraan secara kelembagaan menjadi akhir dari keseluruhan proses interaksi. Setelah melewati proses sepanjang rentang waktu yang disepakati, hubungan yang dibangun berdasarkan prinsip kepercayaan akan dipertanggungjawabkan. Melalui prinsip tersebut, semua pihak yang terlibat mendapatkan kesempatan untuk memberikan bukti atas pelaksanaan semua komitmen yang telah disepakati bersama dan pencapaian hasil-hasilnya.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dilakukan bersama-sama dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait meliputi seluruh yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya serta pengelolaan kegiatan.

Dalam rapat LKD, ketua LKD membacakan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan proyek. Telaah terhadap dokumen laporan pertanggungjawaban berisi laporan realisasi kegiatan proyek dengan realisasi pendanaan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat. Pertangggungjawaban terutama terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan jumlah dana, penerima dana, realisasi pembelanjaan. Di samping itu juga pertanggungjawaban dalam kemitraan meliputi pengelolaan kegiatan yang dilaksanakan.

UNIVERSITAS TERBUKA

D. Tahap Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program. Bentuk dari kegiatan pengawasan ini bisa berupa :

1. Pemantauan langsung/ kunjungan ke lapangan
2. Pemantauan terhadap laporan/ surat/ email
3. Pemantauan berdasarkan informasi per telepon atau sarana komunikasi lainnya.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Secara umum tujuan dari pelaksanaan pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui pelaksanaan program, apakah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
2. Mengetahui hambatan/ permasalahan yang terjadi dan bagaimana mengatasi masalah tersebut
3. Mengetahui sejauh mana kemajuan/ progress atau hasil-hasil program yang telah dicapai
4. Mendapatkan umpan balik bagi penyempurnaan pelaksanaan program.

Muatan dari kegiatan pengawasan ini bisa ditambahkan dengan memberikan penguatan kepada institusi/ lembaga atau personal/ individu terhadap materi/ teknis pelaksanaan yang dirasakan masih kurang. Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan bisa dilakukan secara bersama, yang biasa disebut pengawasan terpadu yaitu dinas mitra, Fasilitator Kecamatan (FK), Ttl, LKD, masyarakat dan Tim Monitoring dan Evaluasi PNPM PISEW. Pada tahap ini terjalin kerjasama dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan sehingga semua kegiatan dalam program bisa terpantau dan terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.

Kesadaran tentang peran dan kapasitas perempuan dalam kegiatan infrastruktur belum terwujud di Kecamatan Airgegas. Kegiatan infrastruktur yang umumnya identik dengan kegiatan kaum laki-laki, masih menjadi hambatan bagi kaum perempuan yang tergabung dalam LKD PKK untuk mengambil peran

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan peningkatan jalan oleh PNPM PISEW, hal ini sebagaimana di kemukakan ketua LKD PKK Airgegas sebagai berikut :

> " Bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini LKD berkeyakinan bahwa laki-laki lebih mampu untuk melaksanakan program terutama dalam kegiatan fisik yang memerlukan tenaga seperti pembuatan jalan baru" (Wawancara, 18-07-2012).

Gambaran kemitraan yang diuraikan di atas memperlihatkan pola hubungan kebersamaan antara LKD dan pemerintah daerah melalui program PNPM PISEW dalam upaya penangggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan teknis, pendanaan, komunikasi, informasi dan edukasi. Bentuk kemitraan yang dilakukan yaitu kebersamaan dalam kegiatan PNPM PISEW mulai dari perencanaan dalam menentukan dan menyusun kegiatan, melaksanakan kegiatan, pertangggungjawaban kegiatan sampai pada pengawasan kegiatan.

Kemitraan merupakan aktifitas bersama di antara dua pihak atau lebih yang berkepentingan dalam mencapai tujuan bersama dan di dasarkan pada pengenalan kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penangggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama, maka dilakukan suatu kerjasama untuk mencapai tujuan, karena kedua pihak menyadari penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Untuk itu, jalan pelaksanaannya dipandang penting melibatkan unsur-unsur terkait seperti

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

LKD dan pemerintah dalam suatu bentuk kemitraan. LKD di nilai pemerintah cukup aktif dan respon dalam persoalan penanggulangan kemiskinan.

Demikian juga, Pemerintah daearah di nilai LKD memiliki kepedulian terhadap penanggulangan kemiskinan dengan mengalokasikan dana melalui APBD. Kepedulian pemerintah diwujudkan pula dalam bentuk pengakomodasian program-program masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Airgegas telah menumbuhkan kepercayaan kepada LKD untuk mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sebaliknya, LKD menjaga kepercayaan tersebut dengan melaksanakan kegiatan dengan baik sebagaimana tergambar dalam tabel 5.2 berikut ini :

Tabel 5.2 Rekapitulasi Realisasi Program PNPM PISEW Tahun 2009, 2010, 2011, 2012

No	Nama Kegiatan	Tahun	Volume	Lokasi	Biaya
1	Pembukaan Jalan Lingkar Desa Air Gegas	2009	3000 m	Desa Air Gegas	150,000,000.00
2	Jalan Tembus/Pengerasan Tanah Puru Desa Air gegas	2009	1000 m	Desa Air Gegas	131,000,000.00
3	Gorong' Desa Air Gegas	2009	12 Unit	Desa Air Gegas	32,000,000.00
4	Pembuatan Siring Sidoharjo	2009	200 m	Desa Sidoharjo	50,000,000.00
5	Gorong" desa Sidoharjo	2009	54 buah	Desa Sidoharjo	113,400,000.00
6	Pembukaan Jalan Desa	2009	1000 m	Desa Nangka	50,000,000.00
7	Pembuatan Jalan Baru	2009	1000 m	Desa Air Bara	50,000,000.00

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Lanjutan Tabel 5.2

No	Nama Kegiatan	Tahun	Volume	Lokasi	Biaya
8	Peningkatan Jalan Desa Pergam	2009	1500 m	Desa Pergam	196,000,000.00
9	Jalan Setapak	2009	1130 m	Desa Tepus	195,000,000.00
10	Pembukaan Jalan Baru	2009	3000 m	Desa Ranggas	109,600,000.00
11	Pembukaan Jalan Baru	2009	1000 m	Desa Bencah	63,000,000.00
12	Jalan Semeninasi	2009	340 m	Desa Nyelanding	50,000,000.00
13	Pembuatan Pasar Rakyat	2009	8 x 4	Desa Air Bara	50,000,000.00
14	Pembuatan Posyandu	2009	6 x6	Desa Air Bara	50,000,000.00
15	Pembuatan Posyandu	2009	6 x6	Desa Ranggas	50,000,000.00
16	Penambahan HU PAM dsn III Dan II	2009	9 Unit	Desa Delas	160,000,000.00
17	Pembuatan Posyandu	2010	1 Unit	Desa Tepus	50,000,000.00
18	Plat Deucker (1 x 1 x 2)	2010	1 Unit	Desa Tepus	22,114,000.00
19	Gorong" desa Sidoharjo	2010	3 Unit	Desa Sidoharjo	113,000,000.00
20	Plat Deucker 2 Paket	2010	2 Unit	Desa Pergam	61,680,000.00
21	Pengerasan Tanah Puru Jl.Inveksi Sawah	2010	1 Km	Desa Pergam	125,000,000.00
22	Talud Jembatan Jalan Pasar	2010	0.130 km	Desa Delas	50,000,000.00
23	Peningkatan Jalan Tanah Puru	2010	1500	Desa Air Gegas	200,000,000.00
24	Gorong" Desa Air Gegas	2010	1 Unit	Desa Air Gegas	50,000,000.00
25	Siring Jalan	2010	300 m	Desa Air Gegas	109,000,000.00

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lanjutan Tabel 5.2

No	Nama Kegiatan	Tahun	Volume	Lokasi	Biaya
26	Pembuatan Jalan Baru	2010	1.5 km	Desa Nyelanding	138,779,000.00
27	Penimbunan Tanah Puru	2010	1000 m	Desa Nyelanding	125,000,000.00
28	Jembatan Beton	2010	1 Unit	Desa Nangka	50,000,000.00
29	Rabat Beton	2010	500 m	Desa Bencah	80,000,000.00
30	Siring Jalan	2010	345	Desa Bencah	125,427,000.00
31	Jembatan Beton	2010	3 Unit	Desa Ranggas	150,000,000.00
33	Pembangunan Jembtan Beton	2011	I Unit	Desa Air Gegas	42,496,000.00
34	Penimbunan Tanah Puru	2011	1650 m	Desa Air Gegas	150,000,000.00
35	Pembukaan Jalan Baru	2011	1500 m	Desa Air Gegas	100,000,000.00
36	Parit Pasangan Batu	2011	210 m	Desa Bencah	50,000,000.00
37	Parit Pasangan Batu	2011	210 m	Desa Nangka	50,000,000.00
38	Posyandu	2011	1 Unit	Desa Delas	50,000,000.00
39	Parit Pasangan Batu	2011	400 m	Desa Nyelanding	100,000,000.00
40	Pembukaan Jalan Baru	2011	2 Paket	Desa Nyelanding	90,160,000.00
41	Pembukaan Jalan Baru	2011	4 Paket	Desa Pergam	186,040,000.00
42	Parit Pasangan Batu	2011	200 m	Desa Pergam	50,000,000.00
43	Pembuatan MCK	2011	2 Unit	Desa Pergam	50,000,000.00
44	Pembuatan Talud	2011	152 m	Desa Ranggas	48,875,000.00

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lanjutan Tabel 5.2

No	Nama Kegiatan	Tahun	Volume	Lokasi	Biaya
45	Pembuatan MCK	2011	1 Unit	Desa Ranggas	35,979,000.00
46	Pembuatan MCK	2011	2 Unit	Desa Ranggas	46,450,000.00
47	Parit Pasangan Batu	2011	1,295	Desa Sidoharjo	350,000,000.00
48	Parit Pasangan Batu	2011	190 m	Desa Tepus	50,000,000.00
49	Parit Pasangan Batu	2011	200 m	Desa Air Bara	50,000,000.00
50	Pem. Talud penahan tanah	2012	120 m	Desa Air Bara	82,600,000.00
51	Parit pasangan Batako	2012	160 m	Desa Air Bara	65,100,000.00
52	Pembuatan Sarana Pemandian Umum	2012	1 Unit	Desa Air Bara	32,500,000.00
53	Pembangunan Jalan Tanah Puru	2012	3.850	Desa Air Gegas	304,500,000.00
54	Pembangunan Jembtan Beton	2012	4 x 4,5 m	Desa Air Gegas	44,200,000.00
55	Pembangunan Posyandu	2012	1 Unit	Desa Bencah	50,000,000.00
56	Penimbunan Jalan Tanah Puru	2012	1,100	Desa Bencah	87,000,000.00
57	Pembangunan Pasar Desa	2012	1 Los	Desa Delas	36,400,000.00
58	Parit pasangan Batako	2012	300 m	Desa Nangka	74,600,000.00
59	Parit pasangan Batako	2012	459	Desa Nyelanding	114,000,000.00
60	Pembangunan Jalan Paving Blok	2012	190 m	Desa Nyelanding	40,900,000.00
61	Pembuatan Sarana Pemandian Umum	2012	1 Unit	Desa Nyelanding	34,100,000.00
62	Pembangunan Posyandu	2012	1 Unit	Desa Pergam	50,000,000.00

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lanjutan Tabel 5.2

No	Nama Kegiatan	Tahun	Volume	Lokasi	Biaya
63	Pem. Talud penahan tanah	2012	300 m	Desa Ranggas	81,800,000.00
64	Pembangunan Jembtan Beton	2012	4 x 4,5 m	Desa Ranggas	44,200,000.00
65	Peningkatan Jalan Tanah Puru	2012	3,850	Desa Sidoharjo	287,700,000.00
66	Pembangunan MCK	2012	1 Unit	Desa Tepus	40,000,000.00
67	Pembuatan Sarana Pemandian Umum	2012	1 Unit	Desa Tepus	30,400,000.00
	Total				**6.000.000.000,00**

Kerjasama antara LKD dengan Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dalam wadah kemitraan, mengindikasikan bahwa adanya persekutuan antara dua pihak yang bekerjasama yang pada akhirnya diidentifikasi sebagai bentuk kemitraan (*partnership*). Hal ini berarti dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Bentuk kemitraan yang terjadi antara LKD dengan Pemerintah Daerah dalam program penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program PNPM PISEW. Dalam program ini terutama dalam tahap perencanaan (pengajuan proposal dan pencairan dana), pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan dan pengawasan kegiatan, kedua belah pihak berada pada posisi yang seimbang. Artinya,

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

kedua belah pihak memiliki peran yang sama. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa dalam penentuan kegiatan baik pada tahap perencanaan kegiatan khususnya pada pengajuan proposal kegiatan dan pencairan dana, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap pertanggungjawaban hasil kegiatan maupun pengawasan kegiatan, kedua pihak memiliki peran yang sama. dengan kata lain, inisiasi tidak hanya datang dari salah satu pihak saja, tetapi juga berasal dari kedua pihak. Demikian juga, dalam kepemilikan sumber daya, kedua pihak mempunyai kesamaan dalam kepemilikan sumber daya.

Bentuk kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah tidak membedakan besaran atau volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Perhatian utama adalah potensi yang dimiliki kedua pihak yang saling mengisi satu dengan lainnya dalam program PNPM PISEW sehingga kedua pihak memiliki tujuan yang sama. Hubungan kemitraan ini terjalin secara liniear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Bentuk kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah adalah bentuk kemitraan yang dilakukan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan. Prinsip kebersamaan yang dimaksud adalah bahwa tidak ada perbedaan status atau kekuatan. Kedua pihak melakukan kreativitas bersama dan kedua pihak saling membutuhkan. Akibatnya, tercipta adanya ketergantungan satu sama lain karena potensi yang dimiliki, terbatas walaupun mempunyai kesamaan. Selain itu, kedua pihak juga mempunyai tujuan yang sama dan kedua pihak saling mendapatkan manfaat dan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

memberi manfaat dalam mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kemiskinan secara bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahap perencanaan khususnya pada pengajuan proposal kegiatan dan pencairan dana, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban kegiatan dan pengawasan kegiatan, bentuk kemitraan yang terjadi antara LKD dengan Pemerintah Daerah melalui program PNPM PISEW mengandung unsur (1) kedua pihak berada pada posisi yang sama dan tidak tersubordinasi antara satu dengan yang lain; (2) melakukan kerja sama yang seimbang; (3) kedua pihak mendapatkan manfaat; (4) kedua pihak mempunyai potensi yang relatif sama; (5) visi misi saling mengisi sehingga mempunyai kesamaan tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk kemitraan LKD dengan Pemerintah Daerah lebih mengarah ke bentuk *mutualistik*.

Prinsip mendasar dan utama dari kemitraan secara kelembagaan adalah saling percaya (*mutual trust*) di antara kedua pihak yang terlibat di dalamnya. Berpijak pada prinsip tersebut, LKD dan Pemerintah Daerah melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama dengan sejumlah sumber daya yang dimiliki dengan tetap menghargai identitas masing-masing pihak. Selain prinsip saling percaya yang menjadi dasar terbangunnya kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah, terdapat nilai-nilai lainnya yang terbangun sebagai penentu bentuk kemitraan antara kedua pihak seperti kesamaan visi, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Berikut ini akan dijelaskan nilai-nilai dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

E. Kesamaan Visi

Kedua pihak memiliki visi yang sama, LKD dengan visinya "*Terwujudnya masyarakat yang sejahtera, damai dan kompetitif dengan didukung oleh agribisnis dan pariswisata*". Sedangkan Kecamatan Airgegas dengan visinya "*Terwujudnya Airgegas Sejahtera, Terdepan Dalam Layanan Menuju Pemerintahan Yang Amanah, Bersih Dan Berwibawa*". Sehingga kalau dipadukan kedua visi tersebut mempunyai kesamaan terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mewujudnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui program penanggulangan kemiskinan terpadu. Kesamaan visi diwujudkan dalam aktivitas kemitraan yang dilakukan oleh kedua pihak dari tahap perencanaan khususnya pengajuan proposal dan pencairan dana, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pengawasan kegiatan. Perwujudan dari unsur kemitraan ini adalah pemerintah yang merumuskan dan membuat kebijakan program PNPM PISEW dan didukung oleh kemampuan pendanaan yang dilakukan melalui mekanisme penyertaan dana (sharing dana), kemampuan pengetahuan, ketersediaan program, dan kemampuan SDM yang handal (tenaga ahli). LKD dengan program, swadaya, tenaga kerja, dan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman. Potensi yang dimiliki oleh kedua pihak digunakan untuk mewujudkan visi yaitu masyarakat yang sejahtera, sehingga kemitraan yang terjalin, kedua pihak mempunyai visi yang sama dan saling memperkuat. LKD diakomodir oleh pemerintah karena pemerintah sendiri mempunyai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

program yang sama, kemudian dalam implementasinya difasilitasi dengan potensi yang dimiliki oleh kedua pihak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, beberapa tanggapan yang disampaikan oleh ketua LKD :

> "…..Pada prinsipnya visi antara LKD dan Pemerintah Kecamatan Airgegas tidak beda, meskipun dalam redaksi yang berbeda tetapi intinya tetap sama yaitu bagaimana mencapai masyarakat yang sejahtera dan berdaya…"(Wawancara, 27-06-2012).

Pendapat lain yang disampaikan oleh Camat Airgegas mengatakan :

> "…Tugas Pemerintah Kecamatan Airgegas memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk mensejahterakan masyarakat, jadi siapapun pejabatnya kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, demikian juga dengan LKD sudah sejalan visinya membantu masyarakat miskin agar berdaya…."(Wawancara, 27-06-2012).

Kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah diletakkan pada konteks sinergi dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Syarat terpenting untuk itu adalah kesamaan atas persoalan yang akan diselesaikan dan cara penyelesaiannya. Kesamaan visi diperlukan dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah karena keduanya memiliki rasa kebersamaan atas persoalan yang dihadapi dan kedua pihak disatukan oleh kepentingan bersama, yaitu berkontribusi bagi penanggulangan kemiskinan.

Ditinjau dari peran yang dilakukan antara LKD dan Pemerintah Daerah dalam kemitraan ini keduanya mempunyai peran yang sama tetapi dalam implementasinya, peran dilakukan kedua pihak pada sasaran yang berbeda sesuai

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

dengan status kedua pihak. Adapun peran yang dilakukan LKD adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan strategi dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan di desa dengan :
   a. Menjaring aspirasi masyarakat LKD dan melakukan komunikasi dengan masyarakat.
   b. Merumuskan program yang ditunjang oleh kemampuan SDM yang memadai.
2. Mengorganisasi masyarakat yaitu kegiatan LKD untuk menggerakkan partisipasi dalam pembangunan masyarakat desa yang bersangkutan secara aktif mulai dari tahap perumusan program kerja, pelaksanaan kegiatan maupun pemantauan dan pengawasannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan :
   a. Melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan dan simpati dalam melibatkan masyarakat miskin dalam kegiatan LKD.
   b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah baik dalam penyusunan program maupun pelaksanaan kegiatan LKD.
   c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh BP3MD.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

3. Melakukan singkronisasi atau penyelarasan program-program penanggulangan kemiskinan LKD dan Pemerintah Daerah serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan didanai.
4. Melakukan kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan serta ikut bertanggung jawab keberhasilan program PNPM PISEW
5. Melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan, yaitu kegiatan LKD untuk memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur sampai sejauhmana penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang diukur berdasarkan rencana program tersebut. Pertanggungjawaban dilakukan melalui musyawarah bersama yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah desa. Hasil-hasil pertanggungjawaban disebarkan melalui media informasi seperti papan informasi, dan secara administrasi disampaikan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah.
6. Menjamin keterlibatan semua masyarakat miskin, yaitu kegiatan LKD untuk mengikutsertakan semua masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan tanpa memandang jenis kelaminnnya untuk mengikuti dalam kegiatan pemberdayaan program PNPM PISEW. Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus dipastikan melibatkan masyarakat miskin.

Sedangkan Pemerintah Daerah mempunyai peran sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

1. Formulasi dan arahan kebijakan program PNPM PISEW dan merealisasikan dana bantuan.
2. Melakukan pembinaan secara berjenjang dari struktur pemerintahan yang ada sampai ketingkat pemerintahan desa.
3. Melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait dalam melakukan pembinaan secara umum bagi pelaksanaan dan kelangsungan program.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain termasuk dengan LKD terkait dengan penggalangan potensi dalam pelaksanaan dan kelangsungan program.
5. Melakukan kontrol dan pengawasan secara umum pelaksanaan program serta ikut bertanggung jawab keberhasilan program PNPM PISEW
6. Pemerintah desa berperan memberikan pembinaan sekaligus mendorong bagi terwujudnya pemberdayaan masyarakat dalam program PNPM PISEW, memberikan fasilitas yang dibutuhkan bagi terwujudnya kondisi positif bagi pengembangan kegiatan LKD, serta bertanggungjawab secara umum bagi keberhasilan pemberdayaan dalam program PNPM PISEW.

UNIVERSITAS TERBUKA

F. Saling Membutuhkan

Keterbatasan potensi yang dimiliki oleh kedua pihak menimbulkan sifat ketergantungan pada kedua pihak. Keterbatasan potensi yang dimiliki oleh LKD mengharuskan LKD melakukan hubungan kerjasama dengan Pemerintah Daerah terutama dalam mengakses sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah seperti pendanaan dan SDM (tenaga ahli) untuk membiayai program-program LKD.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Demikian juga sebaliknya, LKD yang memiliki program-program yang telah direncanakan yang didukung oleh masyarakat dan data-data akurat yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan *(by name by address)* sangat dibutuhkan oleh pemerintah karena selama ini pemerintah merasa kesulitan dalam merealisasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan, seperti yang diungkapkan oleh seorang pejabat salah satu dinas di Kabupaten Bangka Selatan, sebagai berikut :

> " …..Kami mempunyai program pengentasan kemiskinan tetapi tidak dilengkapi data pendukung, sehingga kami tidak dapat merinci program tersebut dalam bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara nyata di lapangan……Itu menjadi kelemahan kami" (Wawancara, 20-06-2012).

Keterbatasan pemerintah dalam merencanakan program disebabkan oleh banyaknya rencana program yang harus dibuat. Keterbatasan pemerintah tersebut karena kurangnya data-data yang akurat sebagai pendukung rencana program, sehingga menyulitkan pemerintah dalam penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan di tingkat masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Masing-masing desa di Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan mempunyai tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga jika dilaksanakan program-program pemerintah tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak didukung oleh masyarakat, masyarakat bersikap apatis atau cuek dengan program pemerintah tersebut karena masyarakat sejak awal tidak

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

mengetahui. Hal yang sama juga disampaikan oleh seorang pejabat salah satu dinas di Kabupaten Bangka Selatan.

> "…..Karena selama ini masyarakat beranggapan proyek pemerintah hanya untuk menghabiskan anggaran, pekerjaan proyek diserahkan kepada pihak ketiga dan masyarakat tidak pernah dilibatkan. Namun hasil yang diperoleh kurang optimal dan kami kesulitan menentukan lokasi proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ada informasi dari pihak yang mengatakan bahwa di desa ada program yang berisi rencana program masyarakat secara detail, akhirnya kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan LKD …." (Wawancara, 20-06-2012).

Prinsip saling membutuhkan dalam bentuk kemitraan mutualistik menjadi unsur yang menentukan terhadap keberlanjutan kemitraan Belajar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan daerah pemengkaran dan ketiadaan unsur swadaya masyarakat sebagai bentuk kontribusi yang harus disiapkan oleh kedua pihak berdampak pada kinerja kemitraan kedua pihak terganggu karena unsur utama dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah tidak dapat dipenuhi.

Prinsip saling membutuhkan erat kaitannya dengan prinsip saling mengisi, seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat.

> "…Pemerintahpun kami rasa tidak mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam kegiatan PNPM-PISEW masyarakat mempunyai kelebihan potensi tenaga dan swadaya, maka perlu untuk saling mengisi dan menutupi kekurangan masing-masing pihak…"(Wawancara, 27-06-2012).

Prinsip saling mengisi dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah bertitik tolak atas kesadaran terhadap keterbatasan pihak lain sekaligus melihat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

adanya kelebihan pada pihak lain yang diharapkan dapat menutupinya. Dengan demikian kemitraan yang dibangun berdasarkan prinsip ini pada semua aspek yang diperlukan sehingga diperoleh pencapaian tujuan yang sama.

Saling mengisi juga tampak pada bentuk kontribusi yang disediakan oleh kedua pihak terutama dalam bentuk dana dari Pemerintah Daerah dan swadaya dari masyarakat. Kedua kontribusi tersebut mutlak disediakan. Swadaya yang diberikan oleh masyarakat sifatnya wajib karena hal ini berkaitan erat dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga masyarakat di Desa Sidoharjo sebagai berikut :

> "...Untuk kemajuan desa, kami rela memberikan swadaya seperti tanah, tenaga, dan material serta telah disepakati dalam rapat LKD tentang bentuk partisipasi masyarakat....." (Wawancara, 06-06-2012).

Swadaya masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam menggalang partisipasi masyarakat terutama dalam melaksanakan suatu pekerjaan proyek. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang warga di Desa Sidoharjo Kecamatan Airgegas, bahwa penyertaan swadaya masyarakat dalam bentuk pembebasan lahan dan tanaman sangat membantu pemerintah terutama dalam mengurangi beban anggaran Pemerintah Daerah terutama yang ada pada dinas terkait. Kondisi ini akan sangat membantu dalam penyelesaian pekerjaan proyek.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Berdasarkan uraian di atas, diperoleh satu pemahaman bahwa dalam menanggulangi suatu permasalahan, dibutuhkan kebersamaan termasuk dalam menyatukan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak agar tujuan terbangunnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan terwujud. Dalam program PNPM PISEW swadaya masyarakat merupakan salah satu hal yang penting dalam kemitraan LKD dengan pemerintah daerah. Itulah sebabnya, swadaya masyarakat harus ada karena tanpa swadaya masyarakat usulan kegiatan tidak akan direalisasikan walaupun usulan itu sangat prioritas dan sangat dibutuhkan oleh warga terutama masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan monitoring persiapan pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW di Desa Nyelanding Kecamatan Airgegas, salah seorang anggota POKJA menyatakan :

> "...Dalam program PNPM PISEW masyarakat diharapkan tidak hanya bicara tetapi harus memberikan sumbangan nyata atau swadaya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan harus dibuktikan tidak sekedar formalitas dalam proposal usulan kegiatan...." (Wawancara, 06-06-2012).

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang warga yang tanahnya dijadikan lokasi kegiatan tersebut, yakni :

> "...Pembangunan jalan setapak di desa demi kepentingan orang banyak. Jalan yang sebelumnya licin dan becek, sekarang sudah diperkeras sehingga mempermudah lalu lintas orang dan barang. Jadi kami sangat setuju menyerahkan tanah dan tanaman kami yang terkena proyek jalan setapak dan dibuktikan dengan pernyataan tertulis....."(Wawancara, 06-06-2012).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Mekanisme untuk memperoleh swadaya dari masyarakat dilakukan oleh LKD melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang program PNPM PISEW pada tahap persiapan pelaksanaan program di tingkat desa, kegiatan musrembang tingkat desa, dan pada pertemuan lainnya yang dilaksanakan di desa, lingkungan, RT, RW. Sementara itu, penetapan swadaya tersebut dilakukan melalui musyawarah bersama yang difasilitasi oleh LKD, Pemerintah Desa dan dihadiri oleh masyarakat di lingkungan tempat pelaksanaan kegiatan.

Dalam penelusuran melalui dokumen administrasi LKD, ditemukan pernyataan secara tertulis dari masyarakat yang memberikan swadaya terutama menyangkut pembebasan lahan dan tanaman. Pernyataan tertulis ini dimaksudkan untuk menghindari adanya protes warga yang tanahnya dijadikan lokasi pembangunan proyek. Dengan kata lain, pernyataan tertulis itu merupakan bukti yang sah bahwa masyarakat telah mengikhlaskan tanahnya untuk dijadikan lokasi pembangunan proyek. Pernyataan tertulis itu dibuat sendiri oleh yang bersangkutan di atas kertas yang bermaterai tanpa ada investasi dari pihak lain.

Pada saat monitoring tersebut pihak POKJA dalam memastikan kebenaran akan surat pernyataan tersebut, pihak POKJA melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat terutama bagi masyarakat yang lahannya menjadi lokasi pembangunan suatu proyek. Pada kesempatan lain setelah pelaksanaan monitoring oleh POKJA selesai, dilakukan wawancara dengan beberapa masyarakat menyangkut swadaya tersebut. Berikut petikan pernyataan warga pada saat dilakukan wawancara.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

> "...Pemerintah bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana yang ada, masalah dana pembangunan sudah menjadi beban pemerintah, kami kurang setuju dengan swadaya tersebut, tapi setelah di beri pengertian dan penjelasan oleh POKJA perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam dalam bentuk apapun..." (Wawancara, 03-07-2012).

Ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang setuju dengan persoalan swadaya terutama masyarakat miskin. Mereka yang tidak setuju memberikan alasan bahwa tanah tersebut adalah satu-satunya aset yang mereka miliki. Mengenai persoalan ini, beberapa warga dimintai pendapat untuk memberikan solusi atas ketidaksetujuan pemilik tanah. Pada saat itu, ketua PJOK menyatakan hal berikut :

> "...Pada saat sosialisasi dengan masyarakat, membahas persiapan pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang ada dimasyarakat termasuk mengenai pembebasan lahan tersebut, salah satu kesepakatan adalah memberikan ganti rugi kepada masyarakat miskin yang tanahnya menjadi lokasi, pembangunan proyek dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang mampu..." (Wawancara, 03-07-2012).

Dari hasil telaah terhadap dokumen notulen rapat yang dilaksanakan oleh LKD dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat lainnya ditemukan adanya kesepakatan warga masyarakat di lingkungan tersebut dalam hal menanggulangi persoalan di atas. Isi kesepakatan tersebut adalah bahwa masyarakat yang mempunyai kelebihan pendapatan siap membantu masyarakat miskin yang tanahnya dijadikan lokasi pembangunan proyek. Bantuan yang diberikan oleh warga yang memiliki kelebihan dari segi keuangan adalah memberikan dana secara sukarela sebagai ganti rugi kepada warga miskin

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

yang keberatan tanahnya dijadikan lokasi pembangunan proyek. Dengan pemberian ganti rugi tersebut, persoalan yang berkaitan dengan swadaya masyarakat akhirnya teratasi.

Pemberian swadaya oleh masyarakat merupakan wujud tanggung jawab masyarakat terhadap apa yang dibutuhkannya. Dengan kata lain, jika masyarakat membutuhkan sesuatu, masyarakat hendaknya memberikan swadaya. Hal seperti ini diperlukan sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat, bahwa masyarakatpun berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan tidak melihat miskin dan kaya. Masyarakat tidak sekedar menikmati apa yang disediakan oleh pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa orang dan telaah terhadap dokumen-dokumen, unsur keswadayaan dalam program PNPM PISEW merupakan sesuatu yang wajib bagi masyarakat. Dalam hal ini, swadaya masyarakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam kemitraan LKD dan pemerintah daerah melalui program PNPM PISEW. Tanpa ada swadaya masyarakat tidak akan terlaksana apabila salah satu pihak menarik diri dalam arti tidak memberikan kontribusi. Dalam prinsip kemitraan tidak ada pihak yang merasa dominan, artinya jika hanya salah satu pihak yang memberikan kontribusi dan pihak lain tidak ada kontribusinya. Hal ini sangat menganggu kemitraan yang sedang berjalan.

Jenis-jenis swadaya masyarakat sesuai data yang berhasil dihimpun melalui Dokumen Efektifitas Realisasi Rencana Strategis Kecamatan adalah

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

material, tenaga kerja, penambahan komponen, lahan dan lain-lain. Jenis-jenis swadaya beserta pembiayaannya disajikan dalam tabel 6.1 di bawah ini :

Tabel 6.1. Bentuk dan Nilai Swadaya Masyarakat

No	Material	Tenaga	Penambahan Komponen	Lahan	Lain-lain	Total
1	2.899.000 (0,66%)	1.450.000 (0,33%)	5.000.000 (1,14%)	383.000.000 (87,57%)	45.000.000 (10,28%)	437.349.000

Sumber : data diolah dari POKJA

Sehubungan dengan kemitraan melalui program PNPM PISEW kedua pihak berada pada posisi yang setara. Jika pemerintah memberikan bentuk penyertaannya harus ditopang oleh bentuk penyertaan dari pihak masyarakat. Demikian juga, sebaliknya ketika masyarakat siap dengan swadayanya pemerintahanpun harus siap dengan dananya. Dalam proses pembelajaran kemitraan dalam program ini tidak ditentukan besar kecilnya swadaya masyarakat, berapapun nilainya dan apapun bentuknya tidak menjadi persoalan, yang penting kedua pihak bersedia berkontribusi berdasarkan kemampuan yang dimiliki.

UNIVERSITAS TERBUKA

G. Saling Menguntungkan

Prinsip saling menguntungkan dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah nampak pada manfaat yang didapatkan oleh kedua pihak.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Kedua pihak saling mendapatkan manfaat dan keuntungan dengan melakukan kemitraan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Bagi LKD dan masyarakat manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah mengakomodir rencana-rencana program LKD sehingga LKD mendapatkan kepercayaan dari pemerintah untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.
2. Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat miskin sehingga dapat menambah penghasilan.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana lingkungan seperti rumah layak huni (mahyani), jalan, jembatan, saluran air/irigasi, MCK, tanggul dan fasilitas umum lainnya yang diburukan oleh masyarakat miskin.
4. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pembangunan posyandu desa dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya.
5. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat sebagai proses pembelajaran.
6. Terjalinnya komunikasi dua arah antara LKD dan Pemerintah Daerah khususnya dengan dinas-dinas atau instansi pemerintah.
7. Swadaya masyarakat ditunjang dengan dukungan dana pemerintah,

Sedangkan bagi Pemerintah Daerah manfaat yang diperoleh :

1. Pemerintah merasa terbantu dalam merealisasikan rencana program penanggulangan kemiskinan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

2. Kualitas pekerjaan terjamin karena pekerjaan tidak diserahkan atau dikontrakkan kepada pihak lain.
3. Pengeluaran anggaran pemerintah lebih hemat karena didukung oleh swadaya masyarakat.
4. Terjalinnya komunikasi dua arah antara Pemerintah Daerah dan LKD
5. Pemerintah mendapatkan pengalaman bekerja dengan masyarakat, karena selama ini pemerintah lebih banyak bekerja dengan pihak-pihak lain.

Terkait dengan manfaat yang didapatkan, dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah terdapat unsur kepuasan terutama dengan apa yang telah diberikan dengan manfaat yang diperoleh. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang warga masyarakat yang wilayahnya mendapatkan bantuan pembangunan MCK di Desa Tepus Kecamatan Airgegas, sebagai berikut :

> "... Kepuasan yang kami dapatkan adalah sekarang kami telah memiliki MCK walaupun masih sifatnya milik umum, bertahun-tahun kami kalau mau buang hajat ke dalam hutan atau pinggir sunggai, dengan adanya program PNPM PISEW kami dapat merealisasikan MCK ini dengan bantuan dana program dan swadaya yang kami kumpulkan...." (Wawancara, 04-07-2012).

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Gaffar (2010) menyatakan pada prinsipnya pembangunan MCK yang pendanaanya berasal dari program PNPM-P2KP yang berada di lingkungan Mangeramba Kelurahan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar, telah berhasil dalam mempengaruhi perubahan sikap masyarakat yang ada di Kelurahan Takatidung, masyarakat puas dan sudah menerima serta memanfaatkan fasilitas yang ada. Perubahan sikap masyarakat

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

dalam hal ini, masyarakat sudah mulai beradaptasi dan menerima serta memanfaatkan fasilitas yang ada dengan tidak menggunakan lagi ruang terbuka (hutan dan sungai) sebagai sarana untuk BAB.

Kepuasan tidak saja datang dari masyarakat, pemerintahpun, merasakan kepuasan tersendiri melalui kemitraan yang dibangun antara LKD dan Pemerintah Daerah, seperti yang disampaikan oleh salah seorang pejabat salah satu dinas di Kabupaten Bangka Selatan.

> "...Sebagai dinas yang melayani bidang cipta karya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan merasa puas, karena salah satu tujuan kami adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan sarana dan prasarana jalan, dan melalui program PNPM PISEW tujuan ini tercapai berkat kerjasama antara Pemerintah Daerah dan LKD...."(Wawancara, 04-07-2012).

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang anggota POKJA

> "....Kami senang dan bangga terhadap semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat untuk membantu merawat dan memelihara dan ada rasa memiliki atas sarana dan prasarana yang sudah dibangun sedangkan kepuasan pemerintah dapat dilihat dalam bentuk realisasi dana PNPM PISEW..."(wawancara, 05-07-2012).

Berdasarkan pendapat tersebut, prinsip saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan *mutualistik* tidak saja didapatkan oleh salah satu pihak, tetapi juga oleh pihak lain. Keuntungan atau manfaat yang didapatkan adalah benar-benar nyata. Semua pihak yang berkepentingan maupun yang tidak berkepentingan dapat menyaksikan manfaat atau keuntungan yang diperoleh.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Perwujudan nilai-nilai tersebut diatas dalam konteks kemitraan telah mewarnai interaksi antara LKD dan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program PNPM PISEW. Fenomena yang dijumpai dalam penanggulangan kemiskinan melalui program, PNPM PISEW yang pada kenyatannya melibatkan beberapa aktor seperti Pemerintah Daerah melalui dinas terkait dan masyarakat melalui LKD mengiring pada terjalinya pola-pola hubungan sosial antar aktor yang saling bekerjasama. Adanya unsur ketergantungan, saling membutuhkan, saling menguntungkan, adanya kesamaan visi masing-masing pihak dalam menuntut terjadinya jalinan kerjasama dari masing – masing aktor baik mulai dari proses perencanaan khusunya pada pengajuan proposal dan pencairan dana, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan kegiatan.

Jalinan kerjasama tersebut terjadi karena dalam proses PNPM PISEW sebelumnya telah terbentuk suatu lembaga keswadayaan masyarakat yang kemudian oleh masyarakat ditindaklanjuti dengan membentuk LKD. Salah satu komponen dalam PNPM PISEW adalah tersedianya dana yang dapat diakses oleh masyarakat. Untuk dapat mengakses dana tersebut, LKD dan pemerintah daerah melakukan kerjasama dalam hal pembiayaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan oleh masyarakat. Jalinan kerjasama ini dilakukan sebagai suatu proses pembelajaran bersama antara LKD dengan pemerintah daerah melalui dinas, bahwa ke depan model penanggulangan kemiskinan harus melibatkan unsur pemerintah daerah melalui dinas atau instansi teknis serta menyediakan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

fasilitas pendanaan yang bersumber dari APBD dan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian-keahlian tertentu yang dapat diakses oleh LKD untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah Daerah melakukan kemitraan dengan LKD karena pihak pemerintah melihat sejak awal proses PNPM PISEW dilaksanakan, masyarakat telah membentuk suatu lembaga keswadayaan masyarakat, seperti yang disampaikan oleh salah seorang pejabat di BP3MD Kabupaten Bangka Selatan, sebagai berikut :

> "…. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan kemitraan dengan LKD karena di tingkat desa telah ada LKD yang selama proses PNPM PISEW telah melakukan refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif mengenai masalah kemiskinan kemudian juga dalam program PNPM PISEW mengharuskan Pemerintah Daerah mensinergikan program-program pemerintah dengan program LKD dan melakukan kerjasama dalam mengimplementasikan kegiatan… "(Wawancara, 05-07-2012).

Proses awal PNPM PISEW yang telah melahirkan kesepakatan masyarakat untuk membentuk LKD menjadi alasan pemerintah melakukan kerjasama dalam upaya merealisasikan program-program pemerintah dan program-program LKD. LKD dalam melakukan kemitraan dengan Pemerintah Daerah lebih berperan dalam mengimplementasikan program-program penanggulangan kemiskinan, seperti yang disampaikan oleh salah seorang Konsultan Pendamping sebagai berikut :

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

"... Program-program yang kami rencanakan maksimal Rp. 50.000.000,00 *(lima puluh juta rupiah)* per kelompok, pengelolaan diserahkan kepada masyarakat, dalam hal ini harus kelompok yang resmi. Di desa kami anggap cuma LKD yang berstatus resmi dan mampu melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat ..." (Wawancara, 05-07-2012).

Alasan lain yang menjadi dasar pertimbangan kedua pihak melakukan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan berdasarkan analisis terhadap proses PNPM PISEW yang sedang berjalan.

1. Dalam proses PNPM PISEW LKD telah melakukan refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif.
2. Kegiatan-kegiatan LKD direncanakan, dilaksanakan, di evaluasi dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sehingga meningkatkan transparansi dan dukungan warga dalam pelaksanaannya.
3. LKD telah terlatih melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai program penanggulangan kemiskinan yang telah disusun sebelumnya. Program LKD ini dalam pelaksanaan kegiatan PNPM PISEW disingkronkan dengan program-program Pemerintah Daerah.
4. LKD memiliki data kemiskinan di wilayah (desa) yang setiap tahun dilakukan pembaharuan terhadap data-data kemiskinan.
5. Kegiatan-kegiatan LKD diaudit untuk meningkatkan akuntabilitas.
6. Kedekatannya dengan masyarakat sehingga LKD lebih mampu menyalurkan sumber daya dan dalam melaksanakan kegiatan LKD di dukung dengan

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

swadaya masyarakat sehingga lebih mampu mencapai sasaran dengan biaya murah.

7. Pemerintahan saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah pada era sebelumnya yang terkenal dengan model pembangunan yang sentralistik. Pemerintah saat ini memberikan peluang yang besar kepada pihak lain untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Alasan terhadap model kemitraan *mutualistik* yang terjadi antara LKD dan Pemerintah Daerah pada karena nilai-nilai yang terkandung dalam kemitraan tersebut lebih banyak memenuhi bangunan kemitraan antara LKD dan pemerintah Daerah. Sama halnya dengan model kemitraan *linear collaborative of partnershif*, di mana nilai-nilai yang ada dalam bentuk kemitraan tersebut terdapat dalam kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah akan tetapi nilai yang terkandung di dalam bentuk kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai – nilai yang ada pada bentuk *mutualistik*. Jadi dapat dikatakan bentuk kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah adalah bentuk kemitraan yang memadukan model *mutualistik* dan model *linear collaborative of partnership*. Jika dibandingkan dengan bentuk kemitraan lainnya. ada beberapa nilai yang mempunyai kesamaan akan tetapi ada juga nilai-nilai lainnya tidak mempunyai kesamaan.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kemitraan LKD dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan melalui Program PNPM-PISEW di Kecamatan Airgegas secara umum telah berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Airgegas telah menumbuhkan kepercayaan kepada LKD untuk mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, sebaliknya, LKD menjaga kepercayaan tersebut dengan melaksanakan kegiatan dengan baik
2. Model kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah yaitu :
   a. Pada tahap penyusunan program model kemitraan yang dibangun adalah lebih mencerminkan kemitraan yang berhubungan bersifat *Subordinatif Union Of Partnership*. Dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga yang ada diatas para mitranya. Pemerintah berposisi sebagai regulator yaitu pihak perancang program sekaligus menentukan rambau-rambu program sedangkan masyarakat sebagai pihak yang dibangkitkan dayanya melalui usaha mandiri peningkatan infrastruktur sosial ekonomi. Kemitraan dengan pihak pemerintah cukup dominan karena pemerintah mempunyai program tahun berjalan dengan didukung oleh dana yang dimiliki

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

sehingga pada kegiatan tertentu pengambilan keputusan dominan atau mengikuti keputusan pemerimtah.

b. Pada tahap pengajuan proposal menciptakan model kemitraan *linear collaborative of partnershif* dengan bentuk kerjasama antara lembaga besar dan kecil, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai - nilai yang ada pada bentuk mutualistik. Kemitran yang terjalin saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra pada saat verifikasi menyangkut kelengkapan dan kebenaran pengisian data. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

c. Pada tahap pencairan dana menciptakan model kemitraan *linear collaborative of partnershif* dengan bentuk kerjasama antara lembaga besar dan kecil, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai - nilai yang ada pada bentuk mutualistik. Dengan demikian lebih menciptakan pada kemitraan linear dengan kerjasama antar lembaga besar dan kecil, dalam hal ini kerjasama dengan bank mitra yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

d. Pada tahap pelaksanaan lebih menciptakan model kemitraan *linear collaborative of partnershif* dengan bentuk kerjasama antara lembaga besar dan kecil, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai - nilai yang ada pada bentuk mutualistik dan mempunyai keunikan terutama pada konteks prinsip kebersamaan, dimana kedua pihak melakukan aktifitas bersama sejak awal pelaksanaan kegiatan sampai pada akhir pelaksanaan kegiatan. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

e. Pada tahap pertanggungjawaban juga menciptakan model kemitraan *linear collaborative of partnershif* dengan bentuk kerjasama antara lembaga besar dan kecil, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai - nilai yang ada pada bentuk mutualistik. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran/ volume, status/ legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan lainnya meliputi seluruh yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya serta pengelolaan kegiatan. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

f. Pada tahap pengawasan lebih mengarah model kemitraan *linear collaborative of partnershif* dengan bentuk kerjasama antara lembaga besar dan kecil, dimana nilai-nilai yang terkandung di dalam bentuk kemitraan tersebut merupakan penjabaran dari nilai - nilai yang ada pada bentuk mutualistik. Pihak-pihak yang bermitra saling memperkuat, saling

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

melengkapi dan memberikan keuntungan untuk memantau proses dan perkembangan pelaksanaan suatu program. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Prinsip saling percaya antara LKD dan Pemerintah Daerah menjadi prinsip yang mendasari bentuk kemitraan. Berpijak pada prinsip tersebut, LKD dan Pemerintah Daerah melakukan interaksi untuk mencapai tujuan bersama dengan sejumlah sumber daya yang dimiliki dengan tetap menghargai identitas masing-masing pihak. Demikian juga dengan nilai-nilai kemitraan yang lainnya seperti kesamaan visi, saling membutuhkan, saling menguntungkan yang secara implisit telah memaknai ketiga nilai tersebut, menjadi pondasi dalam bingkai bangunan bentuk kemitraan antara LKD dan Pemerintah Daerah.

UNIVERSITAS TERBUKA

B. Saran

1. Perlunya pada pelaksanaan program sebaiknya LKD lebih menjamin keterlibatan perempuan untuk meraih akses kegiatan kemitraan yang dilaksanakan oleh LKD tersebut (mengacu ke MOD total partisipasi perempuan adalah 25%).
2. Pencairan dana LKD yang selama ini dirasakan sebagai hambatan utama untuk melaksanakan program LKD tepat waktu, sebaiknya dibuatkan mekanisme pencairan " *First Come First Out* " siapa yang memasukkan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) lebih dahulu maka akan mendapatkan pencairan dana tanpa menunggu semua LPJ masuk.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

Gaffar, Affrizal. (2010). *Respon Masyarakat Terhadap Penyediaan Fasilitas Sanitasi (Mck) Di Kawasan Permukiman Nelayan Kelurahan Takatidung Kabupaten Polewali Mandar*. Tesis Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota. UNDIP

Pranoto, Alfatama Brahayat. (2007). *Hubungan Kepadatan Pemukiman Dengan Ketersediaan Infrastruktur*. Tesis MTS UNDIP

Berkowitz, B. (2000). Collaboration for Health Improvement : Models for State, Community, and Academic Partnership. *Journal of Public Health Management Pratice, Volume 6 No 1*, 2000

Djaenuri, (1997). *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan Press

Dwiyano, Agus. (1996). Kemitraan Pemerintah, Swasta dan Relevansi Terhadap Reformasi Administrasi Negara *dalam Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Volume I no 1,* 1996

Prasojo, Eko *et al.* (2007). *Pemerintahan Daerah. Jakarta* : Universitas Terbuka

Gaspersz, (2004). *Perencanaan Strategik Antara Peningkatan Kinerja Sektor Publik, Suatu Petunjuk Praktek*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Huri, Daman, dkk. (2008). *Demokrsi dan Kemiskinan, Buku Seri Demokrasi,* PlaCIDS dan KID, Malang

Keban, Yeremias T. (2000). Good Governance dan Capacityl Building Sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan, dalam *Jurnal Perencanaan Pembangunan,* Jakarta

Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang (1st sd).* Jakarta : Erlangga

Lele, Gabriel. (2006). Membangun Komunitas Kebijakan : Konsep, Urgensi, dan Implikasinya, dalam *Jurnal Politik "Interaksi" Vol.I no. 2,* September 2006

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Lembaga Admnistrasi Negara. (2000). *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),* Jakarta

Manulang. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen.* Yogyakarta, Gadjah Mada university Press

Mardalis. (1990). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal.* Jakarta : Bumi Aksara.

Mohr dan Spekman. (1994). Charateristic or Partnership Sucses : Partnering Attributes, Communication Behavior, and Conflik Resolution Technigues, *Strategi Managemen Journal, Vol 15*

Moleong. L.J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Rosda

Padgett. S.M. Bekemeler, B., & Berkowitz, B., (2004). Collaborative Partnership at the State Level : Promoting System Change in Palic Health Insfrastructure, *Journal Of Publik Health Management Prakctice, Volume 10 no 3*, 2004

Parwoto. (2006). *Catatan Singkat Kemitraaan dan Sinergi Dalam Pembangunan. Bahan Diskusi dalam Orientasi Paket,* 12 s/d Mei, 2004 diselenggarakan oleh Deptemen Kimpraswil, Jakarta

Irawan, Prasetyo dkk, (2000). *Manajemen Sumber daya Manusia.* Jakarta : STIA-LAN Press

Prijono Onny S dan Pranarka A.M.W (Penyunting). (1996). *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi.* Jakarta : Centre For Strategic and International Studies.

Ratminto dan Winarsih, (2005). *Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual Penerapan Citizens Charter dan Standar Pelayanan Minimal.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suharyanto, Hadriyanus. (2005). *Administrasi Publik, Entrepreneurship, Kemitraan, dan Reinventing Govermen.,* Yogyakarta : Media Wacana.

Sulistiyani Ambar Teguh. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Yogyakarta : Gava Media

Wahab, Solichin Abdul. (1997). *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara,* Jakarta : Bumi Aksara.

Widodo, Joko. (2001). *Good Governance : Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Surabaya : Insan Cendikia.

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Wilson, Larry & Wilson. (1994). *Heesch, Stop Sellling and Start Partnering, Pedoman Teknis Pelaksanaan Paket,* Edisi Januari 2006

Vredenbregt. (1983). *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat,* Jakarta : PT. Gramedia

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Pedoman Wawancara (Interview Guide)

Agar dalam proses pengumpulan data mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kecamatan Airgegas Kabupaten Bangka Selatan, maka dipergunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara. Dalam penelitian ini dipergunakan pedoman wawancara yang hanya secara garis besar saja dan akan dikembangkan lebih mendalam pada saat wawancara kepada informan dilakukan.

A. Materi pertanyaan untuk aparat pemerintah yang terlibat secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1. Bagaimana Visi terhadap program penanggulangan kemiskinan ?
2. Bagaimana proses awal terjalinnya kemitraan ini ?
3. Arti pentingnya kemitraan ?
4. Apa saja kelemahan dinas dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan ?
5. Menggapa masyarakat bersikap apatis atau cuek dengan program pemerintah dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan ?
6. Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dananya berasal dari sharing dana Kabupaten Bangka Selatan ?
7. Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

B. Materi pertanyaan untuk LKD (Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat)

1. Bagaimana visi LKD dengan Visi Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan guna mencapai masyarakat sejahtera?
2. Bagaimana peran LKD dalam penyusunan proposal kegiatan dan bagaimana proses terjalinnya kemitraan ini ?
3. Tanggapan terhadap program PNPM PISEW ?
4. Tanggapan masyarakat dengan kegiatan swadaya ?
5. Bagaimana tanggapan terhadap peran LKD perempuan dalam kegiatan PNPM PISEW ?

C. Konsultan

1. Menggapa di perlukan kemitraan ?
2. Bagaimana pembagian tugas di dalam kemitraan ?

D. POKJA dan PJOK

1. Hambatan yang dirasakan selama kegiatan kemitraan dilaksanakan ?
2. Bagaimana pendapat masyarakat untuk memberikan solusi atas ketidaksetujuan pemilik tanah untuk dijadikan tempat proyek ?
3. Bantuan atau swadaya dalam bentuk apa yang diberikan untuk mendukung kegiatan program penanggulangan kemiskinan ?
4. Adakah kesulitan pada saat pencairan dana ?
5. Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

E. Materi pertanyaan untuk masyarakat sebagai sasaran program

1. Menggapa kita perlu memegang prinsip saling membutuhkan/ prinsip saling mengisi
2. Tanggapan masyarakat dengan kegiatan swadaya ?
3. Tanggapan masyarakat yang tanahnya dijadikan tempat proyek ?
4. Apa saja yang menjadi sumbangan masyarakat sebagai wujud dukungan swadaya masyarakat ?
5. Manfaat yang didapatkan masyarakat dalam kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah ?

F. Materi pertanyaan untuk Camat tempat dilaksanakan kegiatan PNPM PISEW

1. Bagaimana Visi Kecamatan terhadap program penanggulangan kemiskinan bila dihubungkan dengan Visi LKD ?
2. Tanggapan dengan kegiatan swadaya ?
3. Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Kesepakatan (*member cheek*) dengan Sumber Data

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Januari 2013

Nama : Ir. M. Sormin
Jabatan : Kepala BP3MD
Ttd/ Paraf : .....

1. Apa saja kelemahan dinas dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan ?

   " .....Kami mempunyai program pengentasan kemiskinan tetapi tidak dilengkapi data pendukung, sehingga kami tidak dapat merinci program tersebut dalam bentuk kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara nyata di lapangan.....Itu menjadi kelemahan kami" (Wawancara, 20-06-2012).

Nama : Ir. M. Sormin
Jabatan : Kepala BP3MD
Ttd/ Paraf : .....

2. Menggapa masyarakat bersikap apatis atau cuek dengan program pemerintah dalam hal ini program penanggulangan kemiskinan ?

   ".....Karena selama ini masyarakat beranggapan proyek pemerintah hanya untuk menghabiskan anggaran, pekerjaan proyek diserahkan kepada pihak ketiga dan masyarakat tidak pernah dilibatkan. Namun hasil yang diperoleh kurang optimal dan kami kesulitan menentukan lokasi proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Ada informasi dari pihak yang mengatakan bahwa di desa ada program yang berisi rencana program masyarakat secara detail, akhirnya kami memutuskan untuk berkonsultasi dengan LKD ...." (Wawancara, 20-06-2012).

Nama : Ir. M. Sormin
Jabatan : Kepala BP3MD
Ttd/ Paraf : .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

3. Arti pentingnya kemitraan ?

"…. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan kemitraan dengan LKD karena di tingkat desa telah ada LKD yang selama proses PNPM PISEW telah melakukan refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya dan perencanaan partisipatif mengenai masalah kemiskinan kemudian juga dalam program PNPM PISEW mengharuskan Pemerintah Daerah mensinergikan program-program pemerintah dengan program LKD dan melakukan kerjasama dalam mengimplementasikan kegiatan… "(Wawancara, 05-07-2012).

Nama : Agus Heru
Jabatan : KMK (PU)
Ttd/ Paraf : ……/…..

4. Bagaimana pelaksanaan kegiatan yang dananya berasal dari *sharing dana* Kabupaten Bangka Selatan ?

" Untuk *sharing dana* dari Kabupaten Bangka Selatan, biasanya mengikuti program yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kabupaten Bangka Selatan tahun berjalan" (Wawancara, 18-07-2012).

Nama : Agus Heru
Jabatan : KMK (PU)
Ttd/ Paraf : ……/…..

5. Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?

"…Sebagai dinas yang melayani bidang cipta karya, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan merasa puas, karena salah satu tujuan kami adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan sarana dan prasarana jalan, dan melalui program PNPM PISEW tujuan ini tercapai berkat kerjasama antara Pemerintah Daerah dan LKD…."(Wawancara, 04-07-2012).

Nama : Zainudin
Jabatan : Camat Airgegas
Ttd/ Paraf : ……..

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

6. Bagaimana Visi Kecamatan terhadap program penanggulangan kemiskinan bila dihubungkan dengan Visi LKD ?

"...Tugas Pemerintah Kecamatan Airgegas memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk mensejahterakan masyarakat, jadi siapapun pejabatnya kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas, demikian juga dengan LKD sudah sejalan visinya membantu masyarakat miskin agar berdaya...."(Wawancara, 27-06-2012).

Nama : Meli Pastika, A.Md
Jabatan : Ketua PJOK
Ttd/ Paraf : .....

7. Adakah kesulitan pada saat pencairan dana ?

" Kami menerima kebijakan Bank yang baru mau mencairkan dana setelah semua dokumen terkumpul tetapi kami mengharapkan kesadaran dari kawan-kawan LKD untuk kerjasamanya sehingga tidak menggangu kegiatan lain yang mau dijalankan "(Wawancara, 18-07-2012).

Nama : Meli Pastika, A.Md
Jabatan : Ketua PJOK
Ttd/ Paraf : .....

8. Bagaimana pendapat masyarakat untuk memberikan solusi atas ketidaksetujuan pemilik tanah untuk dijadikan tempat proyek ?

"...Pada saat sosialisasi dengan masyarakat, membahas persiapan pelaksanaan kegiatan dan mencari solusi terhadap setiap permasalahan yang ada dimasyarakat termasuk mengenai pembebasan lahan tersebut, salah satu kesepakatan adalah memberikan ganti rugi kepada masyarakat miskin yang tanahnya menjadi lokasi, pembangunan proyek dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang mampu..." (Wawancara, 03-07-2012).

Nama : Sanol, SE
Jabatan : Anggota Pokja
Ttd/ Paraf : .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

9. Bantuan atau swadaya dalam bentuk apa yang diberikan untuk mendukung kegiatan program penanggulangan kemiskinan ?

"…Dalam program PNPM PISEW masyarakat diharapkan tidak hanya bicara tetapi harus memberikan sumbangan nyata atau swadaya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dan harus dibuktikan tidak sekedar formalitas dalam proposal usulan kegiatan…." (Wawancara, 06-06-2012).

Nama : Mustar Effendi, B.Sc
Jabatan : Anggota Pokja
Ttd/ Paraf : .....

10. Apakah kepuasan (manfaat) yang didapat dari kegiatan kemitraan ?

"….Kami senang dan bangga terhadap semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat untuk membantu merawat dan memelihara dan ada rasa memiliki atas sarana dan prasarana yang sudah dibangun sedangkan kepuasan pemerintah dapat dilihat dalam bentuk realisasi dana PNPM PISEW…"(wawancara, 05-07-2012).

Hari/ Tanggal : Jum'at, 25 Januari 2013

Nama : Sobirin
Jabatan : Ketua LKD Kelompok Tani Serunting Sakti Airgegas
Ttd/ Paraf : .....

11. Bagaimana peran LKD dalam penyusunan proposal kegiatan dan bagaimana proses terjalinnya kemitraan ini ?

" Sebelum penyusunan proposal kegiatan dilaksanakan, dinas terkait melakukan bimbingan teknis tentang pembuatan rencana detail kegiatan. LKD melakukan persiapan bahan-bahan terkait yang dibutuhkan, jadi ada kerjasama antara unsur dinas dan LKD. (Wawancara, 18-07-2012)"

Nama : Amran
Jabatan : Anggota LKD Jaya Indah Airbara
Ttd/ Paraf : .....

UNIVERSITAS TERBUKA

12. Tanggapan masyarakat terhadap program PNPM dan apa saja yang akan dikerjakan (dalam rangka pelaksanaan pekerjaan proyek) ?

" Sosialisasi dilaksanakan sebelum kegiatan PNPM-PISEW di kerjakan untuk menginformasikan pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan. Selanjutnya LKD menyusun jadwal kerja, rencana kebutuhan dana dan tenaga". (Wawancara, 18-07-2012).

Nama : Pikoh
Jabatan : Ketua LKD PKK Airgegas
Ttd/ Paraf : .....

13. Bagaimana tanggapan terhadap peran LKD perempuan dalam kegiatan PNPM PISEW ?

" Bahwa dalam melaksanakan kegiatan ini LKD berkeyakinan bahwa laki-laki lebih mampu untuk melaksanakan program terutama dalam kegiatan fisik yang memerlukan tenaga seperti pembuatan jalan baru" "(Wawancara, 18-07-2012).

Nama : Sapli
Jabatan : Ketua LKD Jaya Sejahtera Pergam
Ttd/ Paraf : .....

14. Bagaimana visi LKD dengan Visi Kecamatan dalam penanggulangan kemiskinan guna mencapai masyarakat sejahtera?

".....Pada prinsipnya visi antara LKD dan Pemerintah Kecamatan Airgegas tidak beda, meskipun dalam redaksi yang berbeda tetapi intinya tetap sama yaitu bagaimana mencapai masyarakat yang sejahtera dan berdaya..."(Wawancara, 27-06-2012)

Nama : Surhana
Jabatan : Warga Masyarakat Sidoharjo
Ttd/ Paraf : .....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

15. Tanggapan masyarakat dengan kegiatan swadaya ?

"…Untuk kemajuan desa, kami rela memberikan swadaya seperti tanah, tenaga, dan material serta telah disepakati dalam rapat LKD tentang bentuk partisipasi masyarakat…." (Wawancara, 06-06-2012).

Nama : Hermawan, S.Ag
Jabatan : Warga Masyarakat Nyelanding
Ttd/ Paraf : ……..

16. Tanggapan masyarakat yang tanahnya dijadikan tempat proyek ?

"…Pembangunan jalan setapak di desa demi kepentingan orang banyak. Jalan yang sebelumnya licin dan becek, sekarang sudah diperkeras sehingga mempermudah lalu lintas orang dan barang. Jadi kami sangat setuju menyerahkan tanah dan tanaman kami yang terkena proyek jalan setapak dan dibuktikan dengan pernyataan tertulis….."(Wawancara, 06-06-2012).

Nama : H. Buy
Jabatan : Warga Masyarakat Bencah
Ttd/ Paraf : ……..

17. Apa saja yang menjadi sumbangan masyarakat sebagai wujud dukungan swadaya masyarakat ?

"…Pemerintah bertanggungjawab terhadap sarana dan prasarana yang ada, masalah dana pembangunan sudah menjadi beban pemerintah, kami kurang setuju dengan swadaya tersebut, tapi setelah di beri pengertian dan penjelasan oleh POKJA perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam dalam bentuk apapun…" (Wawancara, 03-07-2012).

Nama : Tempellisani
Jabatan : Tokoh Masyarakat Delas
Ttd/ Paraf : ……..

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

18. Menggapa kita perlu memegang prinsip saling membutuhkan/ prinsip saling mengisi ?

"…Pemerintahpun kami rasa tidak mampu sepenuhnya menyelesaikan masalah kemiskinan. Dalam kegiatan PNPM-PISEW masyarakat mempunyai kelebihan potensi tenaga dan swadaya, maka perlu saling mengisi dan menutupi kekurangan masing-masing pihak…"(Wawancara, 27-06-2012).

Nama : Sulaiman
Jabatan : Warga Masyarakat Desa Tepus
Ttd/ Paraf : ……

19. Manfaat yang didapatkan masyarakat dalam kemitraan antara LKD dengan Pemerintah Daerah ?

"… Kepuasan yang kami dapatkan adalah sekarang kami telah memiliki MCK walaupun masih sifatnya milik umum, bertahun-tahun kami kalau mau buang hajat ke dalam hutan atau pinggir sunggai, dengan adanya program PNPM PISEW kami dapat merealisasikan MCK ini dengan bantuan dana program dan swadaya yang kami kumpulkan…." (Wawancara, 04-07-2012).

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Januari 2013

Nama : Wisnu Wibowo, ST
Jabatan : Ttl
Ttd/ Paraf : ……

20. Menggapa di perlukan kemitraan ?

"… Program-program yang kami rencanakan maksimal Rp. 50.000.000,00 *(lima puluh juta rupiah)* per kelompok, pengelolaan diserahkan kepada masyarakat, dalam hal ini harus kelompok yang resmi. Di desa kami anggap cuma LKD yang berstatus resmi dan mampu melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di masyarakat …" (Wawancara, 05-07-2012).

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

KECAMATAN AIRGEGAS

13/40951.pdf

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 01 Airgegas 33182 Telp. - - - - - -

Airgegas, 01 Juni 2012

Nomor : 300/301/C. AGG/2012
Sipat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Yth. Ketua Program Pascasarjana
Universitas Terbuka UPBJJ
Pangkalpinang

di-

TEMPAT

UNIVERSITAS TERBUKA

Sehubungan dengan Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkal Pinang Nomor : 978/ UN.31.55/ LL/ 2012 tanggal 28 Mei 2012 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Dengan ini Camat Airgegas Kabupaten Bangka Selatan memberi izin kepada :

Nama : Fauziana
NIM : 016093839
Judul Penelitian : Kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dengan Pemerintah Daerah (Studi Kasus PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas

Untuk melakukan penelitian sesuai dengan permohonan dimaksud .

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT AIRGEGAS

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN KECAMATAN AIRGEGAS

ZAINUDIN
Penata Tk. I
NIP. 19660228 198609 1 001

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ-UT) Pangkal Pinang

Jl. Pulau Bangka, Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu, Provinsi Kep. Bangka Belitung

Telepon: 0717-424986, 437949, Faksimile: 0717-436140, 431315

Laman: ut-pangkalpinang@ut.ac.id

13/40951.pdf

Pangkalpinang, 28 Mei 2012

Nomor : 978 / UN.31.55 / LL / 2012
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada.Yth.
Camat Air Gegas
Di Air Gegas

Berkaitan dengan rencana penelitian mahasiswa Program PASCASARJANA (S2) kami, guna memenuhi persyaratan mata kuliah Tugas Akhir Program Magister (TAPM)/Tesis dengan ini kami mengajukan permohonan agar mahasiswa kami :

No	Nama	NIM	Kode Mata Kuliah
1.	Fauziana	016093839	MAPU5400

Di izinkan untuk melakukan penelitian di Kecamatan Air Gegas dengan judul "Kemitraan lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) dengan Pemerintan Daerah(Studi Kasus PNPM PISEW di Kecamatan Air Gegas)"
Demikian atas perhatian dan bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS TERBUKA

a.n Kepala,
Kasubag TU

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TERBUKA UPBJJ PANGKAL PINANG

Vanda Indrawan, SE
Nip 19630522 200212 1 001

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

(Form LKD-5a)

SURAT REKOMENDASI CAMAT

No .....

Berdasarkan hasil seleksi kemampuan LKD di Kecamatan ..... yang dilakukan oleh Tim Seleksi LKD Kecamatan ..... Kabupaten .....(terlampir), maka dengan ini kami rekomendasikan bahwa nama nama LKD tersebut dibawah ini dapat melaksanaan pekerjaan paket-paket PNPM-PISEW , adalah sebagai berikut ;

No.	Nama LKD	Alamat	Jenis Pekerjaan	Nilai Paket (Rp.)

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal.....
Camat.....

(.....)

Tembusan :

1. *Bupati Kabupaten* .....
2. *Tim Sekretariat Kabupaten* .....
3. *Pertinggal*

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN

Form-LKD-6

(SP3)

Proyek : **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) Tahun Anggaran .....[1)]**

No Kode Loan : JBIC – IP.....[2)]

Paket Perjanjian Kerja : .....[3)]

No Perjanjian Pemberian Pekerjaan : .....[4)]

PERJANJIAN KERJA

Perjanjian ini (termasuk Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, yang selanjutnya disebut PERJANJIAN KERJA), pada hari ..... tanggal..... bulan ..... tahun .....[5)], bertempat di Kabupaten .....[6)] Kecamatan.....[7)])

Antara

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (yang selanjutnya disebut PEMILIK) yang diwakili oleh,

Nama : .....[8)]

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Kabupaten* .....

Alamat : .....[9)]

yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, c.q *Departemen Pekerjaan Umum (Direktorat Jenderal Cipta Karya)*, c.q Pemerintah Kabupaten.....[6)]Kecamatan.....[7)], berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....[10)], telah ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) *Kabupaten* ..... Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) Tahun Anggaran .....[1)], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

dengan

Nama :.....[11)]

Jabatan : Ketua LKD

Alamat : .....[12)]

yang berwenang dalam hal bertindak untuk dan atas nama LKD..... [13a)] Desa ....., [13b)] Kecamatan ..... [7)], Kabupaten .....[6)]

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13740951.pdf

di .....[14], selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Maka dengan ini disetujui oleh dan diantara pihak pertama dan pihak kedua tersebut diatas, hal-hal sebagai berikut :

PASAL 1
LINGKUP PEKERJAAN

LKD harus melaksanakan , menyelesaikan, memperbaiki Pekerjaan, yaitu :

PNPM PISEW Tahun Anggaran .....[1]

PAKET : .....[3]

PASAL 2

DOKUMEN PERJANJIAN KERJA

Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian dari Perjanjian Kerja ini, yaitu :

(1) Perjanjian Kerja

(2) Syarat-syarat Perjanjian Kerja

(3) Spesifikasi Umum (terkait prasarana yang dibangun)

(4) Surat Rekomendasi Camat

(5) Lampiran Dokumen Pendukung :

(i) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

(ii) Daftar Kuantitas dan Harga yang telah diisi *(BOQ)*

(iii) Daftar Usulan Penggunaan Alat Berat (bila ada)

(iv) Daftar Usulan Ketua Pelaksana dan Tenaga Kerja

(v) Gambar Rencana *(DED)*

(6) Pakta Integritas

UNIVERSITAS TERBUKA

PASAL 3

MASA PERJANJIAN KERJA

3.1. Sesuai dengan Perjanjian Kerja ini dan Dokumen Perjanjian Kerja sebagaimana telah ditentukan. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja, adalah.....[15] (.....[16] hari kalender kerja.

3.2. Perjanjian Kerja tersebut berlaku sejak tanggal penanda-tanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian Kerja ini ditandatangani.

PASAL 4

KEWAJIBAN LKD

4.1. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja, LKD wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, serta menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

peralatan, pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau di sekitar pekerjaan, serta melaksanakan segala sesuatu baik yang bersifat permanen maupun bersifat sementara yang dipergunakan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam Perjanjian Kerja dan ditafsirkan secara wajar dalam Perjanjian Kerja.

4.2. Melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja sampai diterima baik oleh *PPK* kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan.

4.3. Dalam rangka pencapaian Tujuan Proyek PNPM PISEW, LKD wajib menunjuk Ketua Pelaksana yang mampu memberikan pelatihan kepada masyarakat desa baik untuk pelaksanaan konstruksi maupun untuk pemeliharaan prasarana yang telah dibangun.

PASAL 5

KEWAJIBAN PEMILIK/PPK

5.1. Memberikan *akses kepada* LKD ke lokasi pekerjaan, penggunaan semua lahan dan bangunan sebagaimana yang dinyatakan dalam Gambar Rencana dan atau dokumen lain dalam Perjanjian Kerja.

5.2. Membayar LKD atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran pekerjaan terhadap harga satuan dan harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga, pada waktu dan dengan cara yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kerja atau dengan harga-harga yang mungkin ditentukan secara lain berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja.

PASAL 6

PENGAWAS PELAKSANAAN

6.1. Pengawas pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PPK atau pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. LKD harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk tertulis PPK dan atau *PJOK Kecamatan / PJOK KSK yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah*.

6.2. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan dilakukan oleh Konsultan Tenaga Teknis Lapangan.

PASAL 7

JUMLAH NILAI PERJANJIAN KERJA

Jumlah Nilai Perjanjian Kerja untuk pekerjaan yang tertuang didalam Pasal (1) Surat Perjanjian ini, yang dihitung berdasarkan besarnya kuantitas pekerjaan yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga,sebesar : Rp..... [17] (..... Rupiah)[18]
tanpa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana yaitu 100% Pinjaman Luar Negeri (PLN), sedangkan pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran oleh LKD, diselesaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

PASAL 8
CARA PEMBAYARAN

Pelaksanaan pembayaran pekerjaan tersebut dalam pasal (1) Surat Perjanjian ini akan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di .....[19].

8.2. Tahap Pertama sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai SP3 diberikan setelah penandatangan dokumen SP3 *tanpa harus ada jaminan/Bank Garansi*. Ketua LKD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilampiri Dokumen SP3, Surat Rekomendasi Camat, Jadwal Kerja, Berita Acara Pembayaran, dan Kwitansi Pembayaran.

8.3. Tahap Kedua dan Ketiga masing-masing sebesar 30 % dari nilai SP3 dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 40% dan 80%. Dokumen yang disertakan adalah:

1) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)
2) Berita Acara Prestasi Pekerjaan (Form LKD-10.c)
3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD-10.d)
4) Kuitansi Pembayaran Angsuran (Form LKD-10.b)
5) Rencana Penggunaan Dana (Form LKD -10.a)

8.4. Tahap Keempat adalah 10% dari nilai SP3 dengan ketentuan prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dan telah diserahterimakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dokumen yang disertakan adalah:

1) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (Form LKD-10.a.2)
2) Berita Acara Prestasi Pekerjaan (Form LKD-10.c)
3) Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (Form LKD-10.d)
4) Kuitansi Pembayaran Angsuran (Form LKD-10.b)
5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan LKD ke PPK (Form LKD - 11.a)
6) Gambar purna laksana (as built drawing)
7) Foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan (0%, 50% dan 100%) pada titik atau station (STA) yang sama.
8) Rencana kegiatan Operasional dan Pemeliharaan (OP) oleh Tim OP yang dibentuk berdasarkan rembug Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP) di tingkat desa

UNIVERSITAS TERBUKA

PASAL 9
PENYERAHAN PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai 100%, Pengawas menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan dan Kedua belah pihak melakukan penandatanganan berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Berita Acara penyerahan pekerjaan ini menjadi salah satu syarat penarikan keuangan tahap keempat.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

PASAL 10

KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerja ini, LKD dan Pemilik/PPK sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PASAL 11

PERSELISIHAN

Penyelesaian perselisihan dapat melalui :

a. Diluar Pengadilan ; dengan cara Musyawarah / Mediasi / Konsiliasi atau Arbitrase

b. Pengadilan

PASAL 13
DOMISILI

Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri di ..... [19)]

PASAL 14

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

14.1. Yang dimaksud dengan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP3 tidak dapat dipenuhi.

14.2. Yang digolongkan dengan kahar adalah ; Peperangan, Kerusuhan, Revolusi, Bencana Alam (Banjir, Gempa Bumi, Badai, Gunung Meletus, Tanah Longsor, Wabah Penyakit dan Angin Topan), Kebakaran

14.3. Tindakan yang diambil untuk mengatasi kaadan terjadinya kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar ditentukan berdasar kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 15

LAIN-LAIN

Kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja atau disepakati oleh kedua belah pihak maka alamat-alamat untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan untuk masing-masing pihak adalah :

a. Pemilik (PPK *Kabupaten*) :..... [7)]
Alamat kawat .....

Alamat telek/fax.....

b. LKD:..... [13)]

Alamat kawat.....

Alamat telek/fax.....

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DENGAN KESAKSIAN INI, pihak-pihak yang bersangkutan telah menanda-tangani Perjanjian Kerja atas nama masing-masing pada tempat, hari, tanggal, bulan dan tahun yang tercantum diatas.

PIHAK PERTAMA,

Pejabat Pembuat Komitmen

Kabupaten .....

PIHAK KEDUA,

Ketua LKD

Materai

.....[10)]

.....[7)]

PENJELASAN

1) = Tahun Anggaran Pelaksanaan Proyek
2) = Nomor Kode Loan
3) = Nama Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan
4) = Nomor Perjanjian Kerja
5) = Hari dan tanggal penandatangan Perjanjian Kerja
6) = Nama Kabupaten
7) = Nama Kecamatan
8) = Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
9) = Alamat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
10) = Nomor dan tanggal surat penunjukkan PPK
11) = Nama Ketua LKD
12) = Alamat LKD
13a) = Nama LKD, Nama Desa, Nama Kecamatan dan Nama Kabupten
13b) = Nama LKD, Nama Desa, Nama Kecamatan dan Nama Kabupten
13) = Domisili Bupati Kabupaten
14) = Jumlah hari /Perjanjian Kerja dalam angka
15) = Jumlah hari / Perjanjian Kerja dalam huruf
16) = Nilai Perjanjian Kerja dalam angka
17) = Nilai Perjanjian Kerja dalam huruf
18) = Alamat KPPN
19) = Lokasi dan wilayah hukum Kantor Pengadilan Negeri

Catatan:
Dokumen Perjanjian Surat Pemberian Pekerjaan (SP3) dibuat sebanyak 6 (enam) buku.
Copy 1 diberikan kepada PPK (tanda tangan asli dan cap basah)
Copy 2 diberikan kepada LKD (tanda tangan asli dan cap basah)
Copy 3 dan 4 diberikan kepada KPKN (fotocofy dan cap basah)
Copy 5 diberikan kepada Satker (fotocofy dan cap basah)
Copy 6 diberikan kepada PJOK (fotocofy dan cap basah)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Form. LKD-8.f

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGEMBANGAN INFRASTUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM - PISEW) TA....
RENCANA JADUAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Paket Pekerjaan :
Volume :
Waktu Pelaksanaan :

No	Uraian	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Bobot %	Renc. Real.	Tahun															
							Bulan I				Bulan II				Bulan III				Bulan IV			
							1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.						Renc.																
						Real.																
2.						Renc.																
						Real.																
3.						Renc.																
						Real.																
4.						Renc.																
						Real.																
5						Renc.																
						Real.																
6						Renc.																
						Real.																
7						Renc.																
						Real.																
	Jumlah																					
	Rencana																					
	Rencana Kumulatif																					
	Realisasi																					
	Realisasi Kumulatif																					
	Selisih																					

Dijelaskan ... TTL LKD .....

(.....) (.....) (.....) FK / Ttl (.....) Ketua

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

23/40981.pdf

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT –PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (PNPM – PISEW)

TAHUN ANGGARAN.........

Form-LKD. 10.a

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)

Kabupaten :...........................
Kecamatan :...........................
Desa :...........................
Paket Pekerjaan :...........................

No.	Uraian bahan yang akan dibeli	Volume	Satuan	Harga (Rp.)	Total harga
Total					

Diperiksa oleh

Ttl

(..................)

Dibuat oleh

Ketua LKD

(.......................)

UNIVERSITAS TERBUKA
Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Form-LKD-10.a.1

BERITA ACARA PEMBAYARAN UANG MUKA

Nomor : .....

I. Pada hari ini,.....tanggal .....bulan .....tahun..... kami yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : .....
   Jabatan : PPK Kabupaten ....., Paket Proyek .....
   ....., Desa .....,
   Kecamatan .....,Kabupaten.....
   Alamat : .....
2. Nama : .....
   Jabatan : Ketua LKD, Desa .....Kecamatan ....., Kabupaten .....
   Alamat : .....

II. Berdasarkan;
   a. Surat Pengesahan DIPA,
      Nomor : .....
      Tanggal : .....
   b. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) :
      Nomor : .....
      Tanggal : .....
   c. Jumlah Biaya.....: Rp ..... (.....)

III. Maka Ketua LKD berhak menerima pembayaran uang Uang Muka dari PPK Kabupaten ..... dengan uraian sebagai berikut ;
   a. Uang Muka ..... = 30 %
   b. Jumlah Uang Muka = Jumlah Biaya (Rp...) x 30 %
      = Rp.....
      (.....)

IV. Ketua LKD sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke rekening;
   a. Nomor Rek : .....
   b. Bank : .....

Demikan Berita Acara Pembayaran Uang Muka ini dibuat dalam rangkap .... (.....) dan dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Diperiksa Oleh ;		Diajukan Oleh,
PJOK Kecamatan / PJOK KSK Kec./KSK	TtL	Ketua LKD
(.....)	(.....)	(.....)

Disetujui Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(.....)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Form LKD-10.a.2

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : .....

I. Pada hari ini,.....tanggal .....bulan .....tahun..... kami yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : .....
   Jabatan : PPK Kabupaten. ....., Paket Proyek .....
   ....., Desa .....,
   Kecamatan .....,Kabupaten.....
   Alamat : .....

2. Nama : .....
   Jabatan : Ketua LKD, Desa .....Kecamatan ....., Kabupaten .....
   Alamat : .....

II. Berdasarkan;

b. Surat Pengesahan DIPA,
   Nomor : .....
   Tanggal : .....

b. Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) :
   Nomor : .....
   Tanggal : .....

c. Laju Pekerjaan Fisik Sampai saat ini :.....%
   .....(.....)

III. Maka Ketua LKD berhak menerima pembayaran uang Tahap ke: ..... sebesar Rp.....(.....) dari PPK Kabupaten .....,

IV. Posisi Keuangan Sekarang:

a. Penarikan s.d.yang lalu Rp. .....
b. Penarikan tahap ini Rp. ..... +
c. Penarikan s.d. tahap ini Rp. .....
d Sisa yang belum ditarik Rp. .....

V. Ketua LKD sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dan dibayarkan ke rekening;

a. Nomor Rek : .....
b. Bank : .....

Demikan Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana ini dibuat dalam rangkap ..... (.....) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diperiksa Oleh ;
PJOK Kec./PJOK KSK Ttl

Diajukan Oleh:
Ketua LKD

(.....) (.....) (.....)

Disetujui Oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(.....)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

ISEW
13740951.pdf

Form-LKD-10.b

KUITANSI
PEMBAYARAN ANGSURAN/TERMIN

Proyek : **Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) Tahun Anggaran .....**

Telah diterima dari : PPK Kabupaten.....

Uang Sebesar : Rp.....

Untuk keperluan : Pembayaran Tahap ke:.....
Atas paket pekerjaan :.....
di.....

Sesuai dengan SP3 Nomor.....Tanggal.....
dan BAP Nomor..... Tanggal.....

Terbilang : Rp.

.....,.....,.....

Setuju dibayar
PPK *Kabupaten.* ....

Yang menerima
Ketua LKD.....

(.....) (.....)

No Rekening:.....

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Form LKD - 13

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan : Paket Pekerjaan (***sebutkan :*** **Nama paket - Volume & Total nilai kontrak SP3**) ..... Kabupaten .....Propinsi....., Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) – Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) pada Satuan Kerja Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan TA ....., dengan ini menyatakan bahwa kami :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pekerjaan / kegiatan ini.
3. Dalam proses pekerjaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kab. ....., (Tgl,bln.thn)....

Kami yang menyatakan :

1. PPK : ..... (...tanda tangan...)
2. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa)
   Ketua : ..... (...tanda tangan...)
   Sekretaris : ..... (.. tanda tangan ...)
   Anggota : ..... (.. tanda tangan...)
   Anggota : ..... (...tanda tangan...)
   Anggota :..... (...tanda tangan...)
3. LKD .....
   Ketua : ..... (....tanda tangan...)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
(PNPM Mandiri PISEW)

KECAMATAN : Air Gegas

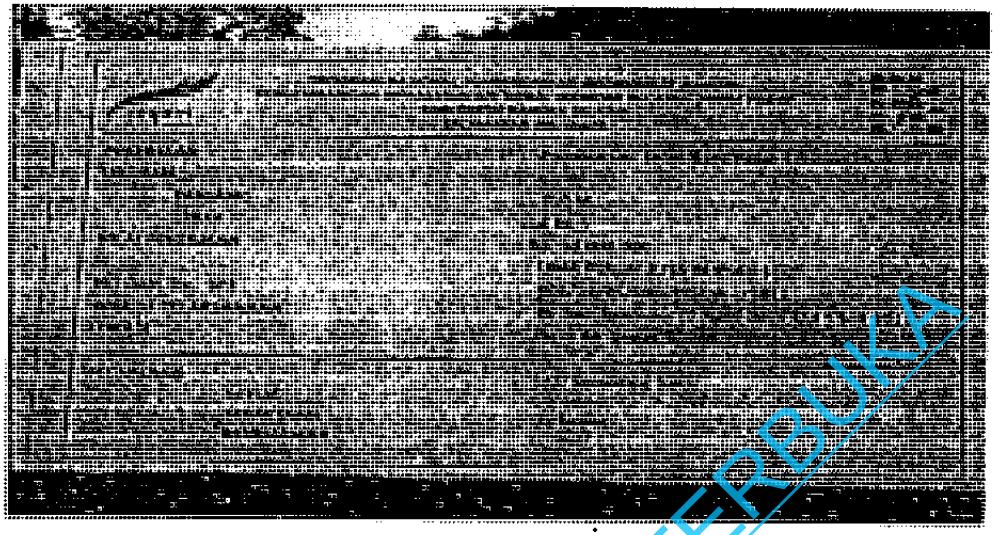

Lokasi :
Kec. Air Gegas.
Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan Baru Paket 1
Kemajuan Pisik = 0 %

Kemajuan pisik = Papan Proyek

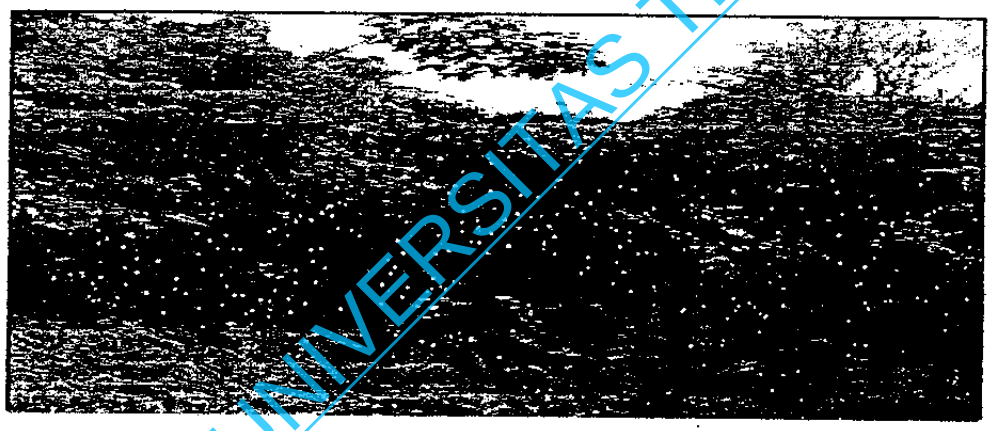

Lokasi :
Kec.Air Gegas.
Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan Baru Paket 1
Kemajuan Pisik = 0 %

Lokasi :
Kec.Air Gegas.
Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan Baru Paket 1
Kemajuan Pisik =40 %

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
(PNPM Mandiri PISEW)

KECAMATAN : Air Gegas

Lokasi :
Kec.Air Gegas.
Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan Baru Paket 1

Kemajuan Pisik =80 %

Lokasi :
Kec.Air Gegas.
Desa Air Gegas

Kegiatan :
pembukaan Jalan Baru Paket 1

Kemajuan Pisik =100 %

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KECAMATAN AIR GEGAS
DESA AIR GEGAS
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
Tahun Anggaran 2011

Berita Acara

Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan (KPP)

Pada hari ini Jum'at Tanggal 20 Bulan mei Tahun Dua Ribu Sebelas telah diadakan rapat Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di Desa Air Gegasg

Dalam rapat pembentukan KPP ini juga telah terbentuk pengurus dan anggota sesuai dengan tabel yang terlampir dalam berita acara ini

Demikian berita acara pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara ini dibuat, dan akan dijadikan dasar bagi seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan KPP pada Air Gegasg

Pemimpin rapat

(Arifil)

Notulen / Sekretaris

(Abdul Sonik)

Mengetahui,
Kepala Desa Air Gegasg

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN KEPALA DESA AIR GEGAS KECAMATAN AIR GEGAS

(Badrin)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

Pasal 12
Gotong Royong

a. Gotong royong dilaksanakan 1 x sebulan setiap hari jumat minggu pertama
b. Gotong royong dapat dilaksanakan sebelum jadwal apabila sangat mendesak

Pasal 13
Biaya Pemeliharaan

a. Diutamakan dari Kas KPP yang berasal dari iuran masyarakat yang memanfaatkan prasarana infrastruktur dikutip Rp. 5000/Perbulan.
b. Apabila biaya perbaikan melebihi jumlah Kas KPP, maka akan menggunakan Kas Desa

Pasal 14

a. Sesuai perkembangan pengembangan Desa, maka diadakan Musyawarah setiap bulan,
b. Perubahan baik perbaikan atau penambahan AD/ART diputuskan melalui Musyawarah Desa,
c. Musyawarah sah apabila kehadiran anggota 2/3 jumlah anggota/ ½ +1 jumlah anggota.

Ditetapkan

Bendahara KPP

Ropikoh

Air Gegas,20/05/ 2011
Ketua KPP

Azhari

Mengetahui
Kepala Desa Air Gegas

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KEPALA DESA AIR GEGAS
KECAMATAN AIR GEGAS

Badrin

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

Surat Pernyataan Kesanggupan
Pemanfaatan dan Pemeliharaan Prasarana

Kami yang bertanda-tangan dibawah ini masing-masing:

1. Nama : **Badrin**
   Jabatan : Kepala Desa Air Gegas
   Alamat : Desa Air Gegas
   Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama : Azhari
   Jabatan : Ketua KPP
   Alamat : Desa Air Gegas

Menyatakan kesanggupan untuk memanfaatkan dan memelihara prasarana Infrastruktur PNPM-PISEW Tahun Anggaran 2011 di Desa Air Gegas.

Demikialah surat penyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Air Gegas, 20 Mei 2011

Diterima oleh
Kepala Desa Air Gegas

(**Badrin**)

Disepakati oleh
Ketua KPP terpilih

(**Azhari**)

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

DAFTAR PENGURUS DAN ANGGOTA
KPP DESA AIR GEGAS

Kabupaten : Bangka Selatan
Kecamatan : Air Gegas
Desa : Air Gegas

No.	Nama	Usia (Thn)	Jenis Kelamin (L/P)	Jabatan	Alamat (RT/RW)
1	Azhari	59	L	Ketua	RT 04 Air Gegas
2	ropikoh	34	P	Bendahara	RT 10 Air Gegas
3	sobirin	40	L	Seksi pemeliharaan	RT 07 Air Gegas
4	Sumadi	25	L	Anggota	RT 07
5	Suhardi	30	L	Anggota	RT 12
6	Sunaljono	36	L	Anggota	RT 03
7	Azwar	30	L	Anggota	RT 04 Air Gegas
8	Munkaryati	34	P	Anggota	RT 03
9	Andriani	32	P	Anggota	RT 02
10	Fuhana	30	L	Anggota	RT 12

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

13/40951.pdf

ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART)
KELOMPOK PEMANFAAT DAN PEMELIHARA (KPP)
DESAAIR GEGAS

BAB I
Keorganisasian

Pasal 1
Domisili

a. Nama : Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Desa Air Gegas
b. Tanggal Pendirian : 20/05/2011
c. Tempat : Balai Desa Air Gegas

Pasal 2
Struktur Organisasi

a. Ketua : Azhari

b. Bendahara : Ropikoh

c. Seksi Pemeliharaan : Sobirin

BAB II
Keanggotaan

Pasal 3
Keanggotaan

a. Sumardi

b. Suhardi

c. Sunaljono

d. Azwar

e. Munkaryati

f. Andriani

g. Suhana

h. Andi Lala

i. Romlah

j. Azwar

UNIVERSITAS TERBUKA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka